

Catatan Wija To Luwu

M e r e s p o n s
TANTANGAN
ZAMAN

Dari Lokalitas Hingga Globalitas

Dr. Abdul Pirol, M.Ag.

MERESPONS TANTANGAN ZAMAN: dari Lokalitas hingga Globalitas

Dr. Abdul Pirol, M.Ag.



Catatan Wija To Luwu

IAIN PALOPO

Penerbit:
LPS Press
STAIN Palopo
2008

Dr. Abdul Pirol, M.Ag



Merespons Tantangan Zaman:
dari Lokalitas hingga Globalitas
(Catatan Wija To Luwu)

IAIN PALOPO

Penerbit:
LPS Press
STAIN Palopo
2008

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**Merespons Tantangan Zaman:
dari Lokalitas hingga Globalitas
(Catatan Wija To Luwu)**

Palopo: LPS STAIN Palopo Press

vii+192 hlm; 21 cm.

Bibliografi: 5 hlm.

ISBN 978-979-1187-16-9

1. Sosiologi Islam

I. Judul

II. Dra. Baderiah, M.Ag

297.622

Penulis

Dr. Abdul Pirol, M.Ag.

Editor

Dra. Baderiah, M.Ag

Penerbit

LPS Press

STAIN Palopo

Alamat: Jl. Agatis Palopo Sulawesi Selatan

Telp. 0471-22076; Fax. 0471-325195

Cetakan I, Desember 2008

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

All rights reserved

Pengantar Penulis

Al-hamdulillah buku dengan judul *Merespons Tantangan Zaman: dari Lokalitas hingga Globalitas* dapat diterbitkan. Buku ini terbit tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa moril maupun materil. Untuk itu, penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang turut membantu mulai dari penulisan hingga pengeditan dan penerbitan.

Isi buku ini sebagian besar berasal dari artikel yang saya tulis di surat kabar Palopo Pos ditambah beberapa tulisan untuk bahan ceramah dan diskusi. Sebagaimana tampak pada judul buku ini, berbagai tulisan yang ada pada dasarnya merupakan respons penulis terhadap berbagai isu atau peristiwa yang terjadi baik pada tingkat lokal maupun global. Isu atau peristiwa dimaksud berkaitan dengan banyak aspek meliputi antara lain: sosial, budaya, pendidikan, sejarah, hukum, politik, dan dakwah.

Lokalitas terkait dengan masalah-masalah setempat dari suatu wilayah atau yang terjadi di daerah. Pada level ini, respons penulis tujukan pada isu atau peristiwa yang terjadi pada suatu daerah termasuk di Palopo atau wilayah Tana Luwu pada umumnya. Sedang globalitas menyangkut isu atau peristiwa yang terjadi di dunia yang sifatnya lintas batas, misalnya isu-isu terorisme, perilaku Israel dan Amerika serta masalah globalisasi itu sendiri.

Akhirnya, penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada isteri tercinta (Baderiah) dan empat putra-putri tersayang (Ahmad Hidayat Abdullah, Dhiya Azami Abdullah, Cita Qanita Abdullah, dan Khafifah Farazadi Abdullah). Tanpa pengertian dan pengorbanan mereka, yang merelakan sebagian waktu dan hak mereka, sulit rasanya mewujudkan keinginan penulis merampungkan

buku ini. Semoga mereka menjadi anak-anak yang saleh dan bisa menghargai karya ayah mereka yang sederhana ini.

Kiranya buku ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca dan pengkaji studi-studi keislaman. Tak ada gading yang tak retak. Untuk itu, penulis senantiasa mengharapkan masukan dan koreksian demi perbaikan dan penyempurnaan buku ini.

Amassangan Palopo, 4 Desember 2008

Abdul Pirol



IAIN PALOPO

Daftar Isi

Pengantar Penulis~iii

Daftar Isi~v

Bagian Pertama,

Hijrah dan Masa Depan Umat~1

1. Peringatan 1 Muharram, Akankah Semakin Bermakna?~2
2. Menghadapi Hari ini dan Masa Depan~6
3. Kota Palopo dalam Rangka Bangun Praja
(Sebuah Kenangan Manis)~10
4. Kota Idaman (ku): Catatan atas Piala Adipura
di Ulang Tahun Keempat Palopo~14
5. Bangkit dari Krisis~19
6. Bencana Mendera, Alamat Alam Murka?~21
7. Merenungkan Kembali Peran Agama dalam Kehidupan~25
8. Bangsa Sehat, Terdidik, dan Sejahtera?~29

Bagian Kedua,

Pendidikan dan Generasi Muda~34

1. Profesor Malik Fadjar tentang Peran Strategis Pendidikan~35
2. Kontraversi Sekitar RUU Sisdiknas 2003
(Telaah atas Pendidikan Agama)~38
3. Kurikulum Berbasis Kompetensi:
Catatan Awal~43
4. Kurikulum Berbasis Kompetensi:
Konsep dan Implementasinya~46
5. Palopo sebagai Kota Pendidikan~51
6. Kontribusi dan Tantangan STAIN Palopo
bagi Pembangunan Daerah di Luwu~57

7. Polisi dan Mahasiswa Bentrok, Siapa Kalah?
(Renungan untuk Insiden UMI)~60
8. Masihkah Mahasiswa Agen Perubahan?~64
9. Reaktualisasi Sistem Pendidikan Islam
(Upaya Membumikan Sunnah Rasulullah saw.)~65

Bagian Ketiga,

Sosial Politik dan Refleksi Sejarah~70

1. Dinamika Politik di Indonesia:
(Catatan *Trend* Pemosisian Islam)~71
2. *Strong Leader* dan Realisasi Cita Sosial~74
3. Politik *Sikamasei*~80
4. Provinsi Luwu, Sebuah Identitas Baru?~84
5. Luwu, Menjembatani Masa Lampau ke Masa Kini
(Catatan dan Renungan 23 Januari)~88
6. 23 Januari, Pemelihara Ingatan?~93
7. Motto Luwu dari Beriman ke Sejuk Bersinar~96
8. *Good Governance*, RAPBD dan Kemiskinan~98
9. M. Jusuf Kalla di Kancah Politik Nusantara~102
10. Nakhoda Palopo 5 Tahun ke Depan
(Sebuah Pesan Kepemimpinan)~106
11. Pilkada Damai dan Bermartabat di Luwu
(Implementasi Nilai-Nilai Keluwuan)~110

Bagian Keempat,

Syari'at Islam dan Realitas Keindonesiaan~115

1. Syari'at Islam di Bumi Pancasila~116
2. Membangun Sistem Sosial Islami~119
3. Palopo sebagai Kota Religi~122
4. Ramadhan Membentuk Kepribadian Muslim
dengan Meneladani Sifat Allah~126

5. Puasa dan *Emotional Quality Management*
(Menyingkap Sisi-Sisi Puasa)~131
6. Puasa dan Hidup Sederhana~136
7. Revolusi Politis Wujud Nyata Berqurban~140
8. Perspektif Agama sebagai Landasan Birokrasi
dalam Mewujudkan *Good Governance*~143
9. Merawat Keinsafan Hidup dalam Semangat Berqurban~151

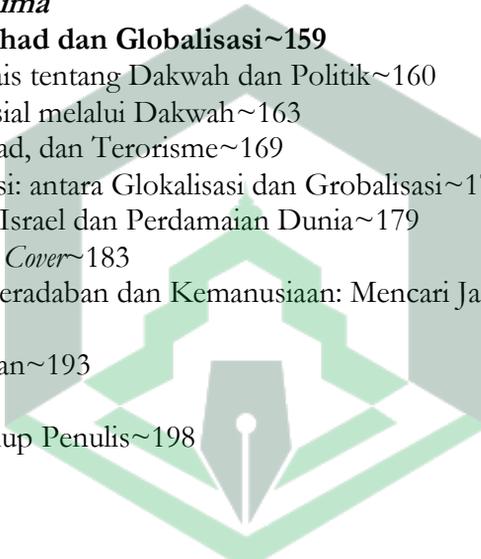
Bagian Kelima

Dakwah, Jihad dan Globalisasi~159

1. Amien Rais tentang Dakwah dan Politik~160
2. Kritik Sosial melalui Dakwah~163
3. Islam, Jihad, dan Terorisme~169
4. Globalisasi: antara Glokalisasi dan Grobalisasi~175
5. Amerika, Israel dan Perdamaian Dunia~179
6. Jakarta *on Cover*~183
7. Tragedi Peradaban dan Kemanusiaan: Mencari Jalan Keluar~188

Daftar Bacaan~193

Riwayat Hidup Penulis~198



IAIN PALOPO



BAGIAN PERTAMA:
HIJRAH DAN MASA DEPAN UMAT

IAIN PALOPO

1. Peringatan 1 Muharram, Akankah Semakin Bermakna?

1 Muharram 1426 Hijriyah bertepatan dengan 10 Pebruari 2005 Masehi diperingati oleh kaum Muslim di Indonesia sebagai tahun baru Islam. Tradisi memeringati 1 Muharram sebagai tahun baru Islam dilaksanakan dengan harapan ada sesuatu nilai tambah bagi peningkatan hidup dan kehidupan umat Islam. Tradisi peringatan itu sendiri telah berlangsung cukup lama, namun seyogianya selalu disertai pertanyaan nilai tambah seperti apa yang akan dan sudah kita peroleh?. Jawaban atas pertanyaan tersebut berguna untuk menilai bagaimana seharusnya peringatan itu dilaksanakan dan sejauhmana kita memerlukannya.

Penanggalan Hijriyah merupakan salah satu jasa monumental Khalifah Umar ibn Khatthab ra. Tahun Hijriyah ditetapkan Umar ibn Khatthab ra. pada tahun ketujuhbelas dihitung dari tahun terjadinya peristiwa Hijrah atau tahun kelima dari masa pemerintahannya. Penanggalan ini dibuat bukan semata-mata mempertimbangkan kepentingan umat Islam pada masa itu. Dengan kata lain, menjadikan Hijrah sebagai dasar perhitungan penanggalan Hijriyah aspek agama tidak menonjol. Padahal, bisa saja Umar menetapkan hari lahirnya Nabi Muhammad saw. atau hari turunnya al-Qur'an sebagai dasar perhitungan.

Umar tidak memilih tahun kelahiran Nabi Muhammad saw. sebagai dasar perhitungan, sebab dia paham betul prinsip tauhid Islam tidak menghendaki Nabi Muhammad dikultuskan atau didewakan. Umar juga tidak memilih hari turunnya al-Quran sebagai dasar perhitungan karena dia menghendaki agar penanggalan itu bisa diterima seluruh rakyatnya tanpa ada perasaan dominasi agama. Sebab, patut diketahui, menurut Nourouzzaman Shiddiqy (1996), pada masa

pemerintahan Umar jumlah kaum non Muslim jauh lebih banyak daripada yang Muslim.

Penanggalan Hijriyah dibuat berdasarkan sistem *lunar* (sistem peredaran bulan) berbeda dari penanggalan Masehi atau Miladiyah yang menggunakan sistem *solar* (sistem peredaran matahari). Dua macam penanggalan ini, masing-masing mempunyai hikmah sendiri. Penanggalan Masehi misalnya, lebih cocok untuk kegiatan praktis duniawi, seperti pertanian. Karena, berdasarkan peredaran matahari dikenallah empat musim, yaitu panas, dingin, gugur, dan semi. Sedang penanggalan Hijriyah sesuai terutama untuk perhitungan waktu beribadah (formal), seperti puasa dan haji. Sebab, dengan mengikuti peredaran bulan, suatu ibadah seperti puasa dan haji akan beredar ke seluruh musim, suatu saat jatuh pada musim panas dan saat lain jatuh pada musim dingin secara bergiliran. Sehingga, dalam siklus tigapuluh semua orang di semua tempat akan pernah merasakan berpuasa dalam satu musim.

Substansi peringatan tahun baru Hijriyah biasanya mengungkapkan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad saw. bersama sejumlah pengikutnya ke Madinah, suatu tempat yang sebelumnya bernama Yastrib. Nabi Muhammad saw. mengganti nama Yastrib dengan "Madinah" atau "Madinah al-Nabi" yang berarti "Kota" atau "Kota Nabi". Dari perubahan nama tersebut mengandung makna bahwa dengan titik tolak kota tersebut Nabi ingin membangun suatu kehidupan bermasyarakat yang lebih teratur atau, sesuai dengan namanya "Madinah", Nabi ingin membangun suatu bentuk kehidupan yang berperadaban.

Kini, "Hijrah" dengan arti "perpindahan" patut dimaknai tidak hanya perpindahan dalam arti fisik, tetapi juga perpindahan dalam arti moral, intelektual, dan emosional-spiritual. Sederhananya, makna yang dikehendaki adalah perpindahan dalam arti peningkatan kualitas di

semua aspek kehidupan. Hal ini tidak saja memerlukan pemahaman ideologis-motivasional, tetapi juga, memerlukan adanya komitmen dan arah-arrah pasti yang akan dituju serta bagaimana aksi nyatanya. Di sini lah, tampak ironis bagi kita, jika peringatan itu dilaksanakan hanya sekadar seremonial belaka, setelah itu selesai dan tidak diikuti dengan aksi-aksi nyata.

Hijrah atau perpindahan secara fisik, misalnya, masih tetap diperlukan manakala tempat kediaman tidak aman dan nyaman bagi aktivitas hidup sehari-hari. Termasuk, jika tempat kediaman tersebut tidak prospektif bagi tujuan-tujuan ideologis, politik, ekonomi, dan sosial-budaya dalam jangka panjang. Pindah dalam arti fisik ini, juga diperlukan manakala secara geografis tempat kediaman kita terancam atau rawan bencana alam. Sedang Hijrah dalam arti moral, intelektual, dan emosional-spiritual berarti perpindahan ke arah peningkatan kualitas aspek-aspek tersebut.

Kejatuhan secara moral terjadi ketika nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan persamaan dilanggar dengan mudah tanpa rasa risih. Kebangkruatan intelektual terjadi ketika para pendukungnya terlibat pada kepentingan segelintir orang dan sesaat dengan mengorbankan kepentingan orang banyak dan untuk jangka panjang. Kehampaan emosional-spiritual menerpa ketika pertimbangan dan kebijakan yang diambil meminggirkan dimensi psikoreligius-transendental. Nah, ketika sebuah bangsa secara moral, intelektual, dan emosional-spiritual terpuruk, maka Hijrah ditampilkan untuk menjawab dan menemukan solusinya. Tidak semata-mata sebagai ajang untuk meratapi dan menyesalinya.

Sejalan dengan itu, peringatan tahun baru Islam, setidaknya tetap meminta dua hal, yaitu refleksi terhadap masa (tahun) lalu dan prediksi sebagaiantisipasi masa depan. Refleksi dilakukan untuk menilai keadaan dan apa yang sudah kita lakukan. Termasuk,

menemukan solusi dari persoalan-persoalan yang belum bisa diatasi. Dengan begitu, refleksi membantu kita membuat prediksi mengenai masa depan. Melalui refleksi terhadap keadaan masa lampau dan juga sekarang, kita bisa membuat jembatan bagi masa depan. Jembatan untuk masa depan itu sendiri menentukan corak dan bentuk kehidupan yang hendak dituju.

Ajakan melakukan tobat semata sekaitan dengan peringatan tahun baru Islam tidaklah memadai. Diperlukan pula ajakan-ajakan yang lebih produktif bagi masa depan kemanusiaan dan ajakan-ajakan yang bernuansa harmonis dan sinergis antara manusia dengan manusia, alam, dan bahkan dengan Tuhan. Ajakan-ajakan tersebut perlu menekankan paradigma baru hubungan manusia dengan sesamanya manusia bersama-sama dengan alam sebagai bagian tak terpisahkan dari makro kosmos jagat raya. Sehingga, muncul kesadaran baru bahwa alam bukan hanya "obyek" bagi manusia. Alam adalah sahabat manusia, sama-sama "hamba" Allah di dunia ini.

Sejak memasuki abad kelimabelas Hijriyah, telah dua dasawarsa lebih, kaum Muslim Indonesia melaksanakan secara gencar peringatan 1 Muharram sebagai tahun baru Islam. Biarlah peringatan itu terus berlangsung, sebab kita memang masih memerlukannya. Hanya saja, melalui peringatan itu diharapkan lahir konsep-konsep alternatif yang sesuai dengan kebutuhan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Sehingga, peringatan tahun baru Islam tetap memiliki makna. Semoga 1 Muharram yang terus diperingati sebagai tahun baru Islam akan semakin bermakna bagi upaya membangun kehidupan bermasyarakat dan bernegara ke arah lebih baik.

2. Menghadapi Hari Ini dan Masa Depan

Hidup dan kehidupan manusia terkait dengan waktu, sedang waktu itu sendiri terus berjalan dan tak kenal kata berhenti hingga tiba masa yang telah ditentukan. Oleh karena itu, bagi manusia masa mempunyai batas-batas, ada masa lalu, masa kini, dan masa datang. Masa lalu berarti masa yang telah dijalani, baik atau buruknya hanyalah tinggal sebagai pengalaman dan menjadi kenangan. Ada ungkapan populer, pengalaman adalah guru terbaik. Bahwa “*experience is the best teacher*” (*al-tajribah huwa al-‘ālim al-aḥsan*).

Kalau begitu yang akan kita hadapi adalah masa kini dan masa datang. Bagaimana kita di masa kini amat ditentukan oleh bagaimana kita di masa lalu. Sedang, bagaimana kita di masa datang amat ditentukan oleh bagaimana kita di masa kini. Karena itu, ada semacam kesinambungan yang bersifat linear dan sekaligus mengikuti hukum sebab akibat. Hal ini sejalan dengan ungkapan “*the past is the key to the present and the present is the key to the future*”. Bahwa masa lalu adalah kunci masa kini dan masa kini adalah kunci untuk masa depan.

Terkait dengan perjalanan waktu nabi Muhammad saw. mengingatkan umat Islam agar selalu berupaya meningkatkan kualitas kehidupannya di segala bidang. Dalam salah satu hadis, beliau mengingatkan agar “keadaan seorang muslim hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini”. Hanya, sebagai manusia biasa yang bisa saja salah dan keliru, maka di sinilah perlunya ada penilaian atas apa yang telah kita kerjakan. Kesalahan dan kekeliruan yang diperbuat oleh seorang muslim, jika kemudian disadarinya, seyogianya semakin mendorong untuk meningkatkan amal kebajikannya dan sekaligus berupaya semaksimal mungkin untuk tidak mengulanginya (tobat).

Keadaan hidup dan kehidupan umat Islam terkait dengan pandangan dan pemahaman tentang kehidupan itu sendiri dan bagaimana kehidupan manusia berubah. Sejauh ini, di kalangan umat Islam terdapat dua pandangan mengenai hal tersebut. *Pertama*, pandangan bahwa hidup dan kehidupan manusia telah ditentukan oleh Tuhan; *kedua*, pandangan bahwa manusia memiliki potensi untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginannya. Pandangan pertama membawa manusia jatuh kepada paham fatalisme, sehingga menimbulkan sikap pasif yang cenderung pasrah atas segala keadaannya. Bagi pandangan ini, apapun keadaan mereka adalah takdir Allah yang sudah menjadi nasib mereka. Sedang, pandangan kedua membawa kepada paham “*pre-destination*” dan sikap dinamis, sehingga menimbulkan sikap aktif yang selalu berupaya agar keadaan yang mereka alami adalah wujud dari seberapa keras mereka menggunakan potensi yang dimilikinya. Pandangan kedua ini, sekaligus melahirkan sikap optimistis sebagai kebalikan dari pandangan pertama yang melahirkan sikap pesimistis.

Selain itu, ada pula anggapan, hidup di dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir dan kehidupan dunia adalah laksana bangkai. Karena itu, tidak sepatasnya bagi orang mukmin untuk hidup senang dan menikmati kehidupan dunia ini. Bahagian orang mukmin adalah kehidupan akhirat semata. Pemahaman seperti ini tentu saja keliru. Bukankah do'a yang diajarkan kepada kita adalah agar hidup kita baik di dunia dan akhirat sekaligus? Kehidupan dunia ini seharusnya menjadi tempat dan kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan bekal akhirat. Dunia harus menjadi ladang amal untuk kehidupan di kelak kemudian hari.

Persoalan kemudian, bagaimana menghadapi kekinian dan masa depan itu. Kekinian kita adalah hari ini, yakni masa yang sementara kita jalani. Sedang masa depan ada dua macam, yaitu masa

sesudah hari ini sampai masa di mana kita memasuki kehidupan yang lain (masa dunia) dan masa depan di mana setiap orang akan melihat dan memperoleh balasan atas segala perbuatannya di dunia (masa akhirat). Dalam hal ini, agama mengajarkan kepada kita agar mempersiapkan diri untuk menghadapinya.

Mengikuti perjalanan waktu yang masih mungkin kita jalani, ada tiga hal yang tetap relevan untuk dimiliki. *Pertama*, memiliki sikap yang selalu optimis. Sikap ini akan mendorong seseorang untuk dinamis dalam hidup. Di samping, bekerja keras untuk mewujudkan impiannya dalam kehidupan dunia, karena dia memahami bahwa berusaha di kehidupan dunia ini hakikatnya juga adalah usaha untuk kehidupan akhirat. Bekerja secara optimal berpengaruh pada apa yang dicita-citakan. Sesuai dengan ajaran agama, kehidupan dunia dan akhirat adalah kehidupan yang terintegrasi (padu). Karenanya, apapun yang dilakukan untuk kehidupan dunia akan berpengaruh bagi kehidupan akhirat dan sebaliknya. Di sinilah letaknya sehingga usaha itu pun bernilai ibadah.

Usaha dan kerja keras harus menjadi ciri seorang muslim. Tidak patut bagi seorang muslim berpangku tangan menunggu nasib dan membiarkan masa berlalu tanpa berusaha menentukan keadaan yang diinginkannya. Bukankah “Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum ia mengubah apa yang ada dalam dirinya”? Perubahan mana menyangkut perubahan terhadap pandangan dan pemahaman dirinya sendiri terhadap dunia dan faktor perubahannya. Dengan begitu, usaha merupakan salah satu faktor yang menentukan nasib seseorang. Meski demikian, agama juga mengajarkan agar usaha dibarengi dengan do’a.

Kedua, mengiringi usaha dengan do’a. Do’a adalah permohonan kepada Allah swt. Do’a adalah inti ibadah menurut ajaran Islam. Do’a yang kita panjatkan tidaklah berarti mengabaikan

kemampuan dan potensi yang telah dianugerahkan Allah swt. kepada manusia untuk mengadakan perubahan. Do'a lebih mencerminkan kerendahan hati, ketundukan, dan keinginan untuk selalu dekat dengan Tuhan (*taqarrub ila allah*). Do'a mengantarkan seseorang pada kesadaran bahwa selalu ada faktor lain yang berpengaruh terhadap usaha betapapun kecilnya faktor dan kemungkinan itu. Do'a bukanlah wujud fatalisme, dan seharusnya tidak demikian, tetapi do'a pada dasarnya mengajarkan optimisme.

Do'a juga menjadi kontrol atas usaha seseorang, sehingga usaha apapun yang dilakukannya akan ditujukan pada kemanfaatan bagi dirinya sendiri, orang lain, dan bagi alam lingkungannya. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa do'a itu penting. Dengan do'a seseorang tidak akan mengalami frustrasi, sebab ia memiliki sandaran vertikal, paling tidak melalui do'a seseorang bisa menyalurkan ketegangan batin ataupun kekecewaan atas suatu rencana yang belum berhasil. Dengan demikian, do'a juga mengantar seseorang kepada sikap tawakkal.

Ketiga, sikap tawakkal. Tawakkal tidak sama dengan pasrah, menyerah pada suatu keadaan. Tawakkal adalah sikap seorang muslim yang berani menghadapi kenyataan. Tentu saja, setelah ia berusaha secara optimal dan berdo'a. Ajaran tawakkal ini mampu membangun ketegaran dan keteguhan seseorang menghadapi apapun situasi dan keadaan yang dialaminya. Dengan sikap seperti ini, seseorang akan sanggup bangkit dari keadaan yang paling buruk sekalipun. Dengan kata lain, sikap tawakkal mampu membangun pandangan positif atas segala kondisi, sehingga seorang muslim tidak perlu berputus asa atas sebuah kegagalan yang dialaminya. Hal mana sejalan dengan ajaran agama agar seseorang tidak berputus asa dari rahmat Allah swt.

Masa berubah zaman berganti, satu-satunya yang tetap berlaku dalam dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Menghadapi hal ini, tetap

harus dibangun optimisme dan dinamisme betapapun buruknya keadaan. Sebaliknya, keadaan terbaik sekalipun yang kita alami seyogianya tidak membuat kita lalai untuk bersyukur. Bagi seorang Muslim, semua kondisi tetap relevan memiliki tiga sikap di atas, yaitu berusaha dan bekerja optimal, berdo'a, dan tawakkal.

3. Kota Palopo dalam Rangka Bangun Praja (Sebuah Kenangan Manis)

“*Narekko laoki baja taroki lebba cedde pallawa uddani*”.
Maknanya "Kalau suatu ketika anda berangkat pergi tinggalkanlah kenangan manis sebagai penawar rindu".

Dalam konteks tulisan ini, "Kalau suatu waktu anda menjadi pemimpin, tinggalkanlah sesuatu yang akan selalu dikenang dalam memori sejarah masyarakat sebagai sebuah prestasi monumental". Sepenggal kalimat ini, adalah nasihat populer dari leluhur kita kepada anak-anaknya yang tetap hidup dalam masyarakat.

"Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan nama". Dalam pandangan agama, manusia itu memiliki umur kedua. Mereka yang memiliki umur kedua adalah mereka yang telah wafat, tetapi nama mereka tetap abadi karena jasa-jasanya. Mereka yang masuk dalam kategori ini pula lah yang disebut sebagai mereka yang memiliki umur panjang.

Menyebut beberapa tokoh, di antaranya: kalau Jakarta punya Bang Ali (Ali Sadikin -mantan Gubernur DKI Jakarta), Makassar punya Pak Patompo (mantan-Walikota Ujungpandang-sekarang Makassar), maka insyaallah Palopo punya Pak Tenriajeng (sapaan akrab H.P.A. Tenriajeng, Walikota Palopo). Ungkapan ini tidaklah dimaksudkan untuk menyanjung orang-orang tertentu, tetapi bagi penulis bermakna adanya tokoh-tokoh dan pemimpin yang telah

mengukir prestasi () bagi rakyat yang dipimpinnya. Paling tidak, itulah harapan yang seharusnya dipenuhi oleh para pemimpin.

Cahaya terang karena sinar lampu, di tengah kekurangan pasokan listrik, yang mulai menerangi jalan-jalan kota; cahaya terang karena suasana yang mulai tampak bersih di segenap penjuru kota; jalan-jalan yang telah diperbaiki; dan selokan-selokan yang mulai bersih serta suasana indah, teduh dan nyaman karena pohon-pohon yang ditanam dan ditata Pak Rahim Kuti beserta jajarannya, mulai mewujudkan impian Palopo sebagai Kota Idaman. Tentu saja, kita berharap upaya dan gerakan ini segera disusul dengan gerakan-gerakan lainnya dan mendapat dukungan dari segenap komponen dan lapisan masyarakat.

Menuju Gerakan Kultural-Religius

Langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah Kota Palopo menyongsong bangun praja dengan memobilisir berbagai komponen melakukan gerakan kebersihan dan penataan kota adalah usaha yang patut disambut baik. Tidak tanggung-tanggung, Pak Walikota bahkan memimpin langsung. Bagi mereka yang komitmen terhadap budaya hidup bersih; baik dari kalangan ulama-tokoh agama, pendidik, maupun tokoh masyarakat dan bahkan dari kalangan tokoh-tokoh politik serta unsur generasi muda, gerakan ini jelas sangat menggembirakan dan penting karena itu patut didukung.

Karena itu pula, kita berharap langkah dan upaya ini dapat ditingkatkan menjadi gerakan kultural dan religius, sehingga tidak lagi semata-mata menjadi gerakan individu atau institusional. Sebagai gerakan kultural, upaya mewujudkan dan memelihara kebersihan haruslah bisa menjadi budaya masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap kebersihan di lingkungan sekitarnya. Jika telah menjadi gerakan kultural, maka masyarakat Kota Palopo akan sadar bersih lingkungan dan kebersihan

akan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupannya sehari-hari. Salah satu indikatornya, masyarakat tidak akan membuang sampah di sembarang tempat.

Memang, salah satu masalah yang dihadapi oleh daerah-daerah yang mulai berkembang dan berbenah seperti Palopo ini adalah masalah "penanganan sampah". Di satu sisi, sudah menjadi tugas pemerintah kota untuk membuat perencanaan penanganannya dengan baik. Di sisi lain, masyarakat memang harus memiliki budaya hidup bersih. Untuk yang pertama, penanganan sampah sudah patut dilaksanakan dengan cara-cara profesional dan modern, termasuk melatih dan memperlengkapi petugasnya dengan alat-alat yang canggih. Barangkali bisa petugas kebersihan juga dilatih seperti petugas pemadam kebakaran. Sehingga, meskipun menangani sampah, tetapi petugasnya tidak harus berpenampilan yang kumuh. Mereka bahkan bisa dipikirkan diberikan sistem upah yang memadai. Apalagi mereka menangani sampah yang tentu saja berisiko tinggi bagi kesehatan.

Memelihara kebersihan dalam pandangan religius merupakan bagian tak terpisahkan dari keimanan seseorang, bukan semata-mata sebagian dari iman seperti yang biasa dinyatakan orang. Dari aspek ini pula, kebersihan itu dituntut bukan hanya berkaitan dengan fisik-material, tetapi juga, bersih secara batiniah-rohaniah. Maka, dari perspektif religius ini, gerakan kebersihan juga harus merambah pada seluruh aspek kehidupan. Dengan begitu, kebersihan lingkungan sekitar, haruslah mengakomodasi kita untuk bersih di segenap aspek, termasuk dalam menangani pekerjaan dan tugas.

Tak Terpisahkan dari Disain Pembangunan Palopo

Semua instansi pemerintah di Kota Palopo seyogianya menjadikan gerakan kebersihan sebagai prioritas di instansinya masing-masing dan bersinergi dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, gerakan kebersihan memang harus menjadi program tak terpisahkan

dari disain pembangunan Kota Palopo untuk jangka panjang. Ini sejalan dengan ungkapan Pak Wali "Setiap langkah tak ada sampah berserakan". Yang tiada lain maknanya adalah jadikanlah hidup bersih sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka apa tidak bisa, misalnya, ketika seseorang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), salah satu aspek yang dipertimbangkan adalah bagaimana penanganan limbah (sampah) nya, baik cair maupun padat. Untuk yang cair, dipertimbangkan ada tidaknya selokan terdekat. Sedang limbah padat dipertimbangkan ada tidaknya tempat pembuangan sampah yang dilalui petugas kebersihan. Hal yang sama juga harus berlaku bagi dunia industri. Izin usaha hanya akan diberikan manakala melampirkan proposal penanganan limbah usaha atau industrinya.

Sebagai pusat aktivitas, apalagi berada di jalur trans Sulawesi, penanganan kebersihan di Kota Palopo juga mendapat kendala dari bus-bus angkutan yang lalu lalang. Repotnya, manakala tatkala melintas di kota, para penumpang bus, membuang bermacam-macam sampah. Hal ini harus dapat diantisipasi, misalnya dengan memasang peringatan "dilarang membuang sampah sembarang tempat" di perbatasan atau tempat-tempat strategis lainnya.

Menjadi masalah tersendiri pula, manakala pembangunan Ibukota Palopo ini tidak sinergis dengan wilayah di sekitarnya. Syukur jika telah dipikirkan bagaimana posisi wilayah-wilayah lain terhadap wilayah ibukota dalam berbagai hal. Di sini, apa tidak mungkin wilayah-wilayah lain itu sudah didisain sebagai daerah penyangga yang memiliki karakteristik tersendiri sejak awal. Termasuk tempat-tempat yang ditentukan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Hal ini hemat penulis, akan berdampak positif bagi Kota Palopo dalam jangka panjang.

Berbarengan dengan gerakan kebersihan yang dilakukan, ruang publik harus tetap dipertahankan keberadaannya dalam suatu kota. Hal ini, agar tidak mengulang kesalahan pembangunan di sebagian kota-kota besar, di mana mall-mall (tempat perbelanjaan) semakin meminggirkan ruang-ruang publik masyarakat. Karena itu, adanya taman baca baik jika diperbanyak, didukung tempat-tempat ibadah yang asri, dan tempat pendidikan yang juga berfungsi sekaligus sebagai tempat rekreasi, tempat wisata, dan jantung atau paru-paru kota. Selain mendukung terwujudnya kota idaman, juga mendukung upaya konservasi lahan.

Kenangan Manis

Keterlibatan semua pihak dan berbagai komponen masyarakat di bawah arahan dan pimpinan Pak Wali melalui gerakan kebersihan dalam rangka bangun praja seyogianya telah berada pada apa yang disebut "*point of no return*" atau berada pada titik yang tidak mungkin kembali lagi. Selain itu, gerakan kebersihan ini harus menjadi gerakan budaya, gerakan religius dan sekaligus menjadi bagian tak terpisahkan dari program pembangunan Kota Palopo. Jika berhasil, upaya dan gerakan ini akan menjadi kenangan manis sepanjang masa. Semoga!

4. Kota Idaman (ku): Catatan atas Piala Adipura di Ulang Tahun Keempat Palopo

Menjelang ulang tahun keempat, Kota Palopo mendapat kado istimewa berupa piala Adipura untuk kategori kota sedang dari Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kegembiraan dan rasa syukur atas keberhasilan tersebut diwujudkan oleh pemerintah kota dan segenap warga Palopo dengan melakukan sujud syukur, arakan piala keliling kota, apel bersama di lapangan Gaspa dan disambung dengan kegiatan memakan makanan

tradisional "kapurung" (terbesar dan terpanjang versi MURI yang juga berhasil diraih).

Apapun, piala Adipura jelas merupakan prestasi mengembirakan terlebih diperlombakan dan diumumkan secara nasional. Bandingkan prestasi Kota Palopo ini dari kota-kota lain yang juga mendapat predikat, tetapi kebalikannya, sebagai kota terjorok. Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam rangkaian kegiatan penyerahan hadiah piala Adipura, mengatakan kota-kota yang berhasil memelihara kebersihan lingkungan perlu diberi predikat (penghargaan), dan sebaliknya, juga memberi predikat kepada kota-kota yang rendah kepeduliannya kepada kebersihan lingkungan sebagai kota terjorok. Syukur, predikat yang kita terima adalah yang pertama, sehingga mendapat piala Adipura.

Satu hal yang perlu digarisbawahi dari kerberhasilan ini, bahwa cita-cita mewujudkan Palopo sebagai Kota Idaman bukanlah sesuatu yang mustahil. Belajar dari keberhasilan meraih piala Adipura, kita setuju dengan ungkapan Walikota Palopo Bapak H. P. A. Tenriadjeng di sejumlah kesempatan bahwa sepanjang kita membangun "Kebersamaan yang bertanggung jawab", maka cita-cita menuju Palopo sebagai Kota Idaman insyaallah bisa terwujud. Selain itu, dapat pula dimaknai bahwa keberhasilan meraih piala Adipura, juga mencerminkan tekad dan keinginan yang kuat dari Walikota dalam membangun Kota Palopo menjadi kota yang maju.

Piala Adipura Momentum

Mewujudkan Budaya Hidup Bersih

Genderang perang untuk mewujudkan Palopo sebagai Kota Idaman melalui hidup bersih telah ditabuh sedemikian nyaring oleh Walikota Palopo dengan motto "Setiap langkah tak ada sampah berserakan!". Karena itu, memelihara kebersihan lingkungan sekitar (misalnya: rumah, sekolah, kantor, jalan, dan pasar), seperti yang telah

pernah penulis kemukakan, sudah merupakan gerakan yang berada pada "*Point of no return*" (titik tidak boleh kembali lagi). Untuk itu, keberhasilan meraih piala Adipura harus ditindaklanjuti dengan usaha yang sungguh-sungguh dan lebih terpadu dengan keterlibatan seluruh komponen warga Kota Palopo, sehingga hidup bersih menjadi budaya warga masyarakat.

Meraih piala Adipura jelas merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Tetapi, mempertahankan dan meningkatkan prestasi tersebut jauh lebih sulit lagi. Oleh karena itu, upaya mempertahankan dan meningkatkan prestasi di bidang kebersihan ini harus diusahakan menjadi bagian dari budaya warga masyarakat. Dengan begitu, ia tidak menjadi beban, tetapi menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas keseharian. Jika telah menjadi budaya, maka upaya mewujudkan kebersihan lingkungan akan lahir dari dalam diri setiap warga secara spontan tanpa merasa terpaksa.

Upaya dan gerakan mewujudkan budaya hidup bersih seyogianya dipelopori oleh pemerintah kota beserta seluruh jajarannya- dengan Dinas Kebersihan sebagai ujung tombaknya-, disusul instansi vertikal dan didukung oleh instansi lainnya, secara khusus termasuk institusi pendidikan seluruh jenjang, masyarakat madani, ulama-tokoh agama/masyarakat, pelaku bisnis dan masyarakat pada umumnya. Kepeloporan itu bisa dimulai secara individual berupa kebiasaan tidak membuang sampah bukan pada tempatnya; memelihara kebersihan (keep clean) area tempat tinggal dan tempat kerja atau usaha; dan peduli kebersihan lingkungan, termasuk memberi bimbingan terhadap anak-anak tentang pentingnya memelihara kebersihan.

Instansi pemerintah harus menjadi wilayah-wilayah yang dapat dicontoh kebersihannya. Demikian halnya, dengan tempat-tempat tertentu seperti: sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, pasar, warung kopi, pusat pertokoan (mall), perpustakaan kota dan ruang-ruang

publik lainnya seperti taman baca atau taman kota. Lagi-lagi, ini menunjukkan bahwa gerakan kebersihan seyogianya melibatkan seluruh komponen masyarakat. Hal ini sangat penting disosialisasikan, terutama juga, kepada profesi-profesi yang bersentuhan dengan orang banyak seperti guru dan ulama-tokoh agama. Khusus profesi-profesi tersebut, perlu diupayakan semacam pelatihan yang relevan dan memberikan kemampuan tambahan dalam mendukung terciptanya budaya hidup bersih.

Ulang Tahun Keempat Palopo dan Cita-Cita Menuju Kota Idaman

Peringatan ulang tahun dapat menjadi kegiatan evaluasi program-program yang telah dilaksanakan. Biasanya, lumrah dikatakan prestasi yang telah dicapai diupayakan lebih ditingkatkan lagi. Sedang, prestasi yang belum diupayakan mencapainya. Keberhasilan meraih Adipura dan "*performance*" Kota Palopo secara fisik (dapat langsung diamati) yang menunjukkan adanya perubahan ke arah lebih baik merupakan indikator keberhasilan pemerintah kota dan berbagai komponen masyarakat. Hal ini, jika diinternalisasikan oleh setiap warga dapat menjadi modal sosial dalam memacu pembangunan kota.

Sejumlah keberhasilan yang telah dicapai, termasuk yang tak disebutkan dalam tulisan ini, memunculkan harapan agar kehidupan masyarakat terus dipacu khususnya bidang-bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi-taraf hidup masyarakat. Di tiga bidang ini, masyarakat mendambakan adanya ide, gagasan dan langkah (program) inovatif-kreatif-spektakuler pemerintah kota yang berbasis pada kepentingan kesejahteraan masyarakat. Paling tidak, di tiga bidang ini masyarakat merasakan adanya kemudahan-kemudahan. Sejalan dengan itu, mutu pelayanan aparatur pemerintah kota perlu ditingkatkan secara berkesinambungan. Prinsip "Aparat melayani masyarakat" harus terwujud, dan bukan sebaliknya, "Masyarakat melayani aparat".

Dalam imajinasi penulis, Palopo Kota Idaman berarti kota yang didambakan, karena itu, menjadi tujuan cita-cita warganya dan sekaligus dituju oleh setiap orang yang mendengarnya. Sebagai Kota Idaman, Palopo didamba tidak hanya mapan dari segi struktur secara fisik, administratif-kewilayahan, politis, ekonomis, dan sosial-budaya. Tetapi juga, secara batiniah berupa kedamaian antar pemerintah dan seluruh komponen warga masyarakat; dan antar warga masyarakat sendiri. Kedamaian dan kenyamanan juga melintasi perbedaan SARA (suku, agama, ras dan aliran kepercayaan) dan menjangkau seluruh ruang, tempat dan waktu. Dari aspek batiniah pula, masyarakat memiliki kegairahan bekerja dan menjalankan aktivitasnya tanpa gangguan dan hambatan.

Hemat penulis, tujuh dimensi strategi pembangunan Kota Palopo yang dicanangkan pemerintah kota sesuai dan sejalan dengan cita-cita menuju Kota Idaman. Yang ditunggu, adalah akselerasi langkah-langkah realisasi untuk menuai hasilnya. Tentu saja, hal tersebut bukan sesuatu yang mudah, namun bercermin pada keberhasilan-keberhasilan yang selama ini dicapai, kita semua patut optimistis. Sebagai salah seorang warga, posisi penulis adalah memberikan dukungan atas langkah-langkah positif yang diambil pemerintah kota untuk kemajuan Palopo. Terlebih lagi, manakala elite pemimpin Kota Palopo memegang prinsip dan sanggup mengatakan sekaligus membuktikan ucapan "Apa yang terbaik bagi Palopo dan warga masyarakatnya, terbaik juga bagiku!".

Maka, keberhasilan meraih piala Adipura merupakan tanda bahwa kita memiliki peluang mewujudkan budaya hidup bersih sebagai salah satu bagian tak terpisahkan dari upaya menuju Palopo sebagai Kota Idaman. Optimisme tersebut harus didukung oleh kebersamaan, kedamaian, dan keharmonisan semua unsur warga masyarakat. Dirgahayu Kota Palopo!

5. Bangkit dari Krisis

Saat ini, bangsa Indonesia tengah berjuang membangun Indonesia Baru. Sege nap komponen bangsa berusaha bangkit dari keterpurukan segala bidang untuk membangun Indonesia maju, sejahtera, dan berkeadilan. Indonesia yang berperadaban. Untuk memaksimalkan perjuangan itu, diperlukan kesediaan dan kesiapan anak-anak bangsa bahu-membahu mencurahkan sege nap potensi yang dimiliki, baik pikiran maupun tenaga.

Krisis multidimensional yang berkepanjangan dan hingga kini, masih menyelimuti kesedihan kemasyarakatan kita, perlu terus menerus dipikirkan jalan keluarnya. Sehingga, kehidupan rakyat tidak semakin terpuruk yang ujung-ujungnya rakyat juga lah yang akan mengalami penderitaan dan kesulitannya.

Krisis dan persoalan bangsa yang sudah sedemikian rumit dan kompleks itu, tampaknya memerlukan penanganan serius secara komprehensif dan dilakukan dengan melibatkan semua unsur. Meski demikian, hal ini tidak berarti: pertama, tidak ada hal-hal betapapun kecilnya bisa dan perlu dilakukan dan kedua, juga tidak berarti hanya orang-orang tertentu dengan keahlian tertentu yang diperlukan.

Salah satu bidang yang perlu mendapatkan perhatian semua pihak adalah pendidikan. Untuk jangka panjang, sebagai satu solusi dari krisis, pendidikan harus ditangani secara optimal dan melibatkan apa yang dikenal sebagai tri sentrum pendidikan: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada saat yang sama, prinsip *education for all and all for education* (pendidikan untuk semua dan semua untuk pendidikan) menjadi motto dan acuan program pembangunan.

Sementara itu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah seyogianya memiliki kesamaan pandangan tentang pentingnya pendidikan. Keluarga hendaknya memiliki kemampuan untuk

merencanakan dan mengarahkan pendidikan bagi anggota keluarganya. Masyarakat diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif (iklim belajar), dan pemerintah diharapkan pula dapat membuat aturan perundang-undangan dan memfasilitasi keberlangsungan proses pendidikan.

Tiga komponen di atas: keluarga, masyarakat, dan pemerintah diharapkan terlibat secara optimal dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Lebih lanjut, tiga komponen ini diharapkan pula dapat saling bekerjasama. Untuk itu, masing-masing komponen ini perlu selalu memikirkan dan membarui respons terhadap usaha pendidikan.

Ada beberapa hal perlu dipahami oleh tiga komponen di atas: pertama, bagi keluarga, pendidikan harus dipahami sebagai satu investasi jangka panjang, hasilnya tidak dapat dilihat segera. Tetapi, untuk jangka panjang tidak dapat dibantah pengaruhnya terhadap kemajuan bangsa.

Keluarga juga perlu memahami keberhasilan anak didik tidak dapat semata-mata diukur dari prestasi di sekolah. Karena hal itu hanya salah satu aspek saja yang mendukung keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Keberhasilan seseorang tidak hanya dapat diukur kecerdasan intelektualnya, tetapi juga dari kecerdasan spiritualnya. Demikian pula, keluarga perlu menanamkan sejak dini bagi anggota keluarganya untuk tidak berorientasi kepada gelar kesarjanaaan, tetapi bagaimana proses pendidikan itu sanggup menanamkan nilai-nilai akademik dan nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Kedua, bagi masyarakat, diharapkan pula mengambil tanggung jawab dan peran dalam mendukung keberhasilan pendidikan. Selain menciptakan suasana yang mendukung semangat belajar, diharapkan pula masyarakat bisa memberikan pengawasan terhadap anak-anak usia sekolah. Dan bukannya membuat sarana-sarana yang bisa menjerumuskan anak usia sekolah kepada hal-hal yang meruak masa

depan mereka. Karena itu, pembukaan usaha ekonomi juga harus mempertimbangkan aspek moral dan spirit belajar, dan tidak mengejar keuntungan materi semata.

6. Bencana Mendera, Alamat Alam Murka?

Negeriku, Indonesia didera bencana bertubi-tubi. Bencana alam dan bencana buatan manusia. Kini, ungkapan negeriku Indonesia sepotong surga di bumi mulai tergugat. Atau, negeri yang kaya raya alamnya, “jamrud khatulistiwa”, kini mulai kaya dengan bencana. Indonesia (mungkin) bukan lagi “Eden of East”. Indonesia bukan lagi sejuta kenikmatan saja, tetapi juga, sejuta bencana. Dahulu bangsa-bangsa lain datang kemudian menjajah dan menjarah karena tertarik dengan kekayaan alam yang melimpah ruah. Sekarang, meski penjarahan terselubung tetap berlangsung, nilai sebagian pengamat, tetapi dengan kondisi alam yang seperti ini entah apakah mereka masih tetap tertarik dan punya niat yang sama.

Kesadaran bahwa kita hidup di sebuah negeri rawan bencana semakin menguat segera setelah bencana tsunami melanda Aceh yang menelan korban jiwa dan harta yang tak ternilai harganya. Bencana tsunami itu, kemudian disusul bencana-bencana berikutnya: gempa di Nias, banjir dan gempa di Gorontalo, banjir bandang di Sulawesi Selatan, dan gempa di Pangandaran. Termasuk, bencana buatan manusia berupa longsor, kebakaran hutan, dan tak kalah hebohnya, banjir lumpur panas di Sidoarjo. Bencana susul-menyusul ini, tak pelak membuat wajah negeriku semakin menderita. Bencana bertubi-tubi semakin menambah beban negeri ini untuk keluar dari krisis multidimensional yang memang sudah menjadi bencana lebih awal.

Membaca Tanda-Tanda Alam

Bencana setidaknya dapat dibaca dari tiga perspektif. Pertama, bencana terjadi murni sebagai fenomena alam; kedua, bencana terjadi dipandang sebagai “ujian” atau “kutukan” Sang Pencipta dan Pemilik alam; dan ketiga, bencana terjadi akibat ulah dan pongah manusia sendiri. Perspektif pertama menilai berbagai bencana terjadi akibat gerak-gerak alamiah alam. Maka, gempa bumi, tsunami, dan banjir terjadi, menurut pandangan ini, semata-mata mengikuti kemauan alam. Akan tetapi, meski demikian tidaklah merupakan hal yang mustahil untuk mempelajari dan memahami gerak-gerak alamiah alam, yang dalam batas-batas tertentu seringkali disebut sebagai fenomena alam. Karena itu, penguasaan terhadap berbagai fenomena alam diperkirakan dapat membantu manusia untuk beradaptasi dengan alam sekaligus mengantisipasi kemungkinan timbulnya bencana.

Tindakan ini pada akhirnya pula diharapkan dapat meminimalkan kerugian akibat terjadinya bencana.

Pandangan kedua menilai bahwa berbagai bencana terjadi menurut “kehendak” Sang Pencipta dan Pemilik alam. KehendakNya terjadi dengan maksud untuk memberikan ujian atau kutukan. Bencana menurut pandangan ini merupakan ujian jika menimpa orang-orang yang baik (saleh). Sedang, bencana akan menjadi kutukan (azab) bagi mereka yang banyak melakukan kesalahan. Karena itu, dalam agama terdapat ajaran sabar dan tobat. Sabar hendaknya dilakukan oleh orang-orang baik dan saleh yang tertimpa bencana. Tobat diminta dilakukan oleh orang-orang yang melakukan banyak kesalahan dan kejahatan agar dengan begitu azab Tuhan tidak melanda manusia. Seringkali terdengar imbauan agar bangsa ini melakukan “tobat nasional”. Bisa jadi imbauan ini ada hubungannya dengan kekhawatiran akan turunnya azab Tuhan karena dosa-dosa manusia.

Mengacu pada perspektif kedua ini, dapat dipahami munculnya kerisauan sebagian kalangan tentang berbagai patologi sosial dan perilaku korup yang bertentangan dengan ajaran agama dan moral. Sebab, perilaku tersebut dinilai dapat menimbulkan bencana yang akibatnya tidak hanya menimpa mereka yang jahat saja, tetapi juga dapat menimpa mereka yang baik. Sehingga, dapat dipahami mengapa mereka yang mengacu pada pandangan ini sangat menginginkan adanya aturan yang bisa membentengi masyarakat dari perilaku yang menjurus pada patologi sosial dan perilaku korup tersebut. Repotnya, ketika ada upaya seperti ini justru menimbulkan pro dan kontra yang terutama seringkali dikaitkan dengan isu pluralitas dan hubungan antara agama dan negara.

Perspektif ketiga menilai berbagai bencana yang terjadi ada hubungannya dengan ulah dan pongah manusia. Dalam ungkapan ajaran agama dikatakan “telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan-tangan manusia”. Setidaknya, ungkapan ini sangat relevan dengan berbagai bencana yang terjadi yang masuk kategori bencana “buatan manusia”, seperti kebakaran hutan, banjir dan longsor akibat penebangan maupun penggundulan hutan. Seringkali pemanfaatan alam tidak dibarengi dengan upaya memelihara kelestarian lingkungan. Akibatnya, timbulah dampak-dampak yang merugikan manusia sendiri. Manakala ini yang terjadi, maka muncullah bencana yang dapat diungkapkan dengan sangat tegas sebagai tanda kemurkaan alam. Di sini alam pun juga bereaksi terhadap tindakan eksploitatif atas dirinya.

Penanganan dan Antisipasi Bencana

Satu kesyukuran di balik berbagai bencana yang melanda negeri ini ternyata mampu menggugah kepedulian komponen-komponen bangsa. Bukan hanya pemerintah, tetapi juga, kelompok masyarakat dan individu (hingga dunia internasional). Walaupun dalam

beberapa hal penanganan bencana dan pasca bencana dinilai masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, namun yang terpenting adalah bagaimana membangun kemampuan untuk melihat masalah yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Kiranya, kemampuan untuk melihat "musuh" bersama inilah yang selama ini kurang dimiliki oleh bangsa ini plus komitmen untuk bersama-sama memeranginya.

Bencana betapapun kecil kerugian yang ditimbulkannya bukanlah sekadar persoalan angka-angka semata. Satu jiwa sekalipun jangan sampai membuat kita meremehkan persoalannya. Oleh karena itu, meski konsep penanganan bencana "3 R" (*Rescue*, *Recovery*, dan *Reconstruction*) dapat diimplementasikan di lapangan hingga capaian maksimal, harus tetap disadari ada ruang-ruang yang tak dapat diisi dan tergantikan. Mereka yang kehilangan orang-orang yang dicintainya, misalnya. Rasa kehilangan itu tidak akan dapat serta merta terhapus begitu saja. Kenyataannya justru banyak yang berubah menjadi trauma. Intinya, bantuan material yang kita berikan kepada korban bencana hanya membantu sebagian dari persoalan yang mereka hadapi.

Sementara itu, mengantisipasi kemungkinan timbulnya bencana susulan di manapun di wilayah negeri ini seyogianya juga mendorong kita untuk merumuskan langkah-langkah yang perlu segera diambil sebagai tindakan antisipatif. Dengan kata lain, bencana yang telah terjadi merupakan pelajaran berharga bagi bangsa ini untuk lebih bisa berupaya memahami dan mempelajari alam. Kita tidak ingin dicap sebagai bangsa yang selalu terlambat, termasuk terlambat belajar dari pengalaman.

Hal mendesak yang tidak bisa lagi ditawar, menyebut beberapa di antaranya: perubahan paradigma hubungan antara manusia dan alam; belajar hidup serasi dengan alam; memelihara kelestarian lingkungan, menolak tindakan eksploitatif terhadap alam apapun

alasannya, membangun kemampuan individual dan kolektif menghadapi darurat bencana, dan menjadikan sekolah sebagai agen membangun kesadaran berlingkungan. Dan, tak kurang pentingnya, penggalakan kajian yang relevan. Tampaknya, bencana juga memberikan kepada kita tugas-tugas baru. Meskipun baru, tugas itu sudah semestinya kita lakukan.

7. Merenungkan Kembali Peran Agama dalam Kehidupan

Bangsa Indonesia, bangsa yang beragama. Meskipun, secara formal Indonesia bukanlah negara agama, tetapi rakyatnya mayoritas sebagai penganut agama. Indonesia juga memberikan tempat bagi agama untuk hidup dan berkembang. Bahkan, dalam struktur pemerintahan negara ada lembaga negara yang mengurus masalah-masalah yang terkait agama, yaitu Departemen Agama. Di samping itu, terdapat juga banyak organisasi sosial kemasyarakatan yang berkecimpung dan mengurus persoalan keagamaan di masyarakat. Tak ketinggalan di bidang politik, dapat pula dijumpai partai politik yang bercorak agama.

Kini, bangsa kita segera mengakhiri tahun 2006 dan menyongsong tahun 2007. Momentum pergantian tahun kali ini, cukup istimewa karena berdekatan dengan hari besar umat beragama seperti Natal, Idul Adha, Tahun Baru, dan juga bagi jajaran Departemen Agama yang memperingati Hari Amal Bakti Departemen Agama, 3 Januari. Moment-moment ini semuanya penting dan tampaknya punya pesan dan spirit yang sama kepada kita. Salah satu pesan penting yang patut kita renungkan utamanya menyangkut peran agama yang semakin penting di masa depan yang penuh persaingan dan tantangan.

Berbagai peristiwa yang terjadi dan aktivitas yang ada wajar mendorong kita untuk mengajukan pertanyaan kepada diri kita masing-masing menyangkut pandangan tentang bagaimana seharusnya agama dalam kehidupan ini kita posisikan. Tentulah, kita berkeyakinan bahwa beragama tidaklah cukup hanya dengan pengakuan secara lisan ataupun pencantuman sacara formal keberagamaan kita melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pendek kata, beragama harus lah lebih daripada itu. Beragama tidaklah cukup hanya secara simbolik, namun yang lebih penting lagi bagaimana agama itu fungsional dalam kehidupan.

Untuk menjadi renungan keberagamaan penting untuk menyimak beberapa hal sebagai berikut:

1. Tayangan sinetron. Sebuah sinetron yang masih sedang berjalan tayangannya, menyajikan sebuah dialog di antara para pemainnya, seperti berikut:

Pemain A: "Gugurkan saja kandunganmu itu, toh pacarmu sudah meninggalkan kamu dan menikah dengan wanita lain!".

Pemain B: "Tidak, saya tidak akan menggugurkan kandungan saya. Anak ini adalah titipan dan amanah dari Allah!".

Sepintas lalu jawaban Pemain B bagus. Dan, benar bahwa anak itu amanah dan titipan Allah yang harus dijaga. Namun, ada yang tidak konsisten dalam dialog sinetron ini, jika kita mencermatinya secara mendalam. Yakni, Pemain B sepertinya tidak menyadari bahwa kehamilannya itu akibat melanggar larangan agama. Dia hamil sebelum menikah. Dialog ini bisa membawa pesan permisif (serba boleh), pesan-pesan yang akan semakin melunturkan nilai-nilai agama dalam kehidupan, terutama dalam pergaulan anak muda. Akan lebih baik manakala Pemain B menjawab: "Saya tidak akan menggugurkan kandungan saya ini, sebab itu berarti saya melakukan kesalahan dan pelanggaran agama yang lebih berat lagi!".

2. Realitas Masyarakat. Di sekitar kita, tidak sulit untuk menyaksikan betapa sebagian keluarga Indonesia masih saja harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jangankan untuk makan yang cukup dan bergizi, untuk makan sekali saja sehari mereka harus kerja banting tulang memeras keringat, itupun belum tentu berhasil.

Pernah, ada sebuah keluarga setelah melewati pagi hari menjelang siang, salah seorang anaknya mulai merengek kepada ibunya, sambil berkata: "Bu, ananda lapar!". Sambil mengelus-elus anaknya, sang Ibu hanya mampu berkata: "Sabar anakku sayang!". Sang Ibu hanya mampu mengucapkan kalimat itu, meski Dia tahu belum tentu bisa memperoleh makanan di siang hari itu. Cerita ini pernah termuat di salah satu koran. Memang, mungkin hanya ilustrasi, tetapi tidak mustahil terjadi di negeri kita yang penduduknya, kini, hampir separuh masuk dalam kategori miskin.

Dua renungan di atas, dapat menjadi gambaran tentang bagaimana kita memposisikan agama dalam kehidupan. Renungan pertama, mengenai dialog dalam salah satu tayangan sinetron tersebut di atas, menggambarkan betapa miskinnya pemahaman agama sebagian masyarakat kita. Pemahaman agama yang tergambar melalui dialog tersebut menunjukkan agama belumlah dipahami secara utuh. Dan, agama seolah-olah hanya menjadi tempat untuk melarikan segala macam bentuk keluh kesah, kesulitan dan penderitaan. Masalahnya terutama karena kesulitan yang terjadi itu (hamil sebelum menikah) adalah akibat pelanggaran atas ajaran agama. Tentu, tidaklah pada tempatnya untuk mengatakan akibat perbuatan itu sebagai amanah dari Allah. Maka, jadilah agama hanya menjadi bengkel *ketok magic*.

Renungan kedua di atas, menggambarkan kepada kita hal yang sama berupa miskinnya pemahaman agama dan aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat. Jumlah orang miskin yang mendekati

separuh dari penduduk Indonesia yang berjumlah lebih kurang 220 juta jiwa, berarti ada sekitar 110 juta jiwa penduduk kita yang miskin, menjadi "gambaran nyata" sekaligus "pertanyaan" bagi kita dan bangsa yang katanya beragama ini.

Jika, kemiskinan yang terjadi adalah kemiskinan struktural akibat polah tingkah para birokrat kita, maka kita patut bertanya di manakah nilai-nilai ajaran agama mereka posisikan? Jika, kemiskinan yang terjadi adalah kemiskinan kultural, maka kita pun patut bertanya bagaimanakah masyarakat kita memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai agama, terutama menyangkut etos kerja dan pentingnya berusaha untuk hidup "*hasanah fid-dunya*"?

Kita pun masih bisa bertanya lagi, di manakah keyakinan agama para pengelola negara ini mereka amalkan, ketika kemiskinan yang terjadi diakibatkan oleh korupsi? Kita pun masih bisa bertanya lagi, di manakah solidaritas dan kesetiakawanan sosial bangsa ini, terutama bagi mereka yang kaya atau amat kaya, ketika menyaksikan kemiskinan sebagian masyarakat bangsa ini?

Pangkal penyebab dari dua "kasus" yang menjadi renungan di atas bertolak dari miskinnya pemahaman dan aktualisasi nilai ajaran agama. Miskinnya pemahaman agama memunculkan inkonsistensi dalam sikap keberagamaan yang pada gilirannya menimbulkan siklus keberagamaan individu yang penuh anomali, tidak lurus atau tidak utuh. Satu sisi seseorang bisa begitu saleh penampilan kesehariannya, tetapi sisi lain dia tidak begitu paham arti kesalehan dalam pekerjaan atau jabatan yang diembannya. Atau, aktivitas ritual agama konstan berlangsung, tetapi dia tidak merasa bersalah menipu rakyat. Klimaksnya, naik haji dengan uang hasil korupsi, lalu merasa dosa-dosanya sudah diampuni.

Renungan-renungan tersebut di atas, mudah-mudahan mengantarkan kita pada pandangan dan keyakinan yang sama

menyangkut pentingnya peran agama menjadi dasar dalam menata kehidupan kita sehari-hari. Namun, agama hanya akan memberikan manfaat dan terasa perannya, manakala para penganutnya, umat Islam misalnya, dapat memfungsikan (mengamalkan) nilai-nilai ajaran agama secara *kaffah* (utuh). Karena itu, penting sekali melakukan upaya peningkatan pemahaman agama dan aktualisasinya. Dan, diperlukan pula keteladanan para pemimpin, terutama para pejabat publik. Serta, tak kurang pentingnya tekad dan semangat kuat dari rakyat untuk hidup lebih baik. Inilah di antara solusi yang bisa kita lakukan untuk keluar dari berbagai keprihatinan bangsa. Allah swt. mengingatkan dalam al-Qur'an Surah al-Ra'd ayat 11:

Terjemahnya: ... sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. ...

Akhirnya, semoga kita mengakhiri tahun 2006 dengan baik dan berusaha lebih baik lagi di tahun 2007. Di tahun 2007, kita berharap umat beragama di Indonesia, demikian halnya umat Islam, dapat semakin memperkokoh peran agama dalam berbagai sektor kehidupan bangsa ini. Sejalan dengan itu, kita pun harus berupaya mewujudkan keharmonisan intern umat beragama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Semoga tercipta kedamaian dan kerukunan hidup, sehingga tidak ada lagi kekerasan dan konflik yang terjadi atas nama agama. Amin!

8. Bangsa Sehat, Terdidik, dan Sejahtera?

Beberapa pekan lagi 2006 akan berakhir. Dan, kita segera memasuki 2007. Ini berarti, bangsa Indonesia, sejak diproklamirkan 1945, telah berusia 61 tahun. Limit waktu 61 tahun adalah masa yang cukup panjang (jika bukan terlalu lama) bagi

sebuah kesempatan untuk mewujudkan impian menjadi sebuah bangsa sehat, terdidik dan sejahtera. Dengan kata lain, paska 61 tahun seyogianya kini, kita menjumpai Indonesia telah menjadi bangsa yang maju, makmur, mandiri dan sejahtera.

Sayangnya, waktu 61 tahun tampaknya belum cukup untuk mewujudkan impian tersebut. Menengok keberhasilan bangsa-bangsa lain, bangsa tetangga misalnya, terasa betapa kita tertinggal dalam banyak hal. Melihat kemajuan Malaysia, Singapura, Thailand dan Korea, kita wajar merasa iri melihat keberhasilan yang mereka capai. Pertanyaan yang tertinggal, ada apa dengan kita? Apa yang telah kita usahakan sepanjang waktu tersebut. Apakah kita telah melaksanakan pembangunan di atas landasan yang benar, dengan visi dan langkah-langkah yang tepat? Tentu, banyak pertanyaan yang muncul, setelah kini kita melihat visi menjadi bangsa yang maju tersebut belum terwujud.

Mewujudkan bangsa sehat, terdidik dan sejahtera masih tetap sebuah angan-angan yang entah kapan menjadi kenyataan. Repotnya, alih-alih seluruh komponen bangsa ini fokus untuk memperjuangkannya, yang marak terjadi justru adalah pertarungan perebutan kekuasaan yang efeknya merembes ke tingkat grass root. Repotnya pula, pertarungan dan perebutan kekuasaan tersebut rawan dan terbukti bisa menjadi pemicu konflik dan sekaligus menimbulkan malapetaka politik.

Para elit politik belum mampu menunjukkan "keteladanan politik". Politik telah ditelikung hanya sekadar intrik-intrik yang bermuara pada pemuasan syahwat kekuasaan belaka. Ujung-ujungnya, untuk kepentingan pribadi, golongan dan bukan untuk rakyat. Akrobat politik yang ironis, dengan aroma moral hazard alias aji mumpung adalah fenomena yang mudah dijumpai di arena politik semua lini dan

level. Hebatnya, dagelan itu dilakukan dengan senyum sumringah tanpa rasa bersalah apalagi penyesalan.

Para pemikir, pengambil kebijakan dan aktor ekonomi kita tak kalah kontroversialnya. Kita pun disuguhi hingga sekarang suatu fakta akan adanya geng-geng aliran politik ekonomi yang belum bisa menemukan dan merumuskan solusi atau resep yang tepat untuk menyembuhkan ekonomi kita yang sakit parah. Meski, masih ada suara-suara yang sayup-sayup terdengar perlunya ekonomi kerakyatan di tengah derasnya ekonomi kaum borjuis. Namun suara-suara itu pun kini tak terdengar lagi. Selanjutnya seolah tanpa beban tetap mencari pinjaman untuk melunasi utang. Di samping itu, ada kesan tambahan seolah prioritas penyelamatan hanya diperuntukkan bagi mereka para penguasa atau pengusaha kaya (karena pinjaman) yang bangkrut.

Fenomena *idem dito* juga masih terasa di lingkungan para penegak hukum. Mereka tampaknya pula masih susah melepaskan diri dari belitan gurita kebiasaan lama. Mereka memang mengusung tema-tema reformasi, profesionalisme, dan keberpihakan kepada rakyat. Tetapi, tuntutan rakyat masih lebih besar. Rakyat masih mengharapkan bukti-bukti keberpihakan kepada mereka secara lebih nyata. Rakyat berharap ada tokoh kuat dari dan di antara mereka yang mampu membawa gerbong keadilan dan keberpihakan kepada rakyat dalam waktu sedekat mungkin.

Repotnya, para ilmuwan dan penganjur moral juga mengalami kebingungan yang sama. Ada yang tinggal di menara gading dan sembari mendekap erat kitab suci. Ada yang dekat dengan kekuasaan, sehingga netralitasnya pun diragukan. Mereka bukannya sumber solusi. Para ilmuwan dan para penganjur moral, juga tanpa sadar, telah tertarik masuk ke dalam pusaran lingkaran setan masalah. Teori-teori dan dalil-dalil berubah menjadi mantra-mantra dan jampi-jampi.

Lengkap dan kompleks masalah bangsa ini. Janji-janji perbaikan dan peningkatan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan hanya menjadi candu bagi rakyat. Awalnya janji-janji elit penguasa memang membuai, terasa manis dan indah. Namun, rakyat bangsa ini masih terus menagih janji. Sebagian besar rakyat terus mengharap adanya perubahan yang lebih berarti bagi kehidupan mereka yang masih terus bergelayut dengan kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan dan ketidakberdayaan.

Sehat, terdidik dan sejahtera bagi bangsa yang besar ini masih merupakan tugas yang memerlukan dan terus dicari orang yang tepat untuk mewujudkannya. Sehat, sulit membayangkan seperti apa wujudnya bagi bangsa yang konon hingga sekarang belum memiliki sistem kesehatan nasional (SKN, kata seorang dokter). Tidak sulit dicari rakyat yang tidak tahu bagaimana berobat agar sembuh dari penyakit. Sehingga, tidak salah jika muncul ungkapan orang miskin dilarang berobat.

Bangsa terdidik pun sama sulitnya untuk diwujudkan. Apalagi dengan hiruk pikuk perdebatan sistem pendidikan nasional dan implementasi di lapangan yang masih jauh dari harapan. Bahkan, orang miskin pun dilarang sekolah karena ketidakmampuan membayar biaya sekolah, apalagi untuk memilih sekolah unggul. Ironisnya, media massa saban hari juga menyajikan tayangan-tayangan yang bukannya mendidik, tetapi justru sebaliknya punya andil dalam proses irrasional, membuat rakyat justru akrab dan percaya kepada soal-soal tahyul dan mistis.

Menjadi bangsa sejahtera juga demikian sama rumitnya, apalagi dengan utang yang menumpuk, tingginya angka pengangguran, kriminalitas, jumlah rakyat miskin yang banyak dan daya beli masyarakat yang rendah. Rakyat bangsa ini ibaratnya, "sudah jatuh tertimpa tangga pula". Mereka yang miskin dibelit lingkaran kesulitan.

Karena miskin, gizi tak terpenuhi. Gizi tak terpenuhi, selain potensial bodoh juga gampang sakit. Ujung-ujungnya mereka tetap tak bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Yang kaya yang berkuasa; yang berkuasa yang kaya, sebagaimana mudah terlihat di sekitar kita.

Bangsa diterpa berbagai bencana. Ada bencana alam yang tak terdeteksi lebih awal. Akibatnya, sangat fatal dengan korban berjatuhan yang tak ternilai harganya. Ada pula bencana alam, karena ulah sembrono yang mengakibatkan kerugian yang juga tak sedikit nilainya. Jadi, dimana kita bisa menemukan solusi, terapi dan resep untuk pemulihan bangsa ini dari berbagai penyakitnya? Jawabannya, tidak dimana-mana atau kemana-mana, bisa kita temukan dekat di dalam diri setiap manusia Indonesia. Jawabannya ditemukan ketika setiap kita mampu menjadi orang Indonesia sejati. Atau mungkin juga, seperti kata Reinald Kasali (Kompas, 4/12/06) ketika kita memiliki pemimpin petarung dengan spirit pelatih yang tidak hanya sekadar duduk di singgasananya.

BAGIAN KEDUA:
PENDIDIKAN DAN GENERASI MUDA



IAIN PALOPO

1. Profesor Malik Fadjar tentang Peran Strategis Pendidikan

Kapita Selekta Pendidikan, salah satu mata kuliah pilihan yang saya ambil pada program doktor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, diampuh Professor Malik Fadjar (Mendiknas) dan Professor Suwito (Pembantu Rektor IV). Sesuai dengan namanya, mata kuliah ini melingkupi masalah-masalah pendidikan dari yang filosofis-paradigmatis, historis-yuridis, dan normatif-akademik, sampai pada hal-hal teknis operasional. Tetapi yang luar biasa dari mata kuliah ini, selain karena kepakaran dan pengalaman para pengampunya, juga karena suasana kelas yang demokratis dan diskusi yang berlangsung dinamis, mengalir tanpa sungkan pada professor, yang kebetulan adalah para pejabat. Professor Malik Fadjar yang Mendiknas misalnya, bersikap biasa layaknya seorang pengajar. Kesan birokratis yang biasanya melekat pada seorang pejabat tidak tampak. Mereka tidak dilayani, justru melayani mahasiswa.

Dalam satu perkuliahan, Malik Fadjar mengemukakan pandangan-pandangannya mengenai peran strategis pendidikan. Merujuk pada John Dewey, dia mengemukakan empat hal, yaitu: pendidikan sebagai suatu kebutuhan hidup (*education as a necessity of life*), pendidikan sebagai suatu fungsi sosial (*education as a social function*), pendidikan sebagai suatu bimbingan (*education as a direction*), dan pendidikan sebagai suatu pertumbuhan (*education as a growth*). Sebelumnya dalam pengantar, dia mengemukakan perlunya pendidikan itu dikelola berdasarkan kenyataan riil dan mengacu tidak hanya pada kecerdasan (intelektual), tetapi juga pada moral (akhlaq) dan ideologi.

Pandangan-pandangan Malik Fadjar mengenai empat peran strategis pendidikan tersebut di atas dapat dikemukakan sebagai berikut: *pertama*, pendidikan sebagai suatu kebutuhan hidup.

Kebutuhan hidup di sini, tidak dalam arti sempit seperti dalam pandangan kaum sekular yang acuannya melulu pada kebutuhan praktis semata dan hal-hal yang materialistik. Tetapi, kebutuhan hidup dalam arti luas. Karenanya, pendidikan diharapkan memberikan kemampuan untuk merespons perubahan. Di sini letaknya, menurut Malik, Islam mewajibkan pendidikan seumur hidup (*life long education*). Dalam salah satu hadis Rasulullah saw. dinyatakan “Tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahat”.

Dalam konteks ini pula, Malik menekankan pentingnya hal yang bersifat sakral-transendental dalam pendidikan, soal-soal yang berkaitan dengan akidah, meski soal ini tidak gampang. Demikian pula, pembangunan fisik perlu, tetapi jangan sampai terjebak dalam bentuk fisik. Pendidikan harus diupayakan pada hal-hal yang lebih substansial. Malik mengingatkan, “Jangan sampai energi habis pada bangunan fisik, sementara substansi pendidikan tidak ditemukan”. Jadi lah, sekolah atau kampus sebagai “Cagar budaya” semata dan bukannya menjadi “Garda depan perubahan”. Di dalam hati, penulis berpikir, “Apalagi kalau bangunannya jelek karena dikerjakan seadanya dan anggarannya dikorupsi.” Bukan kah di era reformasi ini korupsi semakin menjadi-jadi dan sulit dikendalikan?

Kedua, pendidikan sebagai suatu fungsi sosial. Dalam hal ini, Malik cenderung pada pendidikan yang tidak mengisolasi anak didik dari lingkungan dan komunitasnya. Ini tidak berarti, kaum pendidik, orang tua, dan masyarakat harus lengah, tidak waspada dengan ancaman gaya hidup kebarat-baratan, masyarakat serba boleh (*permissive society*), dan patologi sosial. Hanya saja bagi Malik, diperlukan kecerdasan menghadapi kondisi zaman yang memang mengkhawatirkan moral dan masa depan anak.

Makin kompleks suatu komunitas, makin kompleks pula fungsi sosial yang berlangsung di dalamnya. Pendidikan diharapkan

memberikan kemampuan untuk beradaptasi dan mengkritisi dinamika perkembangan suatu komunitas. Untuk itu, pemberian *life skill* (keterampilan hidup) dalam proses pendidikan amat diperlukan. Keterampilan hidup di sini tidak dalam pengertian sederhana berupa, misalnya, jahit-menjahit dan semacamnya. Akan tetapi, keterampilan hidup dalam arti luas, yakni kemampuan memerankan fungsi sosial dalam kehidupan.

Ketiga, pendidikan sebagai bimbingan. Pertanyaan mendasar yang dikemukakan Malik, “Bisakah pendidikan menjadi pandu masa depan?”. Memandu ke depan bukan ke belakang (*tempo doeloe*). Sejarah masa lalu memang penting menjadi *ibrah* (pelajaran). Bisa pula menjadi bandingan untuk masa sekarang. Tetapi, anak-anak dewasa ini tidak perlu mengalami kesukaran-kesukarannya. Kesulitan dan kesukaran yang dialami para orang tua, merupakan hal biasa karena kondisi zamannya memang demikian. Untuk masa sekarang, pendidikan harus ditarik ke masa depan.

Keempat, pendidikan sebagai pertumbuhan. Pendidikan, urai Malik, harusnya memacu pertumbuhan. Memacu pertumbuhan peradaban, kualitas hidup, pemikiran, dan sebagainya. Dalam pada itu, makin terdidik seseorang, makin kuat pertahanannya. Masalahnya, seringkali kita kalah cepat dari perubahan yang terjadi. Akibatnya, respons-respons yang kita berikan sudah kadaluwarsa. Belum lagi kalau yang bisa kita kerjakan hanya menoleh ke belakang.

Respons yang kita berikan terhadap perubahan yang cepat itu, juga harus cerdas. Masalahnya pula, kebanyakan kita susah diajak selalu memulai. Setelah selesai satu tahapan, kerjakan lagi tahapan-tahapan yang lain. Empat pandangan mendasar pendidikan, sebagaimana dikemukakan di atas, menurut Malik, dalam pandangan Islam telah menjadi semacam keyakinan. Masalahnya, bagaimana aktualisasinya secara kontekstual.

Betapapun bagi penulis, menghadapi tantangan perubahan zaman yang demikian cepat, para pendidik diharapkan dapat memainkan peran transformatif. Keempat peran strategis pendidikan tersebut di atas harus mewarnai proses pendidikan yang berlangsung dan sekaligus menjadi ruhnya. Lagi-lagi persoalannya siapkah para pendidik kita? Belum lagi kita dihadapkan pada persoalan pengelolaan pendidikan yang tidak jarang dikelola secara lebih politis ketimbang profesional dan akademis. Institusi dan lembaga pendidikan dikelola layaknya milik sendiri dan keluarga, tidak mengacu pada standar kepatutan, baik dari segi manajemen, administrasi maupun etika kepemimpinan dan *human relations* (hubungan manusiawi).

2. Kontraversi Sekitar RUU Sisdiknas 2003 (Telaah atas Pendidikan Agama)

Pendidikan adalah hal yang sangat mendasar dan teramat penting bagi perkembangan dan kemajuan sebuah bangsa. Karena, salah satu tolok ukur untuk menilai tingkat kemajuan suatu bangsa adalah dilihat dari maju tidaknya pendidikan bangsa itu. Menyadari hal ini, berbagai bangsa di dunia, termasuk bangsa Indonesia selalu mengupayakan peningkatan kualitas pendidikannya. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk itu, salah satu di antaranya dengan mereformasi aturan perundangan yang terkait dengan sistem pendidikan.

Secara sederhana, reformasi dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk menata kembali berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan sebagainya, yang dilandasi oleh nilai-nilai yang lebih demokratis, terbuka, transparan, manusiawi, berkeadilan dan dapat dipertanggungjawabkan. Era reformasi terjadi karena adanya kenyataan bahwa berbagai sistem politik, ekonomi,

sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya tidak lagi berpihak pada rakyat dan dipandang tidak lagi mampu mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, makmur dan sejahtera. Keadaan ini terjadi akibat adanya pendekatan yang sentralistik pada seluruh aspek kehidupan tersebut. Pendekatan sentralistik mengakibatkan terjadinya akumulasi kekuasaan pada pusat yang mematikan kreativitas masyarakat. Kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Terkait dengan pendidikan di Indonesia, reformasi yang tengah diupayakan saat ini adalah revisi dan penyempurnaan Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Paling tidak ada empat alasan utama mengapa diperlukan adanya reformasi pendidikan dengan cara menyusun Undang-Undang pendidikan nasional yang baru. Keempat alasan tersebut adalah:

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dirasakan belum sepenuhnya menunjukkan keberpihakan pada prinsip-prinsip pendidikan seumur hidup, pendidikan untuk semua, dan sistem pendidikan yang terbuka, sehingga tidak mampu menjawab tantangan perubahan struktur ekonomi, pertumbuhan, dan sebaran penduduk, perkembangan teknologi informasi, dan komunikasi dalam era global yang berubah cepat.
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional belum memandang pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa sehingga tidak mampu berkontribusi secara optimal sebagai sektor yang memimpin dalam upaya pembentukan masyarakat Indonesia baru.
3. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional disusun berdasarkan prinsip manajemen pendidikan yang sentralistik sehingga tidak sesuai dengan prinsip otonomi pendidikan sebagai implikasi dari pelaksanaan Undang-Undang No. 22 tahun 1999

tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

4. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih menitikberatkan pada penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah sehingga terkesan mengabaikan peran pendidikan berbasis masyarakat sebagai komponen yang penting dari sistem pendidikan nasional.

Bersamaan dengan proses penyusunan RUU Sisdiknas masyarakat memberikan tanggapan. Di antara tanggapan tersebut dikemukakan bahwa RUU Sisdiknas tidak aspiratif, RUU kurang berbobot, tidak demokratis, bias kepada masyarakat tertentu; serta etatisme pemerintah dianggap telah mencampuri urusan keluarga yang mempunyai hak atas penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keluarga.

Masalah lain yang menarik minat masyarakat dan menimbulkan kontroversi berkenaan dengan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 tersebut, antara lain pada posisi pendidikan agama dan implementasinya. Terutama pada pasal 12 ayat (1) butir a (usul inisiatif DPR) atau Pasal 13 ayat (1) butir a (tanggapan pemerintah) yang berbunyi: *“Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”*. Pasal ini menyulut kontroversi dan penolakan beberapa kelompok di sejumlah daerah. Alasan penolakan mereka dapat dikemukakan sebagai berikut: bahwa pendidikan agama adalah kewenangan keluarga dan pemerintah tidak perlu mengaturnya; terlalu kental nuansa keagamaannya padahal Indonesia bukanlah negara agama; dan tidak menghargai pluralisme dan demokrasi serta diskriminatif.

Dalam konteks berdemokrasi, berbagai tanggapan dan bahkan penolakan dari sejumlah kalangan masyarakat adalah hal yang wajar,

sah-sah saja dan malah diperlukan. Tak kurang pentingnya, pro dan kontra dalam masyarakat yang majemuk yang dibangun di atas kesadaran berdemokrasi diperlukan untuk membangun kesepahaman, sehingga kecurigaan dan bibit konflik yang destruktif dapat dihilangkan.

Bagi kalangan yang mendukung RUU Sisdiknas, menilai RUU Sisdiknas secara umum, sudah mewakili perumusan paradigma baru pendidikan nasional yang reformis, sejalan dengan otonomisasi dan memberikan penekanan kuat pada akuntabilitas serta jaminan mutu yang lebih besar. Penyusunan RUU Sisdiknas itu sendiri dimaksudkan untuk menindaklanjuti amanah UUD 1945. Kelemahannya, RUU Sisdiknas kurang visioner dan aplikatif terhadap kecenderungan-kecenderungan global.

Selain itu, RUU Sisdiknas yang baru juga merepresentasikan niat baik pemerintah dan DPR untuk mengupayakan aturan perundangan yang sejalan dengan reformasi sistem pendidikan nasional. Pengaturan yang terkait dengan persoalan pendidikan agama dan keagamaan tidaklah dimaksudkan untuk mengeliminir prinsip-prinsip pluralisme dan demokrasi serta Hak Asasi Manusia. Apalagi untuk menonjolkan eksklusivitas umat atau kelompok tertentu. Keterlibatan pemerintah lebih merupakan upaya untuk mengembalikan peran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Persoalan kontraversi pendidikan agama yang timbul karena Pasal 13 (1 a) atau Pasal 12 (1 a) tersebut lebih terkait dengan soal penyelenggaraan pendidikan agama tertentu di suatu lembaga yang memiliki visi yang berbeda dari agama yang dianut peserta didik. Sebagai contoh, keberatan lembaga pendidikan komunitas agama tertentu, jika terdapat guru agama yang mengajarkan agama kepada murid yang menganut agama yang berbeda dari agama yang dianut

milik lembaga pendidikan tersebut. Keberatan ini dapat dipahami, sebab dengan begitu, pasal ini memberikan tugas baru bagi lembaga untuk melayani hak beragama peserta didik.

Sementara itu, komunitas yang menyetujui pasal tersebut berdasarkan alasan-alasan, antara lain : *pertama*, pemberian pendidikan agama oleh guru yang seagama adalah dalam rangka memberikan pengakuan dan perlakuan yang wajar terhadap hak keberagaman seseorang; *kedua*, sebagai pelaksanaan demokratisasi beragama; *ketiga*, berdasar pada pandangan bahwa agama adalah bukan hanya sekadar untuk diajarkan melainkan untuk diamalkan; *keempat*, pendidikan agama yang diberikan harus menjadi pandangan dan pola hidup yang menggerakkan aktivitas seseorang. Oleh karenanya, harus dijamin ketepatan pemahaman, yang seyogianya diperoleh dari guru yang seagama.

Last but not least, dari kontroversi yang ada di sekitar RUU Sisdiknas ini adalah bagaimana membuat rumusan yang sebaik-baiknya. Persoalan pendidikan agama yang menimbulkan kontroversi harus disikapi secara rasional, jujur, dan mengedepankan sikap inklusivitas demi kepentingan semua pihak. Selain itu, bagaimana “*beyond the text*”? Bukankah ada adagium dalam hukum “lebih baik aturan yang jelek dengan penegak hukum yang baik daripada aturan yang baik dengan penegak hukum yang jelek”?. Dengan begitu, tak kurang pentingnya adalah bagaimana aturan itu nantinya diaplikasikan, sehingga sejalan dengan reformasi dan memenuhi harapan masyarakat untuk Indonesia baru.

3. Kurikulum Berbasis Kompetensi: Catatan Awal

Krisis multidimensional yang melanda Indonesia semakin memperkuat keinginan dan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Berbagai kalangan menyadari pentingnya mereformasi pendidikan di Indonesia, sejalan dengan reformasi bidang-bidang lainnya. Sayangnya, meski agenda reformasi terus digulirkan, tetapi belum berlangsung secara menyeluruh dan belum sepenuhnya dilaksanakan secara sungguh-sungguh.

Perlu disadari, kekuatan reformasi yang hakiki bersumber dari sumber daya manusia berkualitas, serta memiliki visi, transparansi, dan pandangan jauh ke depan; yang tidak hanya mementingkan diri dan kelompoknya, tetapi senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Rendahnya sumber daya manusia menuntut dilakukannya reformasi di bidang pendidikan.

Pendidikan nasional dewasa ini, menurut Tilaar, sedang dihadapkan pada empat krisis pokok yang berkaitan dengan kuantitas, relevansi (efisiensi eksternal), elitisme, dan manajemen. Selain itu, sekurangnya ada tujuh masalah pokok sistem pendidikan nasional, yaitu : (1) menurunnya akhlak dan moral peserta didik, (2) pemerataan kesempatan belajar, (3) masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan, (5) status kelembagaan, (6) manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan pembangunan nasional, dan (7) sumber daya yang belum profesional.

Menghadapi hal tersebut, perlu dilakukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Untuk itu perubahan sosial hendaknya memberi arah bahwa pendidikan merupakan hal dasar dalam proses perubahan tersebut. Pendidikan adalah kehidupan, untuk itu kegiatan belajar

harus dapat membekali peserta didik dengan kecakapan hidup (*life skill*). Dalam kaitan ini, ada dua prinsip pendidikan yang perlu direalisasikan, yaitu: *pertama*, pendidikan harus diletakkan pada empat pilar, yakni belajar mengetahui (*learning to know*), belajar melakukan (*learning to do*), belajar hidup dalam kebersamaan (*learning to live together*), dan belajar menjadi diri sendiri (*learning to be*); *kedua*, belajar seumur hidup (*life long education*).

Salah satu perubahan mendasar yang dipandang perlu dilakukan untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia, adalah perubahan yang berkaitan dengan kurikulum. Dalam hal ini, berbagai pihak menganalisis dan melihat perlunya diterapkan kurikulum berbasis kompetensi (*competency based curriculum*), yang dapat membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan yang sesuai dengan tuntutan zaman dan reformasi guna menjawab tantangan arus globalisasi, berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan kesejahteraan sosial, lentur, dan adaptif terhadap berbagai perubahan.

Dalam pendidikan dikenal ada dua jenis standar, yaitu standar akademik dan standar kompetensi. Standar akademik merefleksikan pengetahuan dan ketrampilan esensial setiap disiplin ilmu yang harus dipelajari oleh peserta didik. Standar kompetensi ditunjukkan dalam bentuk proses atau hasil kegiatan yang didemonstrasikan oleh peserta didik sebagai penerapan dari pengetahuan dan ketrampilan yang telah dipelajarinya. Dengan demikian, standar akademik bisa sama untuk seluruh peserta didik, tetapi standar kompetensi bisa berbeda.

Kurikulum berbasis kompetensi adalah salah satu bentuk pendekatan dalam mengembangkan kurikulum. Pendekatan ini mempunyai beberapa keunggulan dibanding pendekatan lainnya, di antaranya: *pertama*, pendekatan ini bersifat kontekstual, karena berangkat, berfokus, dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk

mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan potensinya masing-masing. *Kedua*, kurikulum berbasis kompetensi dapat menjadi dasar pengembangan kemampuan-kemampuan lain. *Ketiga*, ada bidang studi tertentu yang dalam pengembangannya lebih tepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan ketrampilan.

Kompetensi merupakan perpaduan antara pengetahuan, ketrampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Mc Ashan mengemukakan, kompetensi adalah pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Adapun Gardon menjelaskan beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi, yaitu: pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*understanding*), kemampuan (*skill*), nilai (*value*), sikap (*attitude*), dan minat (*interest*).

Berdasarkan pengertian kompetensi di atas, kurikulum berbasis kompetensi dapat diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Kurikulum berbasis kompetensi diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab.

Tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, yaitu penetapan kompetensi yang akan dicapai, pengembangan strategi untuk mencapai kompetensi, dan evaluasi. Kompetensi yang ingin dicapai merupakan pernyataan tujuan yang hendak diperoleh peserta didik, menggambarkan hasil belajar

pada aspek pengetahuan, ketrampilan, nilai, dan sikap. Strategi mencapai kompetensi adalah upaya membantu peserta didik dalam menguasai kompetensi yang ditetapkan. Sedangkan evaluasi merupakan kegiatan penilaian terhadap pencapaian kompetensi bagi setiap peserta didik.

Implementasi kurikulum berbasis kompetensi sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan, tentu saja tidak dapat dipandang sebagai resep untuk memecahkan berbagai masalah pendidikan, sebab faktor-faktor lainnya, seperti perencanaan, pelaksanaan, guru, pembiayaan, dan kebijakan pendidikan nasional turut menentukan. Meski demikian, kehadiran kurikulum berbasis kompetensi diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap perbaikan pendidikan. Semoga.

4. Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep dan Implementasinya

Secara amat jelas, Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sayangnya, tujuan negara tersebut dalam implementasi dan aktualisasinya baru sebatas cita-cita. Tanpa bermaksud memungkirkan apa yang selama ini bisa dicapai, langsung atau tidak capaian pendidikan menimbulkan kesangsian akan signifikansinya dihubungkan dengan realita situasi dan kondisi negara dan bangsa akhir-akhir ini. Enam dasawarsa adalah waktu cukup panjang untuk prihatin dengan kualitas pendidikan kita. Betapa tidak, menurut data UNESCO tahun 2000 tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (*Human Development Index*), di antara 174 negara di dunia, Indonesia berada pada urutan ke 102 pada tahun 1996, ke 99 pada tahun 1997, ke 105 pada tahun 1999, dan menurun ke urutan 112 pada tahun 2000. Sedang menurut survei *Political and Economic Risk*

Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke 12 dari 12 negara di Asia. “*What is wrong with our country?*” Apa yang salah dengan negara kita?, kira-kira begitulah pertanyaan yang patut ditemukan jawabannya.

Kualitas pendidikan terkait dengan banyak faktor, tidak hanya berkaitan dengan sistem perundang-undangan, tetapi juga terkait dengan faktor situasi sosial politik, pendanaan, kualitas guru, dan tak kurang pentingnya adalah kebijakan mengenai model kurikulum hingga kebijakan sistem pendidikan nasional. Pengalaman negara-negara lain dalam mengelola pendidikannya, dan bahkan pengalaman kita sendiri telah menunjukkan betapa pentingnya faktor-faktor ini disinergikan. Suatu hal yang mustahil bisa dicapai jika upaya memperbaiki kualitas pendidikan, hanya dilakukan secara parsial, sebagian saja. Bertitik tolak dari keyakinan ini, pembahasan tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan kaitannya dengan kualitas pendidikan nasional tidak bermaksud menyatakan KBK adalah satu-satunya faktor kunci perbaikan kualitas pendidikan nasional. Dengan kata lain, KBK hanyalah salah satu bentuk pengembangan atau pembaharuan kurikulum yang sesuai fungsinya bukanlah *panacea* (obat mujarab) yang mampu menyelesaikan seluruh persoalan pendidikan.

Bergulirnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah membawa perubahan terhadap sektor pendidikan. Perubahan yang diharapkan tentunya bukanlah semata-mata perubahan dari segi kewenangan, dari pusat diotonomisasikan ke daerah yang justru bisa menjadi birokrasi baru yang membelenggu pengelolaan pendidikan. Karena itu, kebijakan cukup cerdas dan kini telah bergulir di daerah-daerah dalam rangka implementasi otonomi dalam pengelolaan pendidikan, yakni menugaskan pemerintah daerah untuk memfasilitasi program perluasan serta pengembangan dan peningkatan kualitas

pendidikan. Sementara berbagai kebijakan akademisnya, baik dimensi pengembangan kurikulum maupun pengelolaan berbagai aspek operasional pendidikan menjadi tugas setiap unit sekolah.

Tahun 2004 dicanangkan sebagai tahun penerapan KBK, sebagai satu kebijakan yang pada hakikatnya merupakan penguatan terhadap kebijakan kurikulum sebelumnya yang berbasis tujuan dan juga sekaligus menekankan pentingnya pencapaian kompetensi-kompetensi ketimbang mengejar target penyampaian materi ajar. Karena itu, dalam kerangka KBK, otoritas penyusunan kurikulum diberikan seluas-luasnya pada sekolah melalui para gurunya, dengan mengacu pada kompetensi standar yang telah disusun oleh pemerintah melalui departemen pendidikan nasional. Otorisasi tersebut diberikan kepada pemerintah dengan pertimbangan masih perlunya rekayasa perubahan dan kemajuan dari pemerintah melalui pembinaan sumber daya manusianya lewat jalur pendidikan. Akan tetapi, otoritas pemerintah juga amat terbatas untuk mempertimbangkan berbagai variabel yang mempengaruhi kualitas proses dan hasil belajar. Oleh sebab itu, otoritas penyusunan silabus dari kompetensi standar sepenuhnya diserahkan pada sekolah, bahkan para guru boleh menambah materi pelajaran jika diperlukan dan penambahan keunggulan untuk penguatan *benchmark* (keunggulan khusus) sekolahnya.

Dalam konsep KBK, kurikulum disusun berdasarkan kemampuan dasar minimal yang harus dikuasai peserta didik setelah menyelesaikan satu unit pelajaran, satu satuan waktu, dan atau satu satuan pendidikan tertentu. Seorang peserta didik belum dapat melanjutkan pelajarannya ke unit atau satuan pendidikan berikutnya sebelum ia menguasai unit dan atau satuan pendidikan sebelumnya KBK ditujukan agar dapat menjamin tercapainya standar kualitas keluaran institusi pendidikan tertentu. Melalui cara ini satu langkah

dari upaya *Total Quality Management (TQM)* dalam pendidikan telah dicoba untuk diterapkan. *TQM* itu sendiri selalu dikaitkan dengan William Edward Deming, salah seorang yang telah berhasil membuat revolusi dalam pengembangan berbagai industri di Jepang. Melalui teori *TQM* ditekankan perbaikan-perbaikan yang tidak pernah berhenti, dan setiap apa yang dikerjakan selalu diawali dengan perencanaan, dan perencanaan tersebut diilhami dengan hasil yang telah dicapai sebelumnya, sehingga ada perbaikan-perbaikan untuk implementasi rencana berikutnya.

Penerapan KBK dilakukan seiring dengan diterapkannya pula *School Based Management* atau Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sebagai kegiatan afirmatif terhadap UU Nomor 22 tahun 1999 yang mengotonomisasikan sektor pendidikan pada daerah. Akan tetapi, setelah sampai pada daerah kabupaten atau kota, kewenangan tersebut menjadi wacana, apakah akan memberi kewenangan terbesar pada sekolah atau daerah akan menjadi substitusi pemerintah pusat, dan menjadi penguasa sektor pendidikan secara sentralistik di daerah. Tampaknya, pemerintah mendorong otonomi itu untuk diimplementasikan pada tingkat sekolah. Pada intinya, MBS memberi otonomi yang sangat luas pada sekolah untuk membuat perencanaan, *budgeting*, dan implementasi berbagai programnya, dengan memberdayakan unsur-unsur yang terlibat di sekolah tersebut, yakni kepala sekolah, guru, karyawan, orangtua siswa, siswa, dan bahkan masyarakat yang mendukung pengembangan sekolah tersebut. Dengan demikian, dalam konteks perencanaan serta pengembangan sekolah, titik sentral berada di sekolah itu sendiri dan semaksimal mungkin mengembangkan *networking horizontal* dengan *stakeholder* (pemrakarsa) dan *school community* (komunitas sekolah) yang peduli.

Implementasi sebuah kurikulum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan atau melaksanakan kurikulum

dalam arti rencana tertulis ke dalam bentuk nyata di kelas, yaitu terjadinya proses transmisi dan transformasi segenap pengalaman belajar kepada peserta didik. Dengan makna demikian, implementasi kurikulum memiliki posisi yang sangat menentukan bagi keberhasilan kurikulum sebagai rencana tertulis. Begitu pentingnya posisi kegiatan implementasi bagi terwujud atau tidaknya sebuah kurikulum, sehingga sangatlah tepat manakala persoalan implementasi kurikulum merupakan persoalan esensial di kalangan pengembang dan pelaksana kurikulum. Terlebih jika sistem persekolahan lebih menekankan dimensi proses daripada hasil belajar. Memang masih memungkinkan dijumpai sejumlah persoalan, terutama mengenai kualitas tenaga pendidik dan model pembelajaran seperti apa yang cocok dengan karakteristik KBK. Namun demikian, yang paling penting adalah seberapa jauh peserta didik dapat difasilitasi untuk memperoleh pengalaman belajar yang mencerminkan penguasaan atas suatu kompetensi yang dituntut kurikulum.

Dengan adanya KBK, para tenaga pendidik mendapat tugas baru yang boleh dikatakan tidak ringan. Selain karena semangat KBK yang memang menuntut penyesuaian kinerja bagi para guru, juga karena dinamika tantangan zaman yang kini semakin kompetitif. Ironisnya, dalam kondisi seperti ini, para guru masih harus menghadapi persoalan yang berkaitan dengan kesejahteraan hidup mereka. Akibatnya, terasa bagi para guru adalah tugas semakin berat tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan mereka. Kiranya, bukan saatnya lagi menyebut para guru sebagai sekadar “pahlawan tanpa tanda jasa”. Jasa mereka harus mendapatkan imbalan yang proporsional. Meski demikian, penting juga bagi para guru untuk selalu membangun komitmen dan kesadaran bahwa keberhasilan pendidikan amat bergantung pada keikhlasan mereka. Dan tak kurang

pentingnya, adalah apakah mereka dapat menjadi inspirasi bagi para peserta didik.

5. Palopo sebagai Kota Pendidikan

Mimpi ataupun harapan Palopo menjadi kota pendidikan merupakan sebuah tantangan besar untuk mewujudkannya, terlebih lagi di era global sekarang ini. Karenanya, kecepatan dan ketepatan dalam menetapkan visi pendidikan bagi Kota Palopo sangat menentukan tercapainya harapan itu. Mengacu pada prinsip “Survival of the fastest”, maka berlambat-lambat dalam menentukan visi bersama hanya akan meninggalkan harapan yang tak pernah kesampaian. Dan, jika mimpi ia benar-benar mimpi yang sekadar mimpi, mimpi dalam tidur yang tidak menjadi kenyataan.

Setiap orang pasti pernah bermimpi, paling tidak mengetahui yang dimaksud mimpi ataupun sekadar mendengar. Juga, setiap orang punya sesuatu yang diimpikan atau dicita-citakan. Hebatnya, seperti dikemukakan Marwah Daud (2003), “Tidak ada yang terjadi kecuali pada awalnya sebuah mimpi”. Sehingga, impian juga lah awalnya yang dimiliki J. F. Kennedy ketika dia mengatakan pendidikan Amerika harus dipacu terutama di bidang sains untuk memburu keteringgalan pendidikan dari Uni Soviet yang telah berhasil melontarkan Sputnik ke luar angkasa. Dengan impian itu, Amerika berhasil mendaratkan manusia di bulan. Dengan impian juga lah awalnya yang dimiliki F. D. Rosevelt untuk membuat semua orang Amerika bisa bekerja. Dengan impian itu, dia mampu membantu Amerika keluar dari resesi berkepanjangan.

Mimpi juga lah, kiranya membuat seorang J. M. Figueres Olsen (Kompas, 2004), Presiden Costa Rica, mampu mengubah negaranya dari *banana republic* (republik pisang yang hidup dari menanam dan

menjual pisang) menjadi negara *high tech* (berteknologi tinggi). Di tangan Figueres, Costa Rica yang dulunya sangat terkebelakang kemudian memiliki tanda-tanda menjadi negara modern dengan dimulainya produksi elektronik, berbagai alat kedokteran dan alat komunikasi. Lebih hebat lagi, menurut J. E. Wawa (2004), Costa Rica menjadi pemasok semikonduktor terpenting untuk Amerika dan mulai menghasilkan piranti lunak.

Mimpi-mimpi para pemimpin dunia yang kemudian menjadi kenyataan, tidak ada salahnya menginspirasi kita untuk juga bermimpi mengenai suatu hal. Mimpi, misalnya suatu waktu di masa yang tidak terlalu jauh, Palopo bisa menjadi sebuah kota pendidikan. Tetapi masalahnya, seberapa jelas mimpi kita tentang hal itu. Dalam arti bagaimana wujud Palopo yang diimpikan sebagai kota pendidikan?

Menarik untuk dikemukakan, Marwah Daud (2004) punya mimpi mengenai pendidikan. Dia memimpikan para pejabat ketika menyusun program dan melaporkan hasil kerja tidak lebih sibuk menyampaikan berapa gedung kantor dinas atau rumah jabatan yang akan atau baru dibangun, atau berapa mobil dinas yang baru dibeli untuk para pejabat legislatif dan eksekutif. Tetapi, para pejabat di awal penyiapan pemilihan dan pengangkatannya sibuk mendata dan memetakan potensi unggulan wilayah, baik unggulan SDM, SDA, maupun SDP. Dari sini kemudian dirancang berapa anak usia sekolah yang harus disekolahkan, berapa tenaga kerja termasuk para sarjana yang masih menganggur, berapa lahan yang masih tidur dan harus diolah. Berapa banyak tabungan rakyat yang sudah diserap bank-bank, berapa yang tersedot ke kantor pusat dan berapa yang dire-investasi ke daerah untuk program pendidikan dan kesempatan kerja.

Untuk waktu lima sampai duapuluh tahun ke depan, setiap RW, kelurahan, dan dusun memiliki TK, Taman Bermain dan TPA, sehingga setiap anak usia pra-sekolah dapat akses mengikuti

pendidikan pra-sekolah berkualitas. Setiap desa harus memiliki SD berkualitas. Setiap kecamatan harus memiliki sekolah setingkat SMP dan SMA yang belajar sepenuh hari atau diasramakan. Setiap kabupaten memiliki akademi yang mengajarkan, melatih bahkan melakukan proses unggulan lokal mereka. Setiap provinsi memiliki universitas tidak hanya menghasilkan sarjana bertoga, tapi juga secara terus menerus melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia), SDA (Sumber Daya Alam), dan SDP (Sumber Daya Pendukung) di wilayahnya.

Dalam waktu lima tahun sampai duapuluh tahun ke depan, demikian Marwah, setiap kelas memiliki guru dengan kualitas baik dan mendapatkan penghasilan yang baik. Setiap sekolah memiliki perpustakaan, tempat bermain/olahraga, tempat berkreasi di bidang seni, dan memiliki dukungan alat dan teknologi belajar yang mutakhir. Setiap tamatan sekolah menengah dan alumni perguruan tinggi memiliki sikap, karakter, prilaku terpuji serta dapat bekerja, berusaha atau menghasilkan karya dan inovasi terbaiknya untuk bangsa dan mampu bersaing secara internasional.

Mimpi seorang Marwah tentang pendidikan di atas dapat menjadi satu pemikiran untuk merancang Kota Palopo sebagai kota pendidikan. Reformasi yang banyak digagas di segala bidang, memberi kesempatan luas bagi daerah dan kota di Indonesia untuk berkreasi sesuai dengan potensi daerah yang dimilikinya. Apalagi berkenaan dengan pendidikan, secara mendasar, telah diamanatkan oleh UUD 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945, misalnya secara tegas dinyatakan bahwa negara mempunyai tanggung jawab “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999, daerah dan kota diberi otonomi termasuk dalam bidang yang berkaitan dengan pendidikan. Dengan dasar ini, setiap daerah berkewajiban dan

sekaligus mendapatkan kesempatan menyelenggarakan pendidikan yang baik bagi warganya.

Palopo yang sebelumnya adalah ibukota Kabupaten Luwu, kini telah menjadi kota otonom. Luwu yang semula hanya terdiri dari satu kabupaten, kini (2004) telah berubah menjadi empat kabupaten/kota, yaitu Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Luwu. Bila berhasil, jika suatu waktu Luwu menjadi Provinsi, maka Palopo kemungkinannya akan menjadi ibukota provinsi. Karena rancangan Palopo sebagai kota pendidikan sejalan dan mendukung perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pembentukan provinsi. Apalagi memang konsentrasi pengembangan SDM selama ini berpusat di Kota Palopo. Palopo menjadi tempat yang dituju oleh masyarakat dari seluruh penjuru wilayah Luwu untuk melanjutkan pendidikan dan menimba ilmu pengetahuan dan keterampilan. Bahkan, juga menjadi kota tujuan pendidikan dari wilayah (provinsi dan kabupaten) yang berbatasan.

Cikal bakal untuk pengembangan pendidikan di Kota Palopo telah ada dalam berbagai jenis dan tingkat pendidikan. Di Kota Palopo telah terdapat cukup banyak Taman Kanak-Kanak baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta dan organisasi kemasyarakatan. Demikian halnya juga telah terdapat sekolah dasar/MI, SLTP/MTs, SMU/MA/SMK, pesantren dan bahkan perguruan tinggi. Selain itu, di Kota Palopo juga tumbuh subur, sejalan dengan minat masyarakat, kursus-kursus berbagai macam keterampilan dan penyelenggaraan pendidikan setingkat Diploma I (satu). Selain itu, antusiasme dan minat masyarakat Kota Palopo yang tinggi terhadap pendidikan merupakan modal dasar tersendiri.

Lalu seperti apa mimpi tentang Palopo sebagai kota pendidikan? Mari kita menjawabnya bersama-sama, tetapi bagi saya untuk mewujudkan itu, *pertama-tama* adanya kesempatan bagi semua

warga usia sekolah mengikuti pendidikan. Dengan begitu, tidak dijumpai lagi anak usia sekolah menggunakan waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar berkeliaran di jalan-jalan menjajakan dagangan karena ketiadaan biaya sekolah. Demikian pula, ada kegiatan pembimbingan ataupun pendampingan untuk mengarahkan anak “tidak lanjut” sekolah untuk menekuni jenis keterampilan tertentu. Sehingga, kesempatan belajar itu tidak hanya dimiliki oleh mereka yang kebetulan secara struktural memiliki kemampuan.

Kedua, keterlibatan dengan intensitas yang tinggi para pengelola dan penyelenggara dalam memikirkan dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengembangan serta peningkatan kualitasnya. Tercermin pada semangat yang tinggi, keseriusan, dan kedisiplinan, profesionalisme serta tanggung jawab dan keteladanan. Hal ini bisa berlangsung jika para guru, misalnya tidak dibebani lagi dengan tetek bengek persoalan kebutuhan primernya. Bahkan, mereka menikmati fasilitas yang setara dengan profesi lainnya. Jika perbaikan gaji tidak dapat dilakukan, maka langkah awal yang bisa dilakukan adalah pemberian insentif selain penghasilan tetapnya. Konsekuensinya, bagi mereka yang tidak becus melaksanakan tugasnya mendapatkan sanksi yang sepadan.

Ketiga, gairah dan semangat belajar serta semangat kompetisi dari kalangan pelajar yang terus meningkat. Kondisi mana didorong oleh lingkungan belajar yang kondusif, tersedianya fasilitas belajar mengajar yang memadai dan penyelenggaraan proses belajar yang menyenangkan. Terbayang para pelajar yang setiap waktu berkuat dengan pelajaran, penelitian, dan kegiatan keterampilan. Tentu ada pula waktu bagi mereka untuk mengembangkan bakat, seni, dan olahraga yang mereka minati. Di samping itu, ada program yang berkaitan dengan peningkatan kecerdasan spiritualnya. Sehingga

mereka memiliki kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial.

Terakhir, *keempat*, keseriusan banyak pihak termasuk eksekutif dan legislatif dalam mendukung hal-hal yang telah disebutkan di atas tercermin pada keputusan dan kebijakan yang mereka tetapkan. Hal realistis, seperti dilakukan di banyak negara, misalnya kebijakan pemerintah dan dukungan alokasi dana pendidikan yang sangat signifikan bagi peningkatan kemajuan pendidikan mendapat perhatian secara terus menerus. Kemudian secara sistematis, kalau perlu ada mobilisasi untuk meningkatkan kemampuan profesional tenaga pendidik. Sehingga dalam kurun waktu tertentu tenaga pendidik yang andal untuk mendukung kota pendidikan tersedia. Demikian pula, ada masukan setiap saat dari Dewan Pendidikan, organisasi profesi guru ataupun lembaga terkait. Kerjasama berbagai pihak ini amat diperlukan karena penanganan pendidikan bukan pekerjaan mudah dan seharusnya menjadi tanggung jawab bersama.

Mimpi ataupun harapan Palopo menjadi kota pendidikan merupakan sebuah tantangan besar untuk mewujudkannya terlebih lagi di era global sekarang ini. Karenanya, kecepatan dan ketepatan dalam menetapkan visi pendidikan bagi Kota Palopo sangat menentukan tercapainya harapan itu. Mengacu pada prinsip “Survival of the fastest”, maka berlambat-lambat dalam menentukan visi bersama hanya akan meninggalkan harapan yang tak pernah kesampaian. Dan jika mimpi, ia benar-benar mimpi yang sekadar mimpi, mimpi dalam tidur yang tidak menjadi kenyataan.

6. Kontribusi dan Tantangan STAIN Palopo bagi Pembangunan Daerah di Luwu

Tulisan ini berangkat dari keinginan untuk mengevaluasi eksistensi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo sebagai salah satu perguruan tinggi yang mengemban tugas membangun sumber daya manusia untuk pembangunan. Sebagai aset nasional dan sekaligus lokal, khususnya bagi daerah Luwu (Palopo, Luwu, Luwu Utara & Luwu Timur), STAIN Palopo perlu selalu mengevaluasi eksistensinya demi memelihara relevansinya agar sejalan dengan tuntutan pembangunan daerah. Idealnya, evaluasi juga melibatkan berbagai kalangan baik secara internal maupun eksternal STAIN Palopo termasuk di dalamnya para user dan stake holder.

Asumsi penulis, betapapun kecilnya, STAIN Palopo (tentu saja bersama-sama dengan sejumlah perguruan tinggi se-Luwu) telah berperan dan memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi pembangunan daerah. Untuk mendukung pernyataan ini, sebagai sekadar contoh, seandainya pada hari Jumat ketika masjid-masjid membutuhkan khatib dan pelaksana shalat Jumat lainnya (yang sebagian besarnya dosen, alumni dan mahasiswa STAIN) tidak ada, masyarakat dipastikan kasak kusuk mencari pelaksana acara Jumat. Ini belum menimbang kontribusi ribuan alumni STAIN Palopo yang berkecimpung dan berprofesi di bidang pendidikan, ekonomi (wirausaha), birokrat (pegawai di Pemda), LSM, politisi dan bahkan polisi.

Sayangnya, masih terdapat anggapan dan pemosisian yang keliru terhadap alumni STAIN Palopo. Mereka seolah-olah hanya dianggap mampu sebagai tukang baca do'a, meski pekerjaan itu sendiri bukanlah pekerjaan yang rendah apalagi hina. Banyak yang belum menyadari alumni STAIN punya kemampuan yang cukup bisa

diandalkan dalam bidang *social engineering* (rekayasa sosial). Kekeliruan itu juga tampak pada rekrutmen calon PNS di lingkup pemerintahan (daerah) yang tidak mengakomodir alumni STAIN kecuali Jurusan Tarbiyah dan Bahasa Inggris saja.

Padahal, hampir semua daerah di Indonesia, lebih-lebih di Luwu masyarakatnya cenderung majemuk dan rentan menimbulkan konflik horisontal. Belum lagi, memperhitungkan tantangan budaya global yang jika tidak diantisipasi secara ekstra hati-hati dapat menggerus ketahanan moral dan budaya bangsa. Demikian juga, banyak daerah yang telah menjadikan aspek religi sebagai salah satu dimensi strategi pembangunannya. Menghadapi masalah-masalah seperti ini, alumni STAIN yang berasal dari program studi "Studi Agama-Agama" jurusan Ushuluddin dan alumni Jurusan Dakwah/Komunikasi Islam relevan untuk dilibatkan.

Pelibatan alumni STAIN tersebut sewajarnya dilakukan secara proporsional dan sekaligus profesional. Pelibatan mereka tidak lagi cukup secara insidental, jika ada masalah atau jika diperlukan baru dihubungi. Pelibatan mereka lebih baik in-systems. Alumni Ushuluddin bisa direkrut untuk menjadi pegawai yang ditempatkan di BAPPEDA bersama-sama dengan alumni Teknik Sipil. Kalau alumni Teknik Sipil ahli di bidang civil engineering, maka alumni Ushuluddin ahli di bidang social engineering. Kalau alumni Teknik Sipil misalnya, bertugas membuat konstruksi jembatan atau jalan yang baik untuk menghubungkan satu wilayah dengan wilayah yang lain, maka alumni Ushuluddin bertugas membuat konstruksi jembatan atau jalan yang baik untuk menghubungkan antar pikiran, hati, dan agama yang majemuk dalam masyarakat. Sedang, alumni Dakwah/Komunikasi Islam dapat ditempatkan di Bagian Sosial atau Infokom. Pelibatan alumni STAIN secara proporsional dan profesional seperti tersebut

misalnya di atas, lebih menjamin sinergitas dan mantapnya pembangunan daerah.

Pelibatan secara insidental alumni STAIN, baik untuk dipanggil ceramah maupun baca do'a, bukannya tidak diperlukan dan tidak boleh, hanya akan lebih baik jika memenuhi asas proporsionalitas dan profesionalitas. Tanggung jawab alumni STAIN tidak ada bedanya dengan alumni dari jurusan lain dari perguruan tinggi umum. Keahlian mereka sudah sepatutnya juga dihargai sama. Suatu tindakan aniaya, jika mengahgainya hanya dengan ucapan terima kasih. Sayangnya, seringkali tidak disadari oleh sebagian kalangan bahwa beban yang diberikan kepada alumni STAIN, khususnya berkenaan dengan tugas pelayanan keagamaan, lebih banyak dan seabrek-abrek ketimbang "honor" atau penghargaan yang diberikan.

Sebagai aset khususnya bagi masyarakat Luwu, STAIN Palapo juga tentunya diharapkan berusaha semaksimal mungkin memenuhi harapan masyarakat secara inklusif, bukan hanya bagi kalangan Muslim, tetapi juga bagi masyarakat yang beragama lain. Dalam hal ini, secara eksternal STAIN Palapo dituntut untuk berperan aktif dan menjadi pelopor membangun dialog di antara warga masyarakat yang majemuk (plural) sehingga tercipta suasana harmonis dan titik-titik persamaan. Di samping itu, juga berupaya membangun jaringan dengan para stake holder, termasuk pemerintah dalam hal yang menjadi kepentingan bersama.

Secara internal, tantangan STAIN Palapo selain meningkatkan pelayanan kepada para user dan peningkatan mutu akademik, maka tantangan terberatnya adalah bagaimana membangun rancang bangun (konstruksi) keilmuan. Bangunan keilmuan tersebut seyogianya didasarkan pada asas relevansi, jaminan mutu dan yang tak kalah pentingnya,antisipasi trend globalisasi. Dalam hal ini, idealnya program studi-program studi baru (umum) yang dibutuhkan

masyarakat (market) dibuka. Yang disebut terakhir inilah yang paling sulit karena berbagai alasan.

Sekarang, soal rancang bangun keilmuan tersebut di atas menjadi proyek besar di lingkungan STAIN dan IAIN serta UIN se-Indonesia. Sebab, ada cita-cita besar agar paradigma keilmuan yang berkembang tidak lagi dikotomis, berupa adanya pemisahan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Pembidangan ilmu-ilmu diperlukan, tetapi membuat dikotomi antar ilmu bukan hanya keliru tetapi sudah merupakan kecelakaan sejarah. Di sini keilmuan di lingkungan STAIN Palopo sewajarnya dilihat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari bidang keilmuan lainnya.

Akhirnya, optimalisasi kontribusi STAIN Palopo dalam pembangunan daerah di Luwu dapat tercapai manakala posisi STAIN Palopo dan alumninya diletakkan secara proporsional dan profesional. Karena, alumni STAIN tidak dididik (hanya) untuk menjadi tukang baca do'a. Mereka dapat mengemban tugas-tugas yang lebih beragam dan "elite". Dan, tak kurang pentingnya, ke dalam secara internal, STAIN Palopo juga perlu berbenah dengan melibatkan berbagai unsur secara berkesinambungan membaca *trend* kontemporer kebutuhan masyarakat. Bersamaan dengan itu, proyek raksasa peletakan fundasi rancang bangun keilmuan STAIN Palopo sudah harus dimulai.

7. Polisi dan Mahasiswa Bentrok, Siapa Kalah? (Renungan untuk Insiden UMI)

Dari segi fisik kedua kelompok ini, polisi dan mahasiswa, pastilah tidak seimbang. Sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban, polisi memang dilatih untuk memiliki kemampuan mengendalikan gerak massa secara fisik. Para polisi telah dibekali keterampilan fisik, kemampuan menggunakan senjata, dan

tentu saja, agar lebih profesional dibekali pula dengan hal lain yang menunjang tugas dan profesinya. Sedang, mahasiswa adalah kelompok yang dididik bukan untuk memiliki kemampuan fisik seperti dimiliki polisi. Mereka, para mahasiswa itu dididik melalui pendidikan profesional maupun akademik untuk dipersiapkan memasuki bidang kehidupan kemasyarakatan yang luas, bukan kemampuan secara fisik, tetapi, lebih pada penguasaan wawasan dan keterampilan. Karena itu, jika kedua kelompok ini bentrok fisik bisa diduga sejak awal polisi yang akan menang.

Masalahnya bukan siapa yang akan menang atau kalah, tetapi mengapa bisa terjadi bentrok antara mereka? Yang mengherankan adalah nyali para mahasiswa jika harus bentrok dengan polisi dan para polisi yang tega “menangani” mahasiswa, sebab dua kelompok ini bukan lawan seimbang. Bahkan mereka memang bukan, dan tidak seharusnya menjadi, lawan satu sama lain. Mengherankan juga, mengapa jika ada masalah harus berujung bentrokan? Tidak adakah cara lain yang ditemukan mengatasi konflik? Di mana bisa berharap kecerdasan mahasiswa sebagai kelompok terdidik dan kesadaran polisi sebagai aparat penegak hukum bisa ditemukan oleh masyarakat? Jangan-jangan memang bangsa Indonesia, seperti kata Aa Gym, telah menjadi satu bangsa yang senang menempuh cara-cara kekerasan ketimbang cara-cara damai!

Insiden yang terjadi antara mahasiswa UMI dan polisi menyisakan banyak hal untuk direnungkan oleh banyak pihak dari komponen bangsa ini. Renungan terutama sekali diharapkan dari dua kelompok yang terlibat bentrokan. Insiden tersebut telah menimbulkan korban dari pihak mahasiswa tidak hanya fisik tetapi juga mental, menimbulkan trauma; kerusakan fasilitas pendidikan; dan yang paling fatal adalah rusaknya citra dan wibawa kampus sebagai lembaga pendidikan yang memiliki otonomi. Bagi mereka, yang peduli

pada masa depan generasi dan bangsa ini, tentu akan merasakan kepedihan dan keprihatinan yang luar biasa. Betapa tidak, kampus sebagai tempat belajar yang seharusnya aman, nyaman, dan menyenangkan tiba-tiba berubah menakutkan dan menimbulkan perasaan sebaliknya. Ironisnya pula, suasana itu justru diakibatkan ulah oknum aparat yang seharusnya justru bertanggungjawab memelihara dan melindungi serta menciptakan keamanannya. Jika kampus telah dicerai, berarti kita telah mencederai simbol-simbol peradaban.

Pihak kepolisian pun mengalami kerugian yang tidak kurang besarnya dibanding mahasiswa dan dunia pendidikan. Tindakan segelintir oknum polisi telah menjadi sebuah bencana bagi aparat polisi dan kepolisian sebagai sebuah institusi. Tindakan oknum polisi dalam insiden berdarah itu telah melukai hati rakyat; merusak citra polisi sebagai penganyom, pelindung, dan pelayan masyarakat; dan merusak upaya membangun citra kepolisian dengan paradigma baru yang tidak militeristis. Insiden tersebut, jelas kontra produktif dengan banyak upaya yang telah dilakukan untuk mereformasi institusi kepolisian; menjadikan kepolisian sebagai institusi penegakan hukum yang profesional berwatak sipil, mencintai dan dicintai rakyat.

Amat disayangkan, di tengah-tengah upaya bangsa kita mengatasi krisis multidimensional akibat tidak adanya supremasi hukum, persoalan korupsi yang sudah amat memprihatinkan, dan banyak hal yang melanggengkan keterpurukan bangsa, energi anak-anak bangsa –mahasiswa dan polisi- harus terbuang percuma dan mubazir. Lengkap sudah nestapa bangsa ini, sebab, yang bernama “kesadaran” pun telah menjadi barang langka. Sebuah kesadaran akan keterpurukan dan kesadaran untuk berubah ke arah yang lebih baik. Ada kecenderungan *raison d’etre* kita untuk menjadi sebuah bangsa dan negara telah mulai mengalami degradasi dan mulai tercabik-cabik.

Gejala ini bukan perkara ringan, jika dibiarkan akan membawa dampak yang lebih besar di masa akan datang.

Menjadi jelas, insiden bentrokan antara polisi dan mahasiswa tidak menghasilkan satu pemenang di antara mereka, keduanya sama-sama kalah. Tetapi, pada sisi paling dasar disadari atau tidak, pecundang sejati (*the real looser*) adalah rakyat.. Sebab, lagi-lagi yang harus menanggung akibatnya adalah rakyat. Rakyat menanggung semua ongkos yang dikeluarkan dan ironisnya, rakyat pula yang sengsara. Insiden ini telah menganiaya rakyat. Apakah hal semacam ini yang dapat kita suguhkan untuk rakyat? Rakyat tidak punya pilihan; andai ada mungkin ada yang menyatakan saya ingin mundur – berhenti- sebagai rakyat Indonesia! Sebab itu, insiden ini patut menjadi pelajaran bagi semua pihak, bukan hanya bagi polisi dan mahasiswa, tetapi juga bagi masyarakat sendiri. Masyarakat, demikian halnya, juga harus mampu menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi sebuah tatanan kehidupan yang lebih baik. Masyarakat pun harus menyadari andilnya bagi kehidupan yang dicita-citakannya. Bukankah ada korelasi antara masyarakat dan situasi-kondisi kehidupannya? Karena, baik atau buruknya tatanan kehidupan mencerminkan keadaan masyarakat itu sendiri.

Akhirnya, akan baik sekali manakala mahasiswa dan polisi, demikian juga masyarakat secara keseluruhan, belajar dari insiden ini. Semuanya menyadari ada persoalan-persoalan yang belum pas betul dari pola pembinaan dan pendidikan internal masing-masing kelompok dan sekaligus, dalam pola hubungan interaksi mereka. Mahasiswa sebagai salah satu kekuatan *civil society* (masyarakat madani) harus memahami bahwa sesuatu yang mereka perjuangkan tetap memerlukan cara-cara cerdas yang merupakan ciri kalangan terdidik. Sisi lain, pihak polisi sebagai aparat sipil yang bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat harus bisa menjadi pengayom,

pelindung, dan pelayan masyarakat yang merupakan ciri polisi profesional. Tak kalah pentingnya, sebagai solusi strategis untuk tatanan kehidupan dan kemasyarakatan yang lebih harmonis adalah pilihan untuk membangun demokrasi dengan menyingkirkan pola pendekatan militeristis.

8. Masihkah Mahasiswa Agen Perubahan?

Pertanyaan yang menjadi judul tulisan ini bisa dibaca dari berbagai sudut interpretasi. Interpretasi pertama berkenaan dengan pandangan yang pesimistis mahasiswa sekarang ini masih tetap pada posisi sebagai agen perubahan. Interpretasi kedua bertitik tolak dari pandangan mahasiswa seharusnya tetap pada posisinya sebagai agen perubahan, tetapi untuk itu diperlukan sikap dan karya (perilaku) yang sesuai serta mampu menegaskan keberadaan posisi mereka tersebut.

Mengapa muncul keraguan dan mengapa meragukan mahasiswa sebagai simbol perubahan? Keraguan yang muncul pada dasarnya harus dibaca dalam kerangka "besarnya" harapan masyarakat terhadap mahasiswa. Jika, masa depan sebuah bangsa terletak di tangan generasi mudanya, maka berharap banyak terhadap mahasiswa sekarang bahwa merekalah yang mampu mengusung perubahan merupakan sesuatu yang sewajarnya. Keraguan tidak mustahil akan semakin kuat manakala ternyata mahasiswa tidak memosisikan diri mereka secara tepat dalam proses perubahan itu sendiri.

Mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda bangsa ini, yang sedang belajar di perguruan tinggi, memang memiliki kewajiban membawa bangsanya ke arah yang lebih baik. Sebab, mereka lah yang berkecimpung di dunia pendidikan dan mereka pulalah yang menempa diri dengan berbagai macam bekal pengetahuan, sikap, dan

keterampilan. Karena itu, tidak berlebihan manakala harapan masyarakat akan terwujudnya kehidupan yang lebih baik selalu diletakkan dipundak mereka.

Sejarah mencatat sejumlah peristiwa penting, yang menentukan perjalanan bangsa ini, digagas dan diperjuangkan mahasiswa, sebagai contoh di antaranya, lahirnya gerakan reformasi 1998. Sulit membayangkan gerakan reformasi bisa terjadi tanpa peran serta dan pengorbanan mahasiswa. Hal ini secara jelas menunjukkan sisi lain dari keberadaan mahasiswa lebih dari sekadar sebagai generasi yang belajar di kampus. Jelas di sini, mereka bukanlah menara gading, mereka adalah generasi yang peduli dengan nasib bangsa ini, yang untuk itu mereka mau berbuat.

Hanya saja, mahasiswa pun tetap membutuhkan pencerahan. Mereka tetap selalu perlu diingatkan. Dalam proses perubahan dan rekayasa masa depan, mereka harus selalu sadar di mana posisi dan peran mereka. Mampukah mereka tetap berada pada posisi dan peran sebagai agen perubahan?. Masihkah harapan itu tetap diletakkan dipundak mereka ketika idealisme mereka mulai luntur? Atau ketika pola tingkah laku mereka tidak lebih dari sekadar "SMS-an"?. Atau ketika mereka tak tahu mau kemana, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana memulai perubahan itu sendiri? Dan, yang tak kalah pentingnya adalah sanggupkah mereka memulai perubahan dari diri sendiri?

9. Reaktualisasi Sistem Pendidikan Islam (Upaya Membumikan Sunnah Rasulullah saw.)

Dokok perbincangan yang diangkat pada tulisan ini, hemat penulis merupakan bagian dari ikhtiar untuk memperbaiki sumber daya manusia (SDM) umat Islam. Jika SDM umat

Islam baik, maka akan memberikan manfaat positif bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sebab, umat Islam masih merupakan bagian terbesar dari bangsa Indonesia. Terlebih lagi, masalah pendidikan memang masih tetap menjadi masalah krusial hingga saat ini, yang membutuhkan banyak pemikiran dan masukan dari berbagai pihak terkait.

Bagi bangsa Indonesia, sebagian tanggung jawab untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas berada di pundak lembaga pendidikan Islam, yang sekaligus merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Secara operasional, lembaga pendidikan Islam memang dikelola oleh Departemen Agama, terpisah dari lembaga pendidikan pada umumnya. Namun, dari segi misi, pendidikan Islam juga menuju ke arah yang sama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam konteks sekarang, pendidikan Islam (sistem) adalah bagian dari sistem pendidikan nasional. Hal ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di samping itu, sesuai namanya, pendidikan Islam, ia juga mengacu pada Islam, yaitu: kepada dua sumber utamanya, yaitu al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Tidak bisa disangkal, al-Quran dan Sunnah memuat ajaran dan nilai yang tetap relevan berkaitan dengan pendidikan.

Sistem Pendidikan Islam: Upaya Reaktualisasi

Istilah sistem pendidikan Islam lebih luas dari pendidikan Islam. Dengan kata lain, sistem pendidikan Islam meliputi banyak hal tentang pendidikan Islam. Pendidikan Islam sendiri dapat berarti: *pertama*, lembaga atau institusi pendidikan Islam dan *kedua*, isi atau materi pendidikan Islam. Melalui pembatasan ini, akan tampak apa yang sebenarnya ingin direaktualisasi, apakah lembaganya atau isi

(materi)-nya, atau lebih luas lagi sistemnya?. Sehingga, juga berdampak pada upaya dan langkah reaktualisasi, yaitu: apakah secara parsial-gradual atau komprehensif-total?

Muhaimin (1993) mendefinisikan pendidikan Islam sebagai proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai pada diri anak didik melalui penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya. Dari definisi ini, terlihat terdapat lima komponen yang pada dasarnya sekaligus menjadi prinsip pokok pendidikan Islam. Istilah reaktualisasi atau kontekstualisasi Islam, menurut Alwi Shihab (1998), artinya sama dengan “membumikan Islam” istilah yang dipopulerkan Ahmad Syafi’i Ma’arif, dan istilah “membumikan al-Qur’an” yang dipopulerkan oleh M. Quraish Shihab. Istilah-istilah lain yang secara substantif mempunyai semangat yang sama di antaranya gagasan “sekularisasi” atau “desakralisasi” Nurcholish Madjid, gagasan “rasionalisasi” atau pembaruan (modernisasi) Harun Nasution, dan gagasan “pribumisasi” Abdurrahman Wahid. Istilah-istilah tersebut dalam tradisi pemikiran Islam memancing timbulnya kembali isu teologi lama yang kontroversial, yang sebagiannya dipicu oleh paradigma politik baru.

Reaktualisasi diperlukan mengingat sejumlah kritik yang sering dialamatkan kepada pendidikan Islam. M. Quraish Shihab (2006) misalnya, mengemukakan empat kritik terhadap pendidikan Islam, yaitu: *pertama*, kekaburan identitas; *kedua*, despiritualisasi ilmu; *ketiga*, penolakan terhadap kritik; dan *keempat*, kurikulum dan silabus yang ketinggalan.

Reaktualisasi menuju Pembumian Ajaran Rasulullah saw.

Rasulullah Muhammad saw. diutus untuk menyempurnakan akhlaq manusia. Dikaitkan dengan tujuan pendidikan nasional, maka reaktualisasi pesan-pesan dan ajaran Nabi saw. tampak relevan dan

sejalan. Akhlaq Nabi saw., sebagai dikemukakan istrinya, ‘Aisyah ra., adalah al-Quran. Karena itu, pbumian Sunnah atau Ajaran Nabi saw., tetap harus dibaca sebagai upaya membumikan Islam dengan kedua sumbernya, yaitu: al-Quran dan Sunnah (Hadis).

Pesan-pesan populer Nabi saw. terkait pendidikan:

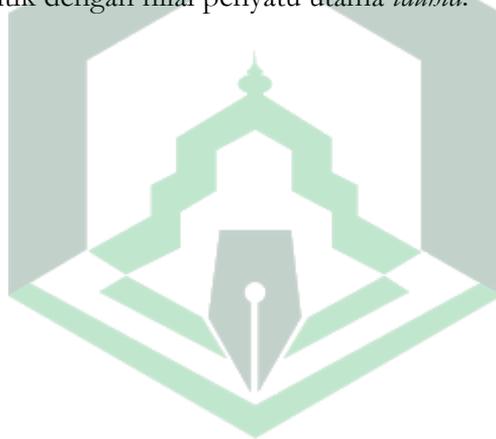
1. Setiap anak lahir dalam keadaan “fitrah”.
2. Kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim.
3. Menuntut ilmu sepanjang hayat.
4. Menuntut ilmu walaupun harus ke negeri “Cina”.
5. Menuntut ilmu dari mana pun sumbernya.

Membaca pesan-pesan ini dalam paradigma “reaktualisasi” berarti berupaya menemukan pesan esensialnya yang berpijak pada kenyataan historis-kontekstual. Pada tingkat pemahaman seperti ini, hadis-hadis Nabi saw. tidak mesti dipahami seperti tekstualnya. Selain itu, upaya reaktualisasi sebagai upaya pembaruan hakikatnya meniscayakan model alternatif pendidikan Islam yang harus diupayakan terus menerus sepanjang masa.

Mempersiapkan generasi menghadapi tantangan masa depan, reaktualisasi merupakan keniscayaan. Ada beberapa orientasi ke depan, tulis Soeroyo (1991) yang boleh jadi dapat diperpegangi. Di antaranya, *pertama*, pendidikan Islam harus menuju pada integrasi ilmu pengetahuan; *kedua*, pendidikan harus ditujukan pada tercapainya sikap dan perilaku toleran serta lapang dada; *ketiga*, pendidikan Islam diarahkan pada upaya intensifikasi pemahaman bahasa asing sebagai alat untuk meretas ilmu dan teknologi; *keempat*, pendidikan harus mampu menumbuhkan kemampuan berswadaya dan mandiri dalam kehidupan; *kelima*, pendidikan harus mampu menumbuhkan etos kerja, mempunyai apresiasi pada kerja, disiplin dan jujur.

Pada akhirnya, pendidikan Islam, meminjam ungkapan Syafi’i Ma’arif, diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang unggul secara

intelektual, kaya dengan amal dan anggun dalam kebijakan dan moral. Kriteria ini, hakikatnya tersimpul pada istilah “taqwa” yang merupakan kata kunci dalam tujuan pendidikan Islam. Hanya saja, kata “taqwa” seringkali direduksi maknanya dan dipahami secara sempit sebagai aktivitas ibadah ritual semata. Selain itu, ia juga menjadi sebuah istilah yang abstrak dan tidak terjabarkan secara operasional. Di sini, dikehendaki kata “taqwa” menjadi sebuah kata kunci yang memiliki kandungan makna terkait dengan aktivitas keilmuan, sosial, ekonomi, dan politik dengan nilai penyatu utama *tauhid*.



IAIN PALOPO



BAGIAN KETIGA:
SOSIAL POLITIK DAN
REFLEKSI SEJARAH

IAIN PALOPO

1. Dinamika Politik di Indonesia (Catatan *Trend* Pemosisian Islam)

Upaya memotret Islam politik di Indonesia tanpa pembatasan segi-segi yang akan dipotret, jelas merupakan kerja berat dan boleh jadi tak akan pernah selesai. Karenanya, tulisan ini tidak dimaksudkan untuk itu. Sebagai dikemukakan lebih lanjut, yang dipotret hanya segi-segi tertentu belaka. Potret tentang sejarah, peran dan pemosisian Islam sebagai agama dalam politik, misalnya, antara lain yang saya maksudkan segi-segi tertentu itu.

Faktor Islam (Deliar Noer, 1987; Muhtadi, 2008) tidak dapat dipisahkan dari dinamika perpolitikan nasional. Gejala dan realitas itu dapat diamati bahkan sejak hari-hari persiapan menjelang kemerdekaan (Syafi'i Ma'arif, 1985). Pengamatan pada periode ini akan membantu kita menghayati sikap dan peranan umat Islam melalui para pemimpinnya menghadapi isu-isu politik kunci dalam kaitannya dengan soal-soal kenegaraan. Sebelum proklamasi kemerdekaan pada 1945, wakil-wakil Nasionalis Muslim dan para pemimpin Nasionalis Sekular terlibat dalam perdebatan panjang mengenai apakah Islam atau Pancasila yang akan digunakan dasar ideologis negara Indonesia (Faisal Ismail, 1995). Dalam catatan Pranowo (1999), ada juga yang mengusulkan Sosial Ekonomi, tetapi hanya didukung dua partai kecil, yaitu Partai Buruh dan Partai Murba. Sebab itu, perdebatan mengenai Islam pada tahap ini dapat dikatakan lebih bersifat ideologis.

Perdebatan ideologis ini, selanjutnya menjadi akar dan mewarnai perdebatan di kalangan elit politik dan agama pada masa-masa belakangan, bahkan hingga sekarang. Dengan kata lain, wacana ideologis baik sejak pra dan pasca-kemerdekaan, Orde Lama maupun Orde Baru bahkan pasca-Orde Baru selalu tetap dapat dibaca dari perspektif pikiran Nasionalis Muslim atau Nasionalis Sekular. Sehingga, kalau partai-partai politik pada masa awal kemerdekaan dapat dipolarisasi ke dalam dua perspektif tersebut, partai-partai politik yang muncul belakangan pun menunjukkan karakteristik sama, meski dengan paduan ide beragam. Bahkan, tegas Muhtadi (2008) partai-

partai politik yang lahir setelah berakhirnya kekuasaan Orde Baru, banyak di antaranya masih kuat mengikatkan salah satu akar pengikutannya pada komunitas Islam.

Namun, dibalik perdebatan ideologis antara dua aliran pikiran di atas, sebenarnya terdapat juga faktor-faktor lain terkait dengan masalah kedudukan, jabatan, dan kepentingan komersial. Dalam hal ini, B.J. Bolan dalam *Pergumulan Islam di Indonesia* (1985) juga mengatakan, saat yang sama timbul pertentangan terselubung, setidak-tidaknya, suatu persaingan di antara partai-partai Islam itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan, “perdebatan besar” antara pilihan suatu negara berdasar Pancasila dan suatu negara berdasar Islam saja tidaklah seluruhnya benar.

Potret historis Islam dan politik di Indonesia, dalam catatan Bahtiar Effendy (1998) memiliki latar belakang tradisi yang amat panjang. Akar-akar geneologisnya dapat ditarik lebih jauh ke belakang hingga akhir abad ke 13 atau awal abad ke 14, ketika Islam pertama kali diperkenalkan dan disebarkan di Nusantara. Dalam perjalanan sejarahnya yang panjang inilah, Islam, sambil mengadakan dialog yang bermakna dengan realitas-realitas sosio-kultural dan politik lokal, terlibat dalam politik (Muhtadi, 2008). Sehingga, pada kenyataannya malah dapat dikatakan bahwa Islam, sepanjang perkembangannya di Indonesia, telah menjadi bagian integral dari sejarah politik negeri ini.

Jika ingin melihat sejarah, peran, dan pemosisian Islam dalam politik nasional, beberapa isu atau istilah dapat dimunculkan ke permukaan, sebagai berikut:

Formal atau Non-Formal

Di sini, pada perkembangan berikutnya, tema hubungan Islam politik telah mendorong berkembangnya paling tidak dua kategori pemikiran politik yang berbeda. *Pertama*, kategori pemikiran yang menyebutkan adanya dan bahkan pada saat yang sama menyatakan pentingnya apa yang disebut negara Islam. Natsir, misalnya, adalah di antara tokoh yang memiliki pandangan seperti ini dengan mendasarkan pandangannya pada konsep “persatuan agama dan negara”. *Kedua*, kategori pemikiran yang hanya menyatakan komitmennya yang kuat terhadap nilai-nilai Islam meskipun tidak

menganggap perlu adanya formalisme Islam dengan mengedepankan pentingnya bentuk negara Islam, atau memberlakukan Islam sebagai agama negara.

Gincu atau Garam

“Dulu orang Islam itu politiknya politik gincu (lipstik). Terlihat nyata, tetapi hanya di bibir. Diomongkan, tetapi kurang dilaksanakan. Sekarang politiknya adalah politik garam. Tidak terlihat, tetapi jelas dirasakan” (Pranowo, 1999). Ungkapan ini digunakan untuk menggambarkan perbedaan kehidupan politik masa lalu dan masa sekarang. Dalam makna, bahwa justru ketika tidak adanya partai politik Islam, justru kesemarakan Islam lebih terlihat. Jika ungkapan ini digunakan pula untuk melihat partai-partai Islam di era multi partai, jang-jangan partai-partai Islam itu hanya seperti gincu, terlihat tetapi tidak terasa. Ada, tetapi tidak memainkan peran yang signifikan.

Moral atau Kartu

‘Sentimen agama’ kalau dimobilisir merupakan faktor yang paling efektif, sudah tentu dengan segala implikasi bahayanya (Moeslim Abdurrahman, 2003). Pembaruan politik Orde Baru memang telah berhasil mengubah kelembagaan politik ke arah lebih efisien dan pragmatis, tetapi percaturan politik dan budaya politik yang berkembang masih saja diwarnai kesadaran primordial yang tidak mendukung terwujudnya kehidupan politik modern yang lebih demokratis. Sehubungan dengan agama, khususnya Islam yang mayoritas, misalnya, dalam kaitan dengan pembentukan budaya politik modern itu, karena masih kuatnya politik primordial tersebut, tidak heran kalau Islam juga sering terjebak menjadi ‘kartu politik’ ketimbang sebagai referensi moral politik yang objektif.

Mayoritas yang Minoritas

Mengapa politisi Muslim masih merasa penting memainkan ‘sentimen agama’ sebagai kartu dalam konstelasi politik? Moeslim Abdurrahman (2003) mengatakan, kesadaran sosiologis dengan segala kompleksitas sejarah politiknya, kompleksitas sebagai mayoritas yang berperasaan minoritas, mungkin, merupakan salah satu hal yang bisa ikut menjelaskan pertanyaan ini. Kaum politisi Islam yang lahir dari ibu kandung ‘aliran’ memang bisa dimengerti tidak akan mudah

melepaskan jebakan kesadaran sosiologis tersebut. Apalagi jika 'kemenangan Islam' memang dianggap tetap identik dengan semangat kelompok Islam daripada kemenangan nilai-nilai dasar Islam itu sendiri. Kesadaran mayoritas tetapi minoritas akan menghambat terwujudnya sistem politik yang demokratis.

Sejumlah isu dan istilah di atas, menuntut dan menginspirasi kita untuk melakukan perumusan ulang dalam konteks kekinian mengenai hubungan Islam dan politik. Sehingga Islam tidak terjebak pada simbol dengan melupakan esensi atau memosisikan Islam hanya dalam tataran kepentingan praktis, apalagi di bawah kesadaran 'inferiority complex' (perasaan rendah diri).

Reformulasi Tautan Islam dan Politik

Perumusan ulang kaitan Islam dan politik di Indonesia di masa sekarang, memerlukan kearifan dalam membaca dan memahami fenomena kontekstual. Kearifan diperlukan tidak saja untuk menghapus jejak "psikologis" masa lalu umat Islam, tetapi juga diperlukan sebagai basis untuk melihat realitas umat, bangsa, dan negara. Dengan begitu, sikap semata-mata mewarisi perspektif para pemimpin terdahulu tanpa usaha dan keberanian untuk melakukan inovasi dan kreativitas, jelas tidak lagi memadai untuk membawa Indonesia ke alam kemajuan. Berbarengan dengan itu, umat dan bangsa harus semakin cerdas menyikapi dinamika politik dalam berbagai implementasinya. Tak kurang pentingnya, ada suatu harapan Islam (politik) tidak lagi hanya menjadi gincu' dan tidak pula hanya semata 'kartu'. Islam harus memainkan peran konstruktif dan korektifnya dalam jagat dinamika politik Indonesia.

2. *Strong Leader* dan Realisasi Cita Sosial

Rakyat dari setiap negara memiliki impian mengenai wujud kehidupan yang ingin dijalaninya. Biasanya wujud kehidupan tersebut diupayakan sedemikian rupa agar kompatibel dengan keyakinan ideologis-religis yang mereka perpegangi. Karenanya, nilai ideologis-religis menjadi amat sentral dalam upaya

mengadakan perubahan terhadap berbagai segi kehidupan mereka. Dalam suatu teori perubahan sosial, terdapat dua aspek yang berperanan, yaitu adanya nilai dan adanya pelaku.

Bertitik tolak dari pandangan alam semesta dan manusia merupakan satu kesatuan wujud penciptaan dan padanya terdapat sejumlah kesatuan yang menjadi sumbu ekuilibrium dunia, rekonstruksi sistem-sistem kehidupan mengakomodasi nilai-nilai universal seperti persamaan, keadilan, dan etos kerja. Nilai-nilai ini memungkinkan terciptanya sistem kehidupan sosial yang manusiawi dan sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia dari masa ke masa. Dari segi ini, selalu memunculkan optimisme terwujudnya kehidupan yang lebih baik.

Persoalan yang banyak dihadapi umat manusia adalah kenyataan adanya nilai-nilai tidak secara otomatis melahirkan wujud kehidupan yang baik. Nilai-nilai itu masih perlu diperjuangkan untuk menjadi ruh realitas sistem-sistem kehidupan. Pengalaman menunjukkan dibutuhkan adanya pelaku (tokoh penggerak), selain nilai tersebut, yang menjadi lokomotif perubahan ke arah realitas yang diinginkan. Dalam konteks inilah dapat dipahami mengapa lahir ungkapan sekaligus harapan, kita membutuhkan *strong leader* (pemimpin yang kuat).

Sejumlah persoalan yang tetap membebani kehidupan bangsa dan Negara Indonesia, hingga saat ini, dalam berbagai aspek semakin meneguhkan harapan itu. Siapa gerangan yang mampu membawa bangsa ini keluar dari keterpurukan, kemiskinan, dan ketertinggalan? Siapa gerangan yang mampu membawa bangsa ini lepas dari krisis berkepanjangan di bidang hukum, politik, ekonomi, dan sosial budaya? Siapa gerangan yang mampu menghilangkan predikat bangsa ini sebagai salah satu negara terkorup di dunia? Siapa gerangan yang mampu menciptakan *good governance*? Apakah dia itu yang kita sebut

strong leader? Kalau jawabannya ya, maka kewajiban kita untuk merumuskan kriteria *strong leader* itu dan mencari sosok yang memenuhi kriteria tersebut.

Strong leader tidak berkorelasi langsung dengan latar belakang seorang tokoh, yakni apakah militer atau sipil. Kriteria *strong leader* lebih berkaitan dengan sejumlah kualitas dan potensi kepemimpinan yang dimiliki seseorang. Selain itu, kriteria kuat (*strong*) masih dapat juga diperhadapkan pada konteks kepemimpinan otoriter atau demokratis. Dalam konteks ini, kuat secara otoriter adalah kuat semu (palsu) karena menyimpan perlawanan (*hidden fight*) rakyat. Sedang, kuat secara demokratis adalah kuat sejati yang lebih langgeng dan menjamin tegaknya hak-hak asasi manusia.

Pemimpin yang kuat diasumsikan mampu menciptakan pemerintahan kuat yang memungkinkan keberlangsungan pembangunan dan bagaimana mencapai tujuannya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kriteria pemimpin yang kuat perlu diidentifikasi dengan harapan dapat dijadikan acuan dalam memilih pemimpin bangsa. Secara kebetulan dan untuk memudahkan, kata "KUAT" dapat dipandang sebagai akronim dari kata-kata: "K" (kredibilitas dan kapabilitas), "U" (*unmiliteris*), "A" (akseptabilitas dan akuntabilitas), dan terakhir "T" (transparansi).

Dengan demikian, pemimpin kuat adalah pemimpin yang memiliki kredibilitas, kapabilitas, unmiliteris, akseptabilitas, akuntabilitas, dan transparansi. Kriteria kredibilitas berkaitan dengan tingkat kepercayaan yang dimiliki seorang pemimpin dari rakyat. Kredibilitas terkait dengan *track record* (rekam jejak) yang meliputi masalah kejujuran, kebersihan (tidak korup), dan masalah yang berkaitan dengan tindak susila hingga terkait tidaknya dengan masalah pelanggaran hak asasi manusia. Kredibilitas adalah kriteria dasar yang harus dimiliki seorang pemimpin, sebab tanpa kredibilitas seorang

pemimpin tidak akan mungkin sukses mengemban tugas dan tanggung jawabnya.

Kapabilitas adalah kriteria yang berkaitan dengan kemampuan melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Kapabilitas seseorang dapat dilihat dari aspek pendidikan dan pengalamannya. Dua aspek ini amat logis untuk dipertimbangkan dalam menilai kapabilitas seseorang. Suatu idealitas, jika seorang pemimpin selain memiliki tingkat pendidikan tertentu yang memadai juga ditunjang oleh pengalaman yang telah teruji. Hal ini menjadi amat jelas pula, jika dapat diterima pandangan bahwa kualitas sumber daya manusia terkait dengan tingkat pendidikannya. Demikian pula, pengalaman mampu memberikan sejumlah kearifan yang berguna bagi pengambilan keputusan dan aksi, sehingga dengan pengalaman yang dimilikinya seseorang memiliki preferensi untuk menangani suatu persoalan.

Kriteria *unmiliteris* terkait dengan gaya atau tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan *unmiliteris* dimaksudkan sebagai tipe kepemimpinan yang tidak militeristis, dengan kata lain *unmiliteris* merupakan tipe kepemimpinan demokratis. Mengapa tipe ini? Tipe militeristis adalah gaya kepemimpinan yang tentu cocok dikembangkan di lembaga atau institusi militer, sementara dalam konteks bernegara secara luas tipe kepemimpinan demokrasi lah yang cocok dikembangkan. Di banyak negara yang ingin mewujudkan demokratisasi hubungan sipil militer harus jelas. Dalam negara demokrasi, supremasi sipil harus dibangun, sementara militer diposisikan sebagai alat pertahanan dan keamanan negara (militer profesional).

Upaya membangun profesionalitas militer (TNI) tampak dari langkah penghapusan doktrin dwi fungsi ABRI, langkah reposisi TNI yang tidak lagi berfungsi sebagai kekuatan sosial politik dan langkah-langkah reformasi baik secara internal maupun eksternal. Sejumlah

langkah yang diambil TNI tidak saja menunjukkan niat baik TNI terhadap komitmen bernegara, tetapi juga secara tidak langsung menunjukkan kecerdasan TNI menyikapi berbagai perubahan di tingkat lokal dan bahkan global. Konsentrasi TNI sebagai militer profesional amat diperlukan mengingat tantangan di bidang pertahanan dan keamanan semakin meningkat. Langkah-langkah ini harus terus didorong dan jangan lagi ada upaya untuk menarik-narik TNI memasuki ranah politik. Hal mana secara tegas dinyatakan Jenderal Endriartono, Panglima TNI, "TNI tidak berpolitik, politik TNI adalah politik negara".

Kriteria akseptabilitas terkait dengan sejauh mana penerimaan rakyat terhadap seorang pemimpin. Di negara kita hal ini menjadi amat penting mengingat latar belakang masyarakat yang amat beragam, baik dari segi suku, agama, ras, dan golongan. Seorang pemimpin jelas akan sangat direpotkan dengan hal ini. Misalnya, penonjolan suku tertentu oleh seorang pemimpin jelas akan digugat suku lain; seorang pemimpin yang diragukan sikap keberagamaannya akan ditolak oleh kelompok agama yang taat. Dari contoh terakhir ini, juga bisa dilihat pada corak pemahaman kelompok agama dan tindak politisasi agama, seperti pengharaman wanita menjadi presiden. Dengan begitu, pemimpin kuat dengan sendirinya pula bisa dilihat dari tingkat resistensi masyarakat terhadapnya.

Bagaimana wujud akuntabilitas atau pertanggungjawaban publik juga merupakan salah satu kriteria pemimpin yang kuat. Kriteria ini penting karena kelemahan pemerintahan Indonesia terletak pada kualitas akuntabilitasnya. Akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan mengurus berbagai kepentingan mereka. Dari sisi ini, setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas

sikapnya terhadap masyarakat. Selain itu, adanya akuntabilitas juga menjadi ukuran apakah suatu pemerintahan demokratis atau tidak.

Kriteria terakhir dari kata "KUAT", yaitu transparansi berkaitan dengan keterbukaan pengelolaan pemerintahan atau kewenangan. Berlangsungnya perilaku dan tindak korupsi, yang di Indonesia telah menimbulkan efek *metastarik*, yakni penyebaran ke seluruh elemen birokrasi pemerintahan, dari pucuk pimpinan sampai pada pegawai paling rendah, secara tidak langsung diakibatkan oleh tidak adanya transparansi. Berapa banyak kebijakan pemerintah yang hingga sekarang tidak begitu jelas arah dan pertanggungjawabannya, tercermin pada kontroversi yang meluas antara berbagai kalangan terhadap suatu kebijakan pemerintah. Ada tidaknya transparansi amat menentukan posisi pemerintah di mata rakyat, yang pada akhirnya akan menentukan legitimasi sebuah pemerintahan.

Sejumlah kriteria di atas yang terangkum dalam kata "KUAT" merupakan kriteria bagi seorang *strong leader*. Maka, menyongsong pemilu presiden 2004 kriteria ini bisa dijadikan acuan untuk menilai dan memilih siapa di antara kandidat presiden yang bisa memenuhi kriteria tersebut. Kesungguhan dan keterlibatan meluas di dalam masyarakat bagi upaya merumuskan kriteria dan menemukan figur *strong leader* merupakan awal langkah penting untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Pada akhirnya, relevan untuk dikemukakan ungkapan Najwa Shihab, presenter Metro TV, "siapa pun yang terpilih dia lah Presiden kita". Dengan catatan bagi presiden terpilih "berapa pun rakyat yang tidak memilih anda, mereka adalah rakyat anda juga dengan hak-hak yang tidak berkurang sedikitpun".

3. Politik *Sikamasei*

Mereka yang belajar teori politik ataupun berkiprah di dunia politik (politisi) mungkin masih mempertanyakan yang penulis maksudkan dengan judul artikel ini, "Politik Sikamasei". Hal ini bisa dimaklumi mengingat istilah ini belum atau bahkan tidak lazim dijumpai dalam politik baik secara teoretis maupun praktisnya. Namun, jika dihubungkan dengan filsafat politik, khususnya menyangkut cara dan tujuan politik, maka akan segera tergambar atau paling tidak bisa dipahami ide apa yang berada di balik istilah ini.

Istilah tersebut di atas, merupakan gabungan dua kata, yaitu: politik (Indonesia) dan sikamasei (Bugis). Istilah "politik" itu sendiri setidaknya memiliki tiga macam pengertian (Fuad Mohd. Fachruddin), yaitu: pertama, sebagai satu disiplin ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan; kedua, diartikan sama dengan siasat dalam bahasa Indonesia, yang berarti segala kebijaksanaan yang digunakan dan dipakai dalam setiap urusan dan tindakan; ketiga, politik berarti tipu muslihat, kelicikan, dan daya upaya.

Dalam pengertian terakhir di atas, seringkali politik dianggap sebagai perbuatan kotor, keji, dan tidak layak. Sehingga, tidak jarang terdapat sebagian orang yang tidak mau melibatkan diri dengan politik. Meski, jika dicermati akan tampak sesungguhnya politik itu tidak kotor, sebab yang membuat politik kotor adalah pelakunya bukan politik itu sendiri. Dengan kata lain, kotor atau tidaknya politik terletak pada cara yang digunakan dalam berpolitik. Di sinilah, muncul dua kategori politik, meminjam istilah Amin Rais, *high politics* (politik adi luhung, bermoral) dan *low politics* (politik rendah, tidak bermoral).

Adapun kata "sikamasei" dapat diartikan "saling mengasihi". Ungkapan ini banyak digunakan dalam interaksi individu dan hubungan sosial masyarakat Bugis. Karena itu, prinsip sikamasei ditujukan tidak hanya bagi mereka yang memiliki hubungan kekeluargaan, tetapi juga, bagi mereka yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan sekalipun. Bahkan, dalam kehidupan masyarakat secara luas prinsip sikamasei diharapkan bisa dijunjung tinggi dan menjadi nilai utama yang hidup dan dipraktekkan. Dengan demikian, istilah "politik sikamasei" berarti politik yang didasarkan pada nilai saling mengasihi di antara pelaku politik maupun dengan mereka yang terlibat atau terkait politik (rakyat).

Masalahnya, mungkinkah mewujudkan politik sikamasei itu?. Pertanyaan ini wajar muncul dibenak kita sebab tidak jarang praktek politik menimbulkan sikap antipati, bermusuhan hingga konflik yang menimbulkan korban materi dan jiwa. Dan, biasanya yang menjadi korban adalah rakyat. Padahal, idealnya rakyatlah yang harus menikmati hasil dari politik. Sebab, bukankah politik lahir dengan tujuan mengabdikan pada kepentingan rakyat?. Namun, hingga kini tampaknya politik masih tetap untuk elit politik bukan untuk rakyat.

Dalam kehidupan kita sehari-hari, juga ada ungkapan yang terkadang dihubungkan dengan politik, yaitu ungkapan sianre bale dan sirui' no' tessirui' menre'. Politik sianre bale yang secara harfiah berarti politik saling memakan laksana ikan adalah situasi dan suasana politik yang sudah berubah menjadi kacau dan tidak lagi mengindahkan aturan-aturan berlaku dan nilai-nilai moral. Ketika ini terjadi orang tidak akan segan-segan saling mengorbankan atau saling memangsa, meski teman atau keluarga sendiri sekalipun. Satu-satunya nilai yang bekerja adalah kepentingan. Karena itu pula, dalam politik ada adagium tidak ada kawan dan lawan abadi, satu-satunya yang abadi adalah kepentingan.

Sinyalemen yang menggejala dalam perilaku politik berupa nilai *sirui' no' tessirui' menre*, secara harfiah bermakna saling menjatuhkan tanpa saling mengangkat. Politik yang menggunakan prinsip ini, tidak jarang juga dapat dijumpai dalam masyarakat. Barangkali politik seperti ini tepat disebut sebagai politik jegal-menjegal. Di antara indikatornya adalah keengganan untuk memberdayakan dan memberi kesempatan orang lain serta tidak senang manakala ada orang lain yang berhasil. Sikap seperti ini bertambah kuat jika orang lain tersebut bukan dari golongan atau keluarganya.

Konon, kalau orang Luwu mau besar (meningkat karirnya) ia harus pergi meninggalkan daerahnya, karena jika tetap tinggal di daerah sendiri ia tidak akan pernah menjadi besar. Selain itu, jika pun dapat memiliki jabatan, maka ia akan mendapat rongrongan terus-menerus. Belum bisa dipastikan darimana dan bagaimana prinsip *sirui' no' tessirui' menre* ini bisa muncul dan menggejala di masyarakat. Apakah praktek politik seperti ini memang merupakan pembawaan alami manusia?. Namun bukankah kita juga memiliki nilai-nilai utama?. Sehingga, wajarnya nilai-nilai utama itulah yang menjadi acuan dalam berpolitik.

Di zaman Belanda, kita juga mengenal istilah politik "divide et impera" atau politik "adu domba". Politik penjajah Belanda ini, merupakan siasat yang dijalankan untuk mengadu domba rakyat Indonesia dan meretakkan hubungan di antara mereka. Melalui politik divide et impera itu, Belanda lebih mudah menguasai rakyat Indonesia, terutama elit politiknya, sekaligus lebih mudah menjalankan agenda dan kepentingannya. Dan, ternyata untuk beberapa saat politik ini berhasil. Walaupun, pada akhirnya menyadarkan rakyat Indonesia dan semakin mengukuhkan rasa persatuan (nasionalisme). Politik seperti ini tampaknya memang lebih sesuai dijalankan oleh bangsa, kelompok

dan orang yang memiliki mental penjajah dan ingin menjaga kelanggengan kepentingannya, meski dengan cara-cara buruk.

Kurang lebih sama buruknya, ada juga yang disebut politik "belah bambu". Politik ini dijalankan dengan cara seperti membelah bambu, satu diangkat, satunya lagi diinjak. Dalam praktek politik, cara ini digunakan pelaku politik (penguasa) dengan tujuan hanya untuk membela kepentingan golongannya saja, sementara golongan lain yang berseberangan ditindas dan kalau perlu disingkirkan. Biasanya cara yang ditempuh pun bisa menggunakan cara-cara yang keras dengan mengabaikan hukum maupun hak asasi manusia. Asas yang berlaku dalam politik belah bambu lebih mencerminkan asas suka dan tidak suka (*like and dislike*). Dalam hal ini, penguasa hanya akan merangkul golongan atau kelompok yang mendatangkan keuntungan baginya. Dengan begitu, politik belah bambu bukanlah politik sikamasei (*saling mengasih*), tetapi politik pilih kasih.

Praktek politik lain yang seringkali disebut-sebut dilakukan orang dengan menghalalkan segala cara, yaitu praktek politik machiavelis. Praktek politik ini dinisbahkan kepada nama pencetusnya, Niccolo Machiavelli. Bagi Machiavelli ketidakjujuran politik sering memperoleh kemenangan. Yang penting adalah tujuan tercapai. Perkara mencapainya, bermoral atau tidak bermoral, tidak menjadi pertimbangan. Dalam bukunya, *The Prince* (dikutip dari A. Syafi'i Ma'arif), Machiavelli secara gamblang menolak prinsip moral jika dikaitkan dengan perilaku penguasa. Ia mengatakan: "Seorang penguasa akan hancur bilamana ia senantiasa baik; ia haruslah secerdik *fox* (hewan cerdas sebangsa anjing) dan seganas seperti singa". Sehingga, bagi pengamal ajaran Machiavelli ini, apapun bisa dan akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Hal yang bisa dilakukannya mulai dari apa yang disebut *money politics* (politik uang), *character assassination* (pembunuhan karakter), teror, dan *moral hazard* (aji

mumpung) hingga tindakan yang melanggar hukum maupun hak asasi manusia.

Godaan kepada perilaku politik buruk dapat melanda siapa saja dengan beragam latar belakang. Tidak peduli apakah ia seorang pengajar demokrasi, birokrat-teknokrat, pemimpin sebuah negara kampiun demokrasi, atau bahkan seorang ulama yang hapal banyak ayat al-Qur'an dan Hadis sekalipun. Keadaan ini sejalan dengan adagium dari Lord Acton, "Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men". Adagium ini berarti kekuasaan cenderung korup (menyimpang) dan kekuasaan absolut akan korup (menyimpang) secara absolut. Orang yang baik seringkali menjadi jahat.

Meski demikian, tidak berarti tidak pernah ada pelaku politik (pemimpin atau penguasa) yang baik. Sejarah tetap mencatat adanya penguasa baik seperti Umar bin Abdul Aziz, di samping penguasa buruk seperti Fir'aun. Kita juga mengenal sejumlah pahlawan dan pejuang bangsa, meski tidak sedikit juga yang menjadi pengkhianat. Kita punya tokoh nasional yang namanya tetap harum seperti Panglima Soedirman, Bung Hatta, dan Andi Djemma. Jika generasi sekarang ingin mengikuti jejak mereka yang baik, maka mengamalkan politik sikamasei adalah jalannya!

4. Provinsi Luwu, Sebuah Identitas Baru?

Sarasehan menyambut peringatan hari jadi Luwu ke 737 dan hari perlawanan Rakyat Luwu ke 59 digelar dengan mengusung tema "menjadikan hari peringatan sebagai *starting point* menuju kebersatuan Wija To Luwu pasca pemekaran". Sarasehan menghadirkan pembicara para bupati dan walikota se Tana Luwu: Bupati Luwu H. Basmin Mattayang; Walikota Palopo H.P.A.

Tenriajeng; Bupati (penjabat) Luwu Utara H.A.Muallim; dan Bupati Luwu Timur H. Andi Hatta Marakarma. Sarasehan dihadiri pula para pemangku adat, tokoh agama dan masyarakat, para pejabat, dan berbagai komponen dalam masyarakat termasuk dari kalangan generasi muda.

Pembicaraan dalam sarasehan berkembang menyentuh berbagai topik, meski, secara umum arah pembicaraan tertuju pada sejarah Luwu, kebesaran Luwu sebagai kerajaan pada masa lampau, dan prospek pembentukan propinsi Luwu. Ada juga yang mengungkit aspek pendidikan, sumber daya manusia dan sumber daya alam Luwu, pembangunan infrastruktur di 4 kabupaten/kota, dan bagaimana semua potensi dikelola secara bersinergis. Bahkan ada juga, yang ingin mendengar secara langsung komitmen para Bupati dan Walikota mengenai Luwu sekarang dan masa depan.

Perbincangan tentang sejarah Luwu tidak saja menarik dan mampu mengundang minat para pemerhati sejarah, tetapi mengandung arti amat penting bagi warga Luwu (Wija To Luwu). Bagi Wija To Luwu, perbincangan tentang sejarah Luwu amat penting untuk mengungkap jati diri mereka dan dengan itu, dapat dilihat di mana posisi dan eksistensi mereka di antara suku-suku di Sulawesi Selatan secara khusus, dan Indonesia pada umumnya. Hal yang tak kurang pentingnya, adalah soal nilai-nilai utama yang dianut para leluhur Wija To Luwu.

Sejarah, seperti dikemukakan oleh Suriadi Mappangara (2005), salah seorang pembicara dalam sarasehan, adalah peristiwa masa lampau. Tidak berbeda dengan itu, bagi penulis sendiri, sejarah adalah rekonstruksi masa lampau. Di sini terlihat, secara positif sejarah berkaitan dengan waktu. Sehingga, di sini dapat dibicarakan empat hal tentang waktu, yaitu (1) perkembangan; (2) kesinambungan; (3) pengulangan; dan (4) perubahan. Ini penting dipahami, agar

perbincangan mengenai sejarah Luwu dapat ditempatkan sesuai konteks dan perkembangan zaman.

Kecuali itu, kajian sejarah tidak hanya dikaitkan dengan masa lalu. Kajian sejarah juga membahas kecenderungan dari masa lalu ke masa sekarang dan memprediksi masa kini ke masa depan. Dengan kata lain, sejarah hanya akan berarti jika ia membantu untuk memahami manusia, baik yang hidup pada masa sekarang maupun pada masa depan, dan pemikiran-pemikiran yang dikembangkannya. Dengan begitu dapat berlaku ungkapan, "*learning the past, anticipating the future*" (belajar dari masa lampau, untukantisipasi masa depan).

Perbincangan tentang sejarah Luwu memunculkan pertanyaan di benak banyak rakyatnya sendiri. Sejauh ini, masih terdapat pertanyaan soal apakah Luwu itu satu suku, bahasanya apa, nilai-nilai utama yang dianut apa, dan batas teritorinya di mana? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu saja penting karena menyangkut identitas (jati diri) dari satu kelompok. Memang ada jawaban-jawaban, misalnya, Luwu itu adalah akarnya Bugis, dan bahasanya Bugis. Tetapi, jawaban seperti ini masih perlu dikaji lebih lanjut, sebab masih menyisakan ketidakpuasan (problem psikologis), masih menyisakan problem-problem politis-ekonomis, dan sepintas belum menampakkan apa yang dibanggakan selama ini sebagai "kebesaran" orang Luwu. Maka, pencarian identitas tersebut penting, karena tanpanya, Wija To Luwu dikhawatirkan tidak akan tahu tempatnya di mana dalam perubahan besar yang melanda kehidupan dunia dewasa ini.

Profesor Iskandar mengungkap uraian Sanusi Daeng Mattata, orang Luwu itu (berarti) "*madeceng ampenna na madecengto abbatireнна*" (baik tingkah lakunya dan baik pula keturunannya). Berdasarkan pengertian ini dan jejak-jejak yang sepintas diamati dalam interaksi sosial budaya masyarakat Luwu, diidentifikasi orang Luwu memiliki sifat-sifat sekaligus menjadi nilai-nilai yang dianutnya, yaitu: harga diri

yang tinggi, mandiri, kritis bahkan terhadap para pemimpinnya, mengayomi, solider, murah hati, dan berwatak inklusif. Sifat yang menjadi nilai ini memberi corak pada perilaku dan interaksi orang Luwu dalam masyarakat. Untuk masa depan, revitalisasi nilai-nilai ini dibutuhkan untuk membangun identitas orang Luwu.

Pemekaran Luwu yang hingga sekarang telah berkembang menjadi 3 kabupaten dan 1 kota dalam konteks sejarah sebagai ilmu tentang waktu bisa ditelaah dalam empat sisi, seperti dikemukakan di atas, yaitu: apakah pada sisi perkembangan (*developing*), kesinambungan (*continuity*), pengulangan (*conveying*), dan perubahan (*shifting*). Ungkapan terbentuknya Palopo sebagai Kota Otonom adalah semata-mata sebuah "berkah", misalnya, jelas berangkat dari sisi pandang kesinambungan sejarah semata. Karena, dalam pandangan ini, di masa lampau Palopo tidak didisain untuk menjadi sebuah Kota Otonom. Tetapi, mengapa tidak melihatnya dari sisi perkembangan atau bahkan perubahan?

Keinginan untuk "menyatukan kembali" daerah-daerah pemekaran dalam satu bingkai propinsi, yakni Propinsi Luwu adalah sah-sah saja dan merupakan sesuatu yang memiliki preseden secara politik. Keinginan tersebut dapat dilihat dari sisi "perkembangan" dan "perubahan" sejarah. Dalam hal ini, perkembangan dan perubahan dari satu kabupaten kemudian menjadi tiga kabupaten dan satu kota kemudian menjadi satu propinsi masih dapat dilihat dalam bingkai mengikuti sejarah. Meski, harus dicatat bahwa perkembangan terjadi secara evolusi dan perubahan terjadi jika masyarakat mengalami pergeseran (perkembangan) dalam waktu yang relatif singkat.

Perbincangan tentang sejarah Luwu hanya akan bermakna jika ia berguna bagi kekinian dan masa depan. Memang, merupakan hal sulit merekonstruksi kebesaran Luwu di masa lampau terlebih lagi untuk dihadirkan dalam konteks sekarang dan masa depan. Tetapi,

harus diyakini amat berguna untuk memenuhi identitas satu kelompok (suku?) dalam satu bingkai politik. Tidak hanya itu, ia juga berguna bagi perjuangan aspirasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya rakyatnya. Tegasnya, pembentukan Propinsi Luwu adalah sebuah penegasan identitas bagi Wija To Luwu. Bahkan bisa dibaca sebagai sebuah identitas baru!

Sayangnya, keinginan membentuk sebuah propinsi bagi Luwu sejauh ini belum banyak bergeser dari sebatas wacana. Banyak harapan agar berbagai komponen Wija To Luwu mempergunakan kesempatan yang ada untuk berusaha secara optimal memperjuangkan terbentuknya Propinsi Luwu. Langkah-langkah pendahuluan sebagai embrio dapat dilakukan melalui kerjasama komponen se Tana Luwu. Kerjasama tersebut sudah harus terlihat dalam disain pembangunan masing-masing daerah. Dalam hal ini, mungkin bisa digunakan pola "membangun dari akhir". Pola ini meniscayakan adanya "*blue print*" dari *grand design* (disain besar) wujud Propinsi Luwu yang dicita-citakan.

5. Luwu, Menjembatani Masa Lampau ke Masa Kini (Catatan dan Renungan 23 Januari)

Segenap warga Luwu (*wija to Luwu*) wajar berbangga akan kebesaran Luwu di masa lampau, yang pernah menjadi salah satu dari tiga kerajaan besar di Sulawesi Selatan bersama-sama dengan dua kerajaan besar lainnya, yaitu Bone dan Gowa. Meski demikian, kebesaran masa lampau tersebut tidak cukup hanya sekadar dikenang, sebab yang lebih penting adalah bagaimana kebesaran masa lampau menjadi berguna di masa sekarang bagi anak keturunan dan warganya. Untuk itu, diperlukan "jembatan" yang mampu menjadi penghubung kebesaran Luwu masa lampau ke masa kini. Jembatan itu sebaiknya adalah "jembatan emas" dengan konstruksi yang kokoh.

Oleh rakyat Luwu, 23 Januari diperingati sebagai hari jadi dan hari perlawanan rakyat Luwu. Peristiwa itu sendiri, secara umum memberi inspirasi tentang heroisme dan kekuatan para pejuang Luwu dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membela nasib rakyat. Selain itu, hari jadi Luwu juga memberi inspirasi tentang sebuah negeri yang makmur dengan ketokohan para pemimpin dan ketinggian adat budayanya. Sedang, hari perlawanan rakyat Luwu memberi inspirasi tentang kegigihan sebuah negeri dengan para pemimpin-pejuang dan rakyat yang bahu membahu menegakkan harkat dan martabat sebagai bangsa merdeka.

Inspirasi tersebut di atas sejalan dengan filosofi dan motto Tana Luwu "*wanua mappatuwo naewai alena*". Elaborasi atas filosofi dan motto ini, paling tidak dipahami mengandung pernyataan akan potensi dan kemampuan wilayah Luwu dan rakyatnya untuk menjadi sebuah negeri makmur dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman maupun perubahan di wilayah sekitarnya. "*Wanua mappatuwo*" menggambarkan potensi wilayah yang kaya dan sekaligus memiliki tanggungjawab memberdayakan rakyatnya. Adapun "*naewai alena*" mengandung makna kemampuan adaptasi, responsi, dan kompetisi menghadapi berbagai macam perubahan.

Berangkat dari makna filosofi dan motto Tana Luwu itu, para pemimpin Luwu dan segenap warganya, pada dasarnya, telah memiliki orientasi pembangunan dan perjuangan yang jelas. Sehingga yang diperlukan sekarang adalah bagaimana menerjemahkannya dalam derap langkah paembangunan. Tidak pula boleh dilupakan, orientasi perjuangan tersebut harus pula selaras dengan nilai-nilai utama yang dipesankan para leluhur wija to Luwu. Nilai-nilai utama tersebut adalah "*awaraningeng* (keprawiraan), *alempureng* (kejujuran), *amaccang* (kecendekiaan), *agetengeng* (keteguhan), *assitinajang* (kepatutan), *reso* (kerja keras), *asabbareng* (kesabaran) dan *siri'* (harga diri)". Tinggal,

apakah nilai-nilai utama ini masih fungsional dalam hidup keseharian warganya atau tidak?. Bila tidak, maka muara pembangunan kita haruslah dimulai dari upaya menguatkan kembali (revitalisasi) nilai-nilai utama tersebut.

Upaya revitalisasi nilai-nilai utama tersebut sejalan dengan harapan mewujudnya identitas baru wija to Luwu baik secara politis, dan administratif-kewilayahan (propinsi) maupun secara historis-sosiologis. Pewujudan identitas masa kini wija to Luwu berguna untuk mengetahui posisinya di antara suku-suku yang ada di Sulawesi Selatan, pada khususnya, dan di Indonesia pada umumnya. Penegasan identitas juga diperlukan sebagai modal menghadapi tantangan perubahan global dalam berbagai segi kehidupan. Dengan kata lain, upaya penegasan identitas wija to Luwu merupakan langkah penting guna membangun harkat dan martabat mereka sebagai satu suku yang pernah memiliki kebesaran masa lampau.

Membangun jembatan guna menghubungkan masa lampau ke masa kini, harus dibaca untuk membangun kesiapan menuju masa depan. Upaya ini menjadi penting mengingat kebesaran masa lampau itu bukanlah warisan yang tak akan punah. Kebesaran masa lampau juga harus diapresiasi secara benar dalam wujud adanya kesadaran untuk memelihara dan melanjutkannya. Sebab, bukan sesuatu yang mustahil kebesaran suatu negeri di masa lampau betul-betul hanya menjadi sebuah kenangan manis. Bukankah sejarah telah memberi informasi kepada kita akan adanya kemajuan dan keruntuhan sebuah negeri?. Artinya bagi Wija to Luwu, jembatan emas penghubung masa yang akan dibangun merupakan tugas terberatnya sekarang ini.

Belajar dari kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, banyak pengalaman berharga yang bisa diambil wija to Luwu. Pengalaman tersebut dapat menjadi masukan yang berharga, sehingga kesalahan yang pernah terjadi tidak

terulang lagi. Sebaliknya, wija to Luwu diharapkan bisa mengambil langkah-langkah bervisi dan strategis yang mampu menegaskan identitas dan sekaligus mampu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup bagi mereka. Pilihan langkah-langkah pembangunan bervisi dan strategis itulah yang akan menjadi ramuan bagi bangunan "jembatan emas" yang disebut di atas.

Dalam konteks itu, beberapa hal yang bisa dipikirkan bersama, di antaranya: pertama, meneguhkan semangat ke"Luwu"an. Maknanya, meski secara administratif wilayah Luwu sekarang telah terbagi menjadi tiga kabupaten dan satu kota, namun semangat persatuan rakyat Luwu harus tetap terpelihara. Semangat ini diharapkan mampu melestarikan solidaritas sesama rakyat Luwu dan tekad untuk saling tolong-menolong, bahu-membahu serta tekad saling memberdayakan. Di sini, fungsionalisasi nilai-nilai "*rebbu sipatokkong, mali siparappe* dan *malilu sipakainge*" merupakan sebuah keharusan. Sebaliknya, harus dihindari "*rebbu sisukkeang, mali sitellengeng*, dan *malilu sipakatulu-tulu*".

Kedua, membangun kearifan sosial budaya. Sejak dini generasi Luwu harus dibekali dengan nilai-nilai kearifan sosial-budaya. Nilai-nilai sosial-budaya Luwu masa lampau yang masih relevan dapat terus dipelihara, sedang nilai-nilai baru yang baik diambil. Kearifan sosial-budaya ini diperlukan agar generasi Luwu tidak mengalami kegamangan dan keterkejutan dalam menghadapi budaya global. Bahkan akan jauh lebih baik lagi, manakala bisa diwujudkan apa yang disebut dengan keunggulan budaya Luwu.

Ketiga, sinergitas pembangunan. Maknanya, pelaksanaan pembangunan di wilayah Luwu (3 kabupaten dan 1 kota) agar saling melengkapi dan memperkuat. Oleh karena itu, dihindari program yang *overlapping* (tumpang tindih) dan apalagi program yang saling merugikan. Mungkin, bisa juga dikatakan bahwa kita memerlukan program pembangunan di wilayah Luwu yang memenuhi apa yang

disebut "simbiosis mutualisme" (saling menguntungkan). Karena itu, diperlukan adanya jaringan informasi pembangunan yang bertugas memetakan potensi unggulan daerah dan sekaligus memilah tanggung jawab pengembangannya. Daerah-daerah tetap bisa berkompetisi, tetapi tentu saja kompetisi yang sehat dan menguntungkan.

Keempat, ketepatan prioritas pembangunan. Para pengambil kebijakan, baik eksekutif maupun legislatif tidak mengulang dan memperlihatkan sifat kekanak-kanakan dalam merumuskan usulan program. Kekayaan sumber daya alam (*wanua mappatuwo-comparative advantage*) agar tidak meninabobokkan, sehingga kita lupa bahwa ada unggulan lain yang jauh lebih penting untuk digarap, yaitu sumber daya manusia (*naewai alena-competitive advantage*). Maka, bagaimana Luwu menjadi satu kawasan baru yang maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi prioritas utama.

Kelima, politik sikamasei. Secara umum, banyak kalangan yang menyadari tensi politik, terutama dalam hal jabat-menjabat kekuasaan di Luwu sangat tinggi. Keadaan itu semakin kuat di era otonomi daerah sekarang ini. Meski sah-sah saja, tetapi kompetisi (pertarungan?) untuk menduduki jabatan itu haruslah tetap dalam pijakan nilai-nilai utama, jauh dari keadaan "*sianre bale*". Kompetisi untuk menjadi pejabat haruslah berangkat dari niat dan tekad yang baik. Bahkan harus berangkat dari keprihatinan atas nasib rakyat. Dengan begitu, politik tidak harus membuat rakyat Luwu terkotak-kotak apalagi terkoyak-koyak. Politik harus menjadi ajang mempertautkan rasa kasih dan sayang sesama rakyat Luwu. Politik sikamasei!

6. 23 Januari, Pemelihara Ingatan?

“**K**ita tak mau menerima Belanda berada di negeri kita, meskipun mereka dagang saja. Kita mempunyai cukup bukti-bukti, betapa perbuatan kejam Belanda di tempat-tempat yang telah dikuasainya, dan betapa kecurangan Belanda dalam soal-soal perjanjian. Suruh mereka pulang saja ke negerinya. Akan tetapi, jika mereka mau memaksa kita, kita tidak gentar menghadapinya. Lebih baik kita mati dari pada diperbudak bangsa asing yang tidak tahu malu itu. Biarlah kita tewas dalam membela hak kita, dalam membela kebenaran. Mati hanya sekali, oleh sebab itu berusahalah supaya kita mati dalam membela kebenaran, dalam membela negeri dan kampung halaman kita.” Demikian Andi Tadda Opu Pabbicara (Mattata, 1975: 118), menegaskan pendiriannya yang tak dapat ditawar-tawar lagi menghadapi Belanda.

Penegasan Andi Tadda, pada September 1905, yang berlanjut dalam bentuk perang melawan penjajah Belanda (Bachrum Sibali, 1994: 30) menunjukkan harga diri dan kehormatan rakyat Luwu tak boleh dihina. Perang melawan penjajah Belanda di masa itu, menunjukkan pula suatu sikap tak ingin dijajah oleh siapapun. Bangsa dan rakyat Luwu adalah bangsa dan rakyat yang merdeka. Sama halnya perlawanan rakyat luwu, pada 23 Januari 1946. Spirit perjuangannya memiliki benang merah yang sama, menolak penjajahan!

Untuk memahami nilai-nilai kejuangan 23 Januari 1946, kata A.S. Achmad, tidak dapat dipisahkan dari peristiwa-peristiwa lebih awal sebelum pecahnya revolusi bersenjata melawan Belanda itu. Rakyat Luwu di bawah pimpinan raja-raja mereka yang arif dan piawai, gagah perkasa, dan memang berjiwa kerakyatan, sudah sering berperang melawan penjajah dari luar. Mereka anti kezaliman, kesewenang-wenangan, ketidakadilan, perkosaan dan eksploitasi

manusia atas sesamanya dari mana pun datangnya (Baharman Supri dan Baharuddin A.P., 2002: 60).

Bisa dipahami mengapa generasi pendahulu rakyat Luwu melawan penjajah Belanda. Karena, pada esensinya segala macam bentuk penjajahan memasung hak, kreativitas, dan pengharapan si terjajah. Penjajahan berarti penghilangan nilai-nilai dasar kemanusiaan (*humanity*). Nilai-nilai mana melekat dan tidak terpisahkan dari harga diri dan kehormatan manusia. Selain itu, penjajahan juga mengeksploitasi sumber daya rakyat yang dijajah. Yang berarti pula, kesengsaraan bagi rakyat. Kata-kata Andi Tadda di atas “Lebih baik kita mati dari pada diperbudak bangsa asing” menunjukkan betapa buruk penjajahan itu.

Perang dan perlawanan terhadap penjajah Belanda yang dilakukan oleh rakyat Luwu di masa lampau, menempatkan mereka secara jelas dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan dan mengusir penjajah. Nilai-nilai patriotisme dan heroisme berpadu dengan harga diri dan kehormatan (*siri*) itulah yang tetap relevan setiap kali hari perlawanan rakyat Luwu diperingati. Peringatan hari perlawanan rakyat Luwu seyogianya menjadi momentum pemelihara ingatan tentang suatu harga diri dan kehormatan rakyat Luwu.

Momentum seperti itu, dengan sendirinya harus menjadi cermin bagi generasi berikutnya. Cermin bagi generasi pelanjut untuk memelihara spirit generasi pendahulu sekaligus secara kreatif melanggengkan spirit itu sesuai konteks zaman. Spirit masa lampau dihadirkan di masa sekarang seraya seoptimal mungkin melakukan yang terbaik. Jelasnya, spirit masa lampau harus menjadi parameter bagi generasi sekarang untuk menghadirkan karya-karya nyata.

23 Januari sebagai pemelihara ingatan bagi rakyat Luwu menghadirkan “ruang” munculnya inspirasi. Inspirasi bagi pemimpin dan rakyat Luwu untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran,

seperti terkandung dalam ungkapan Luwu “Wanua mappatuwo naewai alena”. Sebagai pemelihara ingatan, setiap kali 23 Januari diperingati, berarti selalu ada pertanyaan “Apa yang telah pemimpin dan rakyat Luwu lakukan untuk negeri-kampung halamannya?”. Pertanyaan dan tuntutan akan suatu karya yang juga bisa menjadi “pemelihara ingatan” bagi generasi berikutnya.

Di masa sekarang, saat memperingati 23 Januari, kita tidak lagi memanggul senjata untuk berperang menghadapi penjajahan dalam arti fisik. Perang kita, memanggul segenap potensi yang kita miliki berperang menghadapi berbagai keterbelakangan dan ketertinggalan. Kita berada pada suatu situasi yang tidak hanya menuntut kemampuan untuk berkompetisi, tetapi juga kemampuan untuk berkreasi. Berkreasi untuk kesejahteraan dan kemakmuran banyak pihak, bagi rakyat.

Kalau kata-kata Andi Tadda “Mati hanya sekali, oleh sebab itu berusaha supaya kita mati dalam membela kebenaran, dalam membela negeri dan kampung halaman kita”, dipandang masih relevan, mungkin dapat ditambahkan dengan ungkapan berbeda “Hidup di dunia pun hanya sekali, oleh sebab itu berusaha kita hidup dalam membela kebenaran, dalam membela negeri dan kampung halaman kita, dan memakmurkan rakyat.” Salah satu upaya strategis yang bisa dilakukan untuk itu adalah terbentuknya propinsi Luwu.

Boleh jadi perjuangan mewujudkan propinsi Luwu merupakan karya generasi sekarang untuk menambah daftar “pemelihara ingatan” bagi generasi berikutnya. Bukan sebagai upaya membentuk “negara” dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan propinsi Luwu harus dimaknai sebagai kristalisasi komitmen rakyat Luwu untuk menyejahterakan dan memakmurkan negeri-kampung halamannya, yang pada hakikatnya sejalan dengan tujuan negara Indonesia. Sehingga, propinsi Luwu yang hendak kita wujudkan itu, seyogianya

dipahami sebagai bagian tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera di masa depan.

7. Motto Luwu dari Beriman ke Sejuk Bersinar

Saya tertarik membaca Palopo Pos (Rabu, 25 Agustus 2004) halaman depan yang memuat judul berita: "Sejuk Bersinar, Motto Baru Luwu". Dikemukakan motto baru tersebut perubahan dari motto Luwu Beriman. Perubahan motto ini, demikian kata H. Abdullah Sulung (Ketua Komisi A DPRD Luwu), akan lebih memperluas perubahan positif dalam pandangan-pandangan mengenai Luwu dan merupakan bentuk pemikiran-pemikiran yang diusung dari berbagai pihak. Demikian pula, menurutnya, perubahan ini tidak berarti menanggalkan nilai religius masyarakat Luwu.

Keterarikan saya muncul disebabkan adanya hubungan secara historis-psikologis saya dengan motto Luwu Beriman. Seingat saya motto Luwu Beriman lahir ketika Palopo baru berstatus Kota Administratif, belasan tahun lampau tatkala saya masih mahasiswa di IAIN (STAIN) Palopo. Motto Luwu Beriman ini cukup intens menjadi materi ceramah, khutbah jumat, dan khutbah hari raya. Ketika itu, terasa benar nilai aktualitas yang terkandung dalam motto Luwu Beriman sekaitan dengan status Palopo sebagai kota (administratif), upaya meraih piala Adipura, dan lebih mendasar, mengingat masyarakat Luwu adalah masyarakat religis.

Motto Luwu Beriman memuat sejumlah makna yang memadai menjadi acuan pelaksanaan pembangunan di Luwu. Dari segi kata, "Beriman" antara lain dimaknai adanya harapan agar pemerintah dan warga Luwu selalu berupaya berpegang pada nilai-nilai religi dan mengaplikasikannya dalam segenap proses pembangunan. Di sini harus dipahami kata "iman" itu lebih berkonotasi kata kerja sehingga

beriman itu tidaklah cukup hanya dengan kata-kata. Sebagai akronim, "Beriman" merupakan paduan kata-kata "Bersih, Indah, Aman, dan Nyaman". Kata-kata ini sekaligus menunjukkan wujud daerah (kabupaten) yang menjadi harapan masyarakat. Dengan begitu, meski cukup sederhana, motto Luwu Beriman menggambarkan visi perenial umat manusia, bukan hanya bagi masyarakat Luwu.

Bukan menolak, tetapi hemat saya, motto Luwu yang baru "Sejuk Bersinar" telah kehilangan nilai fundamental filosofisnya. Selain itu, tidak hemat kata-kata, akibatnya tidak komunikatif dan sulit membayangkan bagaimana masyarakat bisa memahaminya. Saya menghitung ada tigabelas kata dalam motto "Sejuk Bersinar", yaitu: Sejahtera (S), Efisien (E), Jujur (J), Ulet (U), Kompak (K), dan Bersih (B), Elok (E), Rapih (R), Sehat (S), Indah (I), Nyaman (N), Aman (A), dan Religius (R). Kata-kata yang amat banyak ini, justru bisa mengakibatkan keaburan makna dan visi, belum lagi memang ada kata yang pada dasarnya memiliki makna yang sama, misalnya kata Elok (E) dan Indah (I).

Hemat saya, seandainya masih bisa diterima -belum berada pada posisi *point of no return* (tidak bisa balik lagi)- ada baiknya motto Luwu Beriman tetap dipertahankan. Pertimbangan-pertimbangannya, antara lain: *pertama*, nilai fundamental-filosofis motto "Luwu Beriman" masih lebih unggul dibanding motto Luwu "Sejuk Bersinar"; *kedua*, energi yang selama ini dikeluarkan untuk mensosialisasikan motto "Luwu Beriman". Dengan motto baru, yang notabene biasa-biasa saja, kita memulai dari nol lagi. Berapa banyak waktu dan tenaga diperlukan untuk sosialisasi ke masyarakat?; *ketiga*, lebih baik motto "Luwu Beriman" semakin diteguhkan melalui reinterpretasi, revitalisasi, fungsionalisasi, dan atau istilah yang lebih enteng "*rejuvenasi*" (peremajaan).

Apalah artinya sebuah motto, apalagi kalau hanya sebatas kata-kata! Lain halnya, jika motto itu memang telah menjadi kesadaran ideologis dan aksi (*ideological and action consciousness*), -motto itu telah mewarnai segenap dimensi kehidupan-. Bagi saya, sekarang ini kita tidak butuh perubahan, apalagi sekadar perubahan motto (kata-kata), capek menunggu perubahan! Kita membutuhkan pergantian rezim, kita butuh rezim yang lebih baik!

8. *Good Governance*, RAPBD dan Kemiskinan

Salah satu tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah bagaimana mewujudkan *good governance* yang berarti tata pemerintahan yang baik. *Good governance* diperlukan untuk mengawal reformasi berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara, mau tak mau, meniscayakan terwujudnya *good governance*. Karena, pengalaman selama ini menunjukkan krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya *good governance*.

Good governance diharapkan bisa terwujud di semua jenjang dan lini pemerintahan. Kalau begitu, *good governance* harus menjadi gerakan semesta didukung berbagai komponen baik pemerintah, swasta maupun rakyat. Untuk menuju ke sana terlebih dahulu harus dibangun pemahaman mengenai *good governance* itu sendiri dan mengapa kita memerlukannya. Berangkat dari pemahaman tersebut diharapkan bisa terbangun komitmen bersama yang kuat untuk mewujudkannya.

Istilah "governance", menurut Miftah Thoha (2003), menunjukkan suatu proses di mana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan

untuk kesejahteraan mereka. Di sini, tampak bahwa kemampuan suatu negara mencapai tujuan-tujuan pembangunan sangat tergantung pada kualitas tata pemerintahannya di dalam interaksinya dengan organisasi swasta (bisnis) dan rakyat (*civil society*).

Tata pemerintahan yang baik itu, urai Miftah, merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen, yakni pemerintah, rakyat dan usahawan di sektor swasta. Ketiga komponen itu mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat. Kesamaan derajat ini akan sangat berpengaruh terhadap upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Sementara itu, UNDP (1997) mendefinisikan *good governance* sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan sektor swasta. Dan, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik itu perlu dibangun dialog antar pelaku penting dalam negara, agar semua pihak merasa memiliki tata pemerintahan tersebut. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari dialog ini, kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat tersumbat.

Adapun prinsip-prinsip *good governance*: (1) mengikutsertakan semua (partisipasi); (2) transparan dan bertanggungjawab; (3) efektif dan adil; (4) menjamin adanya supremasi hukum; (5) menjamin prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat; (6) memerhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan; (7) visi strategis pemimpin serta masyarakat yang mampu melihat jauh ke depan atas pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia (Fathullah, 2004).

Sejalan dengan pengertian dan prinsip-prinsip di atas, dapat dikatakan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang baik dalam ukuran proses maupun hasil-hasilnya (Ubaidillah, 2003). Dengan begitu, semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat dan lepas dari gerakan-gerakan anarkhis yang bisa menghambat proses dan lajunya pembangunan.

Pembangunan juga bisa dikatakan baik jika pembangunan itu dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal menuju cita kesejahteraan dan kemakmuran sebagai basis model dari pemerintahan. Pemerintahan itu dapat dikatakan baik, jika produktif dan memperhatikan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi rakyat meningkat baik dalam aspek produktivitas maupun dalam daya belinya, kesejahteraan spiritualnya terus meningkat dengan indikasi rasa aman, tenang, dan bahagia serta *sense of nationality* yang baik.

Untuk mewujudkan cita *good governance* sebagaimana telah dipaparkan di atas, setidaknya harus dilakukan 5 aspek prioritas, yakni: (1) penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan; (2) kemandirian lembaga peradilan; (3) aparaturnya pemerintah yang profesional dan penuh integritas; (4) masyarakat madani yang kuat dan partisipatif; dan (5) penguatan upaya otonomi daerah. Selain itu, kelima aspek prioritas ini perlu didukung oleh iklim usaha sehat yang menjamin berlangsungnya roda perekonomian dengan baik.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Daerah maupun Negara (RAPBN) yang diajukan pemerintah dan dibahas di lembaga legislatif dapat digunakan untuk menilai aspek *good governance*. Angka-angka yang tercantum dalam RAPBD/N mencerminkan tingkat keseriusan bagi perwujudan *good governance*, tidak semata-mata menyajikan program-program yang menjadi rencana dan prioritas pemerintah. Bahkan, juga dapat dijadikan acuan untuk menilai apakah

pemerintah memiliki *political will* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pada saat yang sama, mengurangi tingkat kemiskinan.

Good governance yang pada dasarnya merupakan suatu keadaan yang memungkinkan terciptanya interaksi seimbang, sejajar, dan sinergis antara pemerintah, kelompok bisnis (swasta), dan masyarakat madani dikatakan terwujud dalam RAPBD manakala RAPBD yang diajukan mencerminkan aspirasi ketiga unsur *good governance* tersebut. Untuk itu, diperlukan kesepahaman mengenai aspek-aspek mana dari kebijakan sektor pembangunan yang prioritasnya sejalan dengan *good governance*.

Uraian di atas menunjukkan, upaya pengurangan kemiskinan terkait erat pula dengan *good governance* dan RAPBD. Masalahnya, bagaimana membaca sebuah RAPBD sebagai sebuah RAPBD yang memenuhi prinsip *good governance*? Jawabannya tentu tidaklah terlalu sulit. Indikatornya bisa ditemukan pada angka-angka dan prioritas sektor pembangunan yang direncanakannya. Jika, sektor pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dianggap sebagai aspek yang paling prioritas bagi upaya pengurangan kemiskinan, maka RAPBD yang memenuhi prinsip *good governance* adalah RAPBD yang memberi prioritas pada ketiga sektor pembangunan tersebut.

Laporan badan dunia mengenai jumlah penduduk miskin Indonesia yang sekarang ini masih mencapai angka 110 juta orang, seyogianya mendorong para pengambil kebijakan untuk merancang program pembangunan yang bisa mengurangi tingkat kemiskinan tersebut. Kemiskinan, seperti tersebut di atas, adalah sebuah ironi bagi sebuah negeri yang begitu kaya sumber daya alamnya, bahkan dapat dikatakan sebagai sebuah tragedi! Sekali lagi, untuk mengurangi kemiskinan itu langkah yang paling strategis adalah dengan memberikan prioritas pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur

pembangunan, terutama yang membuka akses bagi daerah-daerah terpencil untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

9. M. Jusuf Kalla di Kancah Politik Nusantara

Kehadiran Jusuf Kalla (populer disebut JK) di kancah politik nusantara beberapa tahun belakangan, sejak dari posisi sebagai menteri kabinet, hingga sekarang ini, sebagai wapres, menarik untuk dicermati. Profil JK, yang berasal dari SulSel boleh dikatakan merepresentasikan kawasan yang lebih luas, bagian timur Indonesia. Suatu kawasan yang seringkali dipandang tertinggal dari banyak segi dari kawasan barat. Nilai plus yang dihadirkan JK, berupa deklarasi politik bahwa tampuk kekuasaan tidak hanya bisa dipegang orang-orang dari kawasan barat. Dan, bahwa memegang tampuk kekuasaan bukan hal yang susah-susah amat. Bahkan seorang dari latar "saudagar" pun mampu.

Kesan dan pengamatan sepintas, sebagai tertuang dalam tulisan ini, jelas tidak memadai untuk menggambarkan secara utuh seorang JK. Tidak pula dimaksudkan untuk menonjolkannya semata-mata di antara para pemimpin negeri, seperti Soesilo Bambang Yudhoyono, Amien Rais, Megawati, Gus Dur, Sri Sultan Hamengkubowono X, Hidayat Nurwahid, Wiranto, dan lainnya. Dengan begitu, hadirnya tulisan ini pun tidak akan menghalangi saya untuk suatu waktu, menulis pemimpin negeri yang lain.

Yusuf Sulawesi Selatan

Di SulSel ada beberapa tokoh Yusuf yang menusanantara. Mereka itu, di antaranya: Syekh Yusuf al-Makassari sebagai "To Panrita" (ulama), Panglima Jusuf (Jenderal) sebagai "To Warani" (pemberani), B. Jusuf Habibie sebagai "To Acca" (cendekiawan), dan Jusuf Kalla sebagai "To Sugi" (orang kaya). Mereka semua, umumnya

bagi kalangan warga Sulawesi Selatan dipandang memiliki keistimewaan masing-masing.

Pertama, Syekh Yusuf al-Makassari, adalah ulama besar Indonesia yang juga dikenal sebagai Sufi bergelar "Taj al-Khalwati" dan sekaligus pejuang. Di Makassar, dia juga digelar "Tuanta Salamaka". Sebagai ulama, dia tidak hanya menguasai ilmu agama Islam, tetapi juga menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap nasib umat. Bersama Sultan Agung Tirtayasa, Syekh Yusuf berjuang melawan kolonial Belanda. Sehingga, dia akhirnya ditawan Belanda dan dibuang ke Sri Lanka, lalu selanjutnya ke Afrika Selatan (1694). Menurut Azyumardi Azra (2002), meski menjadi "orang buangan", Syekh Yusuf disebut dalam sumber-sumber sejarah Afrika Selatan sebagai "*The founder of Islam in South Africa*".

Kedua, Jenderal TNI M. Jusuf, populer disebut di kalangan masyarakat Sulsel sebagai Panglima atau Jenderal Jusuf. Tokoh Jusuf yang kedua ini digelar "To Warani" berarti orang berani (pemberani). Gelar ini diberikan kepada M. Jusuf terkait profesinya sebagai tentara, simbol profesi orang berani. Terlebih, M. Jusuf adalah jenderal yang kemudian menjadi Menhankam/Pangab di masa Presiden Soeharto. Saya sejak kecil mengetahui Panglima Jusuf dari cerita-cerita warga. Saya ingat, antara lain isi cerita itu bahwa dia termasuk pimpinan ABRI yang sangat peduli terhadap nasib bawahan dan sangat menjunjung tinggi dan menghargai kedisiplinan.

Ketiga, B. Jusuf Habibie, teknokrat-cendekiawan Muslim terkemuka Indonesia kelahiran Pare-Pare Sulsel, menjabat menteri sekian periode, lalu menjadi wakil presiden di era Soeharto. Setelah itu, Jusuf Habibie kemudian menjadi presiden menggantikan Soeharto yang lengser ke prabon. Habibie disebut "To Acca" (orang pintar-cendekia) karena keahliannya di bidang Iptek, khususnya teknologi dirgantara. Habibie pun sangat populer di Sulsel karena kepintarannya

tersebut. Sehingga, meski pertanggungjawabannya ditolak oleh (skenario) MPR, tetapi di sejumlah desa di SulSel, kabarnya ada partai politik yang bisa meraih suara 100% (Pemilu 1999) karena menjual kepopuleran nama Jusuf Habibie.

Tokoh Yusuf keempat, Jusuf Kalla. Di kalangan masyarakat SulSel terkenal sebagai pengusaha (istilah penulis-penulis di surat kabar, saudagar) yang sukses. Diketahui usahanya itu adalah rintisan bapaknya, H. Kalla. Tetapi, kemudian maju dan berkembang pesat di tangan Jusuf Kalla bersaudara. Jusuf Kalla dikenal dan dekat dengan masyarakat SulSel, selain karena usahanya itu bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat (transportasi), tak kalah pentingnya adalah kontribusi beliau di bidang sosial, agama dan pendidikan.

Tokoh-tokoh Yusuf SulSel di atas, memperlihatkan keterlibatan masyarakat SulSel dalam tatanan politik nusantara sudah sejak lama dalam beragam bidang. Syekh Yusuf dalam bidang agama plus sebagai pejuang, Jenderal Jusuf dalam bidang pertahanan-keamanan, Jusuf Habibie dalam bidang Iptek plus sebagai wapres kemudian presiden, dan JK dalam bidang ekonomi sebagai pengusaha lalu menjadi wapres.

Posisi dan Aksi Politik JK

Realitas politik belakangan ini, menunjukkan JK adalah salah satu figur elit politik yang memiliki peran dan posisi amat penting, sebagai seorang wapres yang juga ketua umum partai GOLKAR. Dibandingkan dengan wapres era sebelumnya, terutama di era rezim Soeharto, JK sebagai wapres SBY memiliki kewenangan yang lebih luas dan menentukan. Dengan kewenangan itu, JK sekaligus memiliki kesempatan untuk mengambil peran, inisiatif, dan kebijakan terkait dengan pemerintahan dan pembangunan, termasuk dalam masalah-masalah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karena kuatnya peran

dan posisi JK ini, sehingga ada nada-nada sumbang yang menyatakan JK dan SBY adalah “matahari kembar”.

Aksi politik JK oleh Profesor Riswandha Imawan (Kompas, 4/7/06) dinilai telah menghadirkan dua nakhoda dengan pola tindak berbeda. Keadaan ini menurut Riswandha mengakibatkan pelayaran pemerintahan sering tertumbuk batu karang. Intensitasnya meninggi, hingga khawatir kapal tenggelam sebelum sampai ke tujuan. Hasilnya, tulis Riswandha, negara salah kaprah. Lebih lanjut, Riswandha mengatakan tidak imbang dan tidak sinkronnya tindakan SBY-JK membuat kombinasi kepemimpinan nasional berbasis militer-pedagang ini merekonstruksi semangat kumpeni. Kisah masuknya VOC abad ke 15-16 dengan membawa kepentingan para kapitalis, menurut Riswanda, terulang lagi. Semua urusan publik dilihat sebagai komoditas ekonomi dengan semangat dominasi oleh negara.

Berada pada posisi puncak ini, mau tak mau, JK selalu menjadi sasaran kritik berbagai kalangan. Dalam catatan saya, hingga sekarang, kritik-kritik terhadap JK masih dapat dijumpai di media massa tertentu. Untuk menyebut contoh, tayangan perdana Republik BBM (Benar-Benar Membangun) di RCTI, Senin 16 Pebruari 2009, masih menunjukkan kesan kuat adanya kritik itu terhadap JK. Hemat saya, berbagai kritik terhadap JK dalam konteks demokrasi merupakan hal wajar dan sah-sah saja. Kritik, apapun bentuknya, apalagi kalau konstruktif tentu harus diterima dengan lapang dada. Dan, kritik pada dasarnya tidaklah akan membuat seseorang jatuh "nilai"nya sepanjang disikapi secara tanggap dan bijaksana.

“The Real” atau “Becoming” President?

Syafi'i Ma'arif (2008) menyebut JK sebagai “*The Real President*”. Kita boleh setuju atau tidak dengan pendapat Syafi'i Ma'arif. Namun, pendapat Syafi'i Ma'arif tampak ada benarnya jika kita melihat peran dan posisi menentukan yang dilakonkan JK sebagai wapres.

Dihubungkan dengan Pemilu 2009, bukan mustahil JK bisa menjadi (*becoming*) presiden Republik Indonesia yang ketujuh. Jadi, tidak lagi “*The Real President*” dalam arti wapres yang bekerja layaknya seorang presiden. Tak ada yang tak mungkin dalam politik! Sebab, salah satu arti politik adalah seni mengubah yang tak mungkin menjadi mungkin. Pemilu 2009 akan menjawabnya. “*Salama’ko*”, saya ingin balik mengucapkan kata-kata JK ini kepada saya dalam suatu kesempatan silaturahmi KAHMI di Istana Bogor beberapa waktu lalu (2008).

10. Nakhoda Palopo 5 Tahun ke Depan (Sebuah Pesan Kepemimpinan)

Seolah membenarkan slogannya menjelang pemilihan walikota, “Bukan cerita tapi realita!”. Terbukti kemudian, HPA Tenriajeng terpilih kembali memimpin Palopo untuk masa lima tahun ke depan. Rakyat memilih Tenriajeng bersama Rahmat berarti mereka berdua mendapat kepercayaan untuk mengelola “nasib” dan “kehidupan” warga Palopo. Terpilihnya mereka berdua berarti pula rakyat percaya mereka mampu membawa Palopo ke arah yang lebih baik. Konsekuensinya, kepercayaan rakyat kini telah menjadi tanggung jawab di pundak mereka. Dan, sebagaimana lazimnya sebuah tanggung jawab selalu mendapat penilaian vertikal dan horizontal. Vertikal struktural oleh level pemimpin yang lebih tinggi; vertikal transendental oleh yang Maha Penilai dan horizontal oleh level struktural setara; horizontal oleh sesama manusia (rakyat). Apapun, Tenriajeng episode pertama telah berhasil.

Tak ubahnya sebuah kapal dengan nakhodanya atau pesawat dengan pilotnya, daerah atau kota pun dapat disandingkan dengan pemimpinnya. Jika kecelakaan pesawat selalu dihubungkan dengan *human error* (faktor manusia-pilot), pesawatnya sendiri, dan faktor alam

(eksternal-cuaca), maka mengambil analogi ini, ketidakberhasilan suatu daerah juga dapat dikatakan disebabkan *human error* (elit pemimpin), masyarakat sendiri, dan faktor eksternal (tantangan ekonomi, sosial, politik, dan budaya dalam berbagai tingkat). Kelambanan atau ketidakturunan suatu daerah, dengan demikian, dapat ditelusuri sebab-sebabnya dari faktor-faktor tersebut. Tetapi, ini tidak berarti bagi pemimpin ada alasan untuk membenarkan kegagalannya. Satu-satunya jalan bagi pemimpin yang gagal adalah sikap legowo untuk mundur dan bertobat! Bukannya malah tetap duduk di kursi di ruang ber-AC *full facility*, tanpa beban, menghitung hari sembari sesekali meminta laporan kehadiran pegawai, kunjungan kerja, inspeksi mendadak, misalnya, dan hanya itu!? Sebuah kondisi ketika pemimpin telah kehilangan visinya.

Tidak banyak celah tersedia untuk mengatakan kedua pemimpin terpilih Palopo tidak mampu berbuat yang terbaik. Alasan mudahnya, walikota terpilih adalah orang yang sebelumnya berpengalaman dalam jabatan yang sama. Sementara, wakilnya adalah orang yang sebelumnya menjadi mitra walikota, sebagai Ketua DPRD. Suatu perpaduan serasi dan ideal, karena merupakan paduan dengan latar belakang top eksekutif dan top legislatif. Tampaknya, masalah utama yang dihadapi akan berada di sekitar penempatan pelaksana di tingkat bawah dan koordinasi dengan pihak-pihak berkepentingan. Masalah menyusul berikutnya menyangkut penetapan prioritas program yang akan dilaksanakan. Di luar semua itu, tantangan lainnya bagi walikota bagaimana menepis mitos priode kedua berada pada situasi aji mumpung.

Kepemimpinan apa pun bentuk, nama atau cirinya, dan ditinjau dari sudut pandang mana pun selalu harus berlandaskan kebajikan dan kemaslahatan, serta mengantar kepada kemajuan. Kepemimpinan, kata Quraish Shihab (2006), antara lain: harus dapat

menentukan arah, menciptakan peluang, dan melahirkan hal-hal baru melalui inovasi pemimpin yang kesemuanya menuntut kemampuan inisiatif, kreatif, dan dinamika berpikir. Seorang pemimpin berbeda dari seorang manajer. Manajer, antara lain: bersifat reaktif dan responsif terhadap perubahan dan masalah yang dihadapinya, sedang pemimpin bersifat proaktif dan visioner, prediktif, menciptakan dan membentuk perubahan. Manajer sangat peduli untuk mengerjakan sesuatu dengan benar (*doing the thing right*), sementara pemimpin lebih peduli untuk mengerjakan sesuatu yang benar (*doing the right thing*).

Nabi Muhammad saw. mengingatkan semua pejabat dari yang terendah hingga yang tertinggi, “*Jabatan adalah amanah dan ia akan menjadi kenistaan dan penyesalan di hari kemudian kecuali yang menerimanya dengan baik serta menunaikannya dengan baik*”. Berdasar hadits ini, Quraish Shihab menyatakan akan menyesal bahkan celakalah seseorang yang dianugerahi amanah memelihara harta dan masyarakat, tetapi dia menghamburkan harta dan menelantarkan masyarakat. Dari sini, agama mengingatkan kepemimpinan bukan keistimewaan tetapi tanggung jawab, ia bukan fasilitas tetapi pengorbanan; ia bukan leha-leha tetapi kerja keras; ia juga bukan kesewenangan bertindak tetapi kewenangan melayani. Selanjutnya ia adalah kepeloporan dan keteladanan berbuat.

Pemimpin bagaikan kalbu di tengah anggota badan, aktivitas menjadi baik dengan baiknya kalbu dan buruk dengan buruknya kalbu; masyarakat menjadi baik karena baiknya pemimpin, dan menjadi buruk karena kebejatanya. Pemimpin adalah penegak segala yang roboh, pelurus segala yang bengkok. Dia adalah kekuatan bagi semua yang lemah, tempat berlindung semua yang takut, serta keadilan bagi siapa pun yang teraniaya. Yang lemah, di sisinya kuat, sehingga si lemah memperoleh haknya yang direbut si kuat, dan yang kuat

menjadi lemah, sampai hak orang lain yang ada padanya dikembalikan kepada pemiliknya.

Selanjutnya menurut Quraish Shihab, pemimpin seperti ibu dan ayah sekaligus. Laksana ibu yang sayang dan lemah lembut terhadap buah hatinya. Anak dikandungnya dalam keadaan letih, dan dilahirkannya dalam keadaan sulit. Sejak kecil ibu memeliharanya, menahan kantuk bila anaknya tak tidur, dan menahan suara bila anaknya tertidur. Sesekali dibelainya dengan menyusukannya, dan di kali lain disapuhnya, dengan berat hati. Dia bergembira memandangi kebugarannya, dan bersedih mendengar keluhannya. Pemimpin juga laksana ayah yang amat kasih terhadap anaknya, bersusah payah buat mereka yang kecil, dan senantiasa mengajar hingga mereka dewasa. Dia bekerja untuk kepentingan anak-anaknya selama hayat di kandung badan sambil menabung guna digunakan setelah kematiannya.

Masih menurut Quraish Shihab, ketika dia menulis “Pesan untuk Kepala Negara”. Pemimpin, pesan Quraish Shihab, harus pandai memilih pembantu-pembantunya. Jika Tuhan menghendaki kebaikan bagi seorang pemimpin, maka dia akan didorong untuk memilih pembantunya yang terbaik dan sebaliknya pun demikian. Sabda Nabi saw. *“Siapa yang menetapkan seseorang untuk satu jabatan padahal dia mengetahui ada yang lebih baik darinya, maka dia telah mengkhianati Allah, Rasul, dan amanah kaum Muslim”*. Karena itu, pertimbangan utama pengangkatan bukan karena kedekatan pribadi dan loyalitasnya. Angkatlah mereka yang memiliki kecerdasan, pengalaman, pengetahuan menyangkut tugasnya, serta perhatian kepada masyarakat.

Selain itu, pesan Quraish Shihab mengutip pesan Nabi saw. kepada Ali bin Abi Thalib r.a., “Perbanyaklah musyawarah dengan mendorong setiap orang menyampaikan pendapatnya. Jangan memberi kesan apalagi bertindak yang mengantar ke arah

tersumbatnya suara. Tetapi, jangan bermusyawarah dengan penakut, karena dia mempersempit jalan keluar, jangan juga dengan yang kikir, karena dia menghambat Anda ke tujuan. Juga jangan dengan yang ambisius, karena dia dapat memperindah buat Anda sesuatu yang buruk”. Meskipun, harus diakui mendengar pendapat berbeda tidak selalu mudah.

Pesan kepemimpinan ini, walaupun ingin disebut demikian dan wajar ditujukan buat pemimpin Kota Palopo, sekaliber Tenriajeng dan Rahmat, ia pada dasarnya lebih merupakan harapan dari seorang warga kepada pemimpinnya. Walaupun tetap ingin disebut sebagai pesan, ia pun hanyalah mengingatkan. Sebab, seorang Muslim berkewajiban untuk selalu ingat-mengingat. Artinya pula, pesan ini juga ditujukan bagi setiap orang, karena pada dasarnya setiap orang, paling tidak, adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Boleh jadi, penulis sendiri lebih wajar mendapatkan pesan ini terlebih dahulu.

11. Pilkada Damai dan Bermartabat di Luwu (Implementasi Nilai-Nilai Keluwuan)

Kabupaten Luwu merupakan kabupaten tertua di Tana Luwu. Pecahannya berturut-turut Luwu Utara, Palopo, dan Luwu Timur. Semoga menyusul Luwu Tengah sehingga target berikut bagi segenap Wija To Luwu adalah Propinsi Luwu, seperti sering diwacanakan dengan aksi-aksi terbatas, untuk tidak mengatakan setengah hati. Wilayah Luwu dahulu sebelum pemekaran sering disebut Luwu Selatan dan orang-orang yang berasal dari wilayah ini disebut sebagai orang selatan (*to selatan, to sule selatan*), termasuk penulis. Memasuki wilayah Tana Luwu, yang bentangannya mengikuti jalan poros propinsi mungkin sekitar 200 sampai 300-an kilometer, wilayah Kabupaten Luwu lah yang paling pertama dijumpai. Wilayah

ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Wajo, apabila menyusuri jalan poros dari Makassar. Di pintu gerbang perbatasan, tertulis ucapan “Selamat Datang di Bumi Sawerigading”.

Meski Kabupaten Luwu merupakan kabupaten tertua, dari segi infrastruktur hakikatnya kurang-lebih sama dengan daerah pemekaran baru. Sebab, infrastruktur utama berada di Kota Palopo, belum menimbang kekayaan sumber daya alam Luwu sebelumnya, seperti industri tambang nikel di Sorowako, yang kini masuk wilayah Luwu Timur. Praktis tiga-empat tahun terakhir ini Luwu baru memulai membangun menuju daerah kabupaten yang sesungguhnya. Dari sini tampak masih butuh beberapa pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk mewujudkan Luwu sebagai kabupaten yang *MAPPATUWO NAEWAI ALENA*. Hal ini terutama kalau andalan pembangunan Luwu mengacu kepada seberapa besar dana alokasi umum (DAU) yang diterima setiap tahun. Dengan DAU terbatas apalagi di tengah labilnya harga minyak dunia yang berpengaruh terhadap APBN/APBD dan stabilitas ekonomi, bisa diprediksi keterbatasan kemampuan Luwu membangun.

Kondisi seperti di atas, rupanya tidak menyurutkan nyali sebagian orang untuk mencalonkan diri menjadi calon bupati dan wakil bupati. Sudah tentu, mereka yang bernyali ini patut mendapatkan apresiasi dan ucapan terima kasih. Karena mereka mau memikirkan dan berkorban untuk Luwu yang kita sebut baru membangun itu. Keinginan mereka itu harus difasilitasi dengan prosedur Pilkada yang jujur, adil, demokratis, dan terbuka. Berkaitan dengan ini, secara otomatis menjadi tanggung jawab partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan masyarakat. Bahkan juga, tokoh-tokoh agama, pendidik, adat, dan hingga aparat negara. Tanpa prosedur seperti itu, sulit mewujudkan Pilkada damai dan bermartabat. Peran berbagai komponen disertai dengan komitmen yang baik itulah yang diharapkan

bisa terlihat sebelum, selama dan sesudah Pilkada Luwu. Niat dan kepentingan tidak merusak rasa dan nilai-nilai “keluwuan”.

Mencapai kedudukan sebagai bupati dan wakil bupati seyogianya dipahami dan diyakini bukanlah persoalan hidup atau mati. Sehingga harus disertai dengan berbagai macam cara yang bertentangan dengan nilai-nilai “keluwuan”. Politik tidak berarti harus menempuh cara-cara Machiavelis, yang mengajarkan doktrin politik tujuan menghalalkan cara. Masih terbentang cara-cara elegan menuju kekuasaan politik, hanya sayang kita (termasuk para politisi) biasanya kurang sabar. Kekurangsabaran kita itulah yang seringkali mendorong untuk melakukan tindakan jauh dari *fatsoen* politik bermoral bahkan memungkinkan disertai kekerasan dalam berbagai bentuknya. Ketika ini terjadi, lebih gawat lagi kita lupa bahwa kita sama-sama warga masyarakat yang mestinya saling membantu, kasih, dan sayang. Memang repot, ketika politik dianggap bukan lagi sebagai pengabdian kepada Tuhan dan untuk sesama hidup. Kekeliruan besar kalau ada anggapan politik berarti identik dengan kebolehan berlaku curang dan licik. Yang terakhir ini, sudah harus ditinggalkan. Kita sampaikan rasa kasihan dan iba bagi yang masih mengamalkannya. Sebaliknya, ucapan selamat bagi mereka yang sudah memerdekakan dirinya dari kekeliruan itu.

Andre Gurutta Profesor Iskandar pernah menyitir ungkapan bahwa yang dinamakan orang Luwu, orang yang *madeceng ampena na madecetto abbatiremma*. Sebuah identifikasi yang sangat menekankan pentingnya dimensi akhlak dan keteladanan aksi tingkah laku. Jika identifikasi ini disepakati dijadikan nilai dasar keluwuan warga, masalah berikutnya yang cukup sulit adalah bagaimana menjabarkannya dalam kehidupan masyarakat dalam berbagai dimensinya. Dengan kata lain, nilai tersebut menjadi pedoman tingkah laku. Sebagai pedoman, ia menjadi rambu-rambu warga dalam berinteraksi satu sama lain,

termasuk dalam proses-proses politik, misalnya Pilkada. Kalau nilai ini menjadi acuan, yang akan menjadi target utama mereka yang berkompetisi bukanlah soal siapa menang siapa kalah, tetapi lebih tinggi dan mulia dari itu, berupa kelanggengan nilai-nilai budaya luhur yang bisa diteladani. Kondisi ini memang penuh tantangan untuk mewujudkannya, tetapi kita harus optimis dengan dukungan nilai-nilai utama, seperti prinsip saling menghormati (*sipakataui*), saling mengingatkan (*sipakainge*), saling mengasihi (*sikamasei*), saling merindukan (*sikamali*), dan saling memberdayakan tidak sebaliknya (*sirui' menre tessirui' no*).

Sejalan dengan nilai-nilai keluwuan, sebagai dikemukakan beberapa di antaranya di atas, dalam hal etika politik sangat penting apa yang disebut dimensi keluhuran budi. Komitmen individual masing-masing orang pada nilai-nilai luhur, yang merupakan prakondisi pertama bagi masyarakat yang sehat, tidak boleh sekadar menjadi retorika dan pengetahuan semata. Tetapi, harus direalisasikan secara kongkrit ke dalam bentuk komitmen dan prilaku sosial dalam hidup bersama. Karena, komitmen pribadi pada nilai-nilai hidup yang luhur tidak akan mendatangkan makna yang berarti jika yang bersangkutan tidak mewujudkannya secara nyata dalam prilaku sehari-hari.

Nurcholish Madjid (2005 M), sang Guru Bangsa, mengingatkan pentingnya dimensi keluhuran budi dalam proses-proses politik. Baginya, keluhuran budi tidak hanya sekadar bermakna pribadi tetapi juga bermakna publik. Dalam hal ini, terutama seorang elit politik, harus memiliki moralitas pribadi (*personal morality*) dan moralitas publik (*civic morality*). Moralitas pribadi menunjuk pada kebaikan dan keluhuran yang berkaitan dengan sikap dan prilaku sebagai manusia, dan utamanya dalam hubungan vertikal dengan Tuhan. Sedangkan, moralitas publik adalah kebaikan dan keluhuran

sikap dan perilaku seseorang dalam hubungannya dengan kepentingan masyarakat banyak, sehingga lebih bersifat horizontal dengan sesama manusia. Dalam kaitan dengan posisi elit, moralitas publik diukur dari pemikiran, perilaku dan kebijakan yang diambil mempunyai implikasi positif atau negatif bagi kepentingan publik. Demikian pula halnya, apakah menguntungkan masyarakat banyak atau menguntungkan sekelompok kecil masyarakat, terutama yang dekat dengan elit kekuasaan. Pada akhirnya, pertanggungjawaban etis seorang pemimpin, tergantung pada kemampuan membedakan antara urusan pribadi dan umum, masalah privat dan publik.

Memasuki masa-masa menjelang Pilkada Luwu merupakan satu momen yang bisa menjadi indikator untuk menilai sejauh mana dimensi keluhuran budi, paling tidak, nilai-nilai utama keluwuan diwujudkan oleh berbagai komponen warga masyarakat. Keteladanan dan kepeloporan mereka yang menyebut dirinya pemimpin atau calon pemimpin, elit-elit partai politik, dan mereka yang terlibat diuji dan akan dinilai. Warga masyarakat patut berharap momen Pilkada Luwu bisa menjadi ajang kompetisi dan pembelajaran politik yang damai dan bermartabat. Para calon berkompetisi tetapi tetap dalam koridor nilai-nilai utama keluwuan, meminggirkan egoisme dan sektarianisme kelompok atau golongan, dan menghindari gontok-gontokkan apalagi saling menyinggung-melecehkan. Indikator keunggulan calon dilihat dari ide-ide dan tujuan (*platform*) yang diperjuangkan, bukan semata pertemanan apalagi kalkulasi untung-rugi material.

Semoga harapan bagi sebuah Pilkada Luwu yang damai dan bermartabat dapat terwujud. Dan, apapun hasilnya dapat diterima semua pihak.



BAGIAN KEEMPAT:
SYARIAT ISLAM
DAN REALITAS KEINDONESIAAN

IAIN PALOPO

1. Syari'at Islam di Bumi Pancasila

Membincang syari'at Islam dan eksistensinya di Indonesia merupakan persoalan yang menarik sekaligus menantang dan memang penting. Menarik dan menantang sebab hingga sekarang persoalan ini tetap menjadi perbincangan di hampir semua kalangan dan lapisan masyarakat. Penting, sebab ia berkaitan dengan aspirasi umat muslim di tengah kemajemukan (pluralitas) bangsa. Sehingga, pada dasarnya bukan hanya menyangkut umat muslim saja, tetapi juga umat lainnya. Karenanya, titik temu berbagai pandangan berbeda mengenai persoalan ini akan sangat menentukan perjalanan bangsa ke depan.

Indonesia dengan dasar dan falsafah negara Pancasila sudah final. Dengan kata lain, berbagai aspirasi meskipun berbeda harus tetap dibincang dalam bingkai Pancasila sebagai konsensus bagi bangsa Indonesia yang plural dari banyak segi (SARA). Hal ini juga mengandung arti bahwa berbagai perbincangan harus bertitik tolak dari konsensus tersebut. Dengan demikian, aspirasi dari berbagai kalangan tidak perlu dicurigai apalagi dihalangi. Yang diperlukan bagaimana aspirasi tersebut, meski berbeda-beda, bisa menemukan tempat persemaiannya di bumi Indonesia tanpa saling mengganggu, tetapi justru menampilkan warna-warni keindahannya. Hanya saja, tetap diperlukan pula keterbukaan dan ketulusan semua pihak.

Jika hal tersebut di atas disepakati, maka tuntutan pemberlakuan syari'at Islam seharusnya bisa berjalan tanpa ada kekhawatiran umat Islam akan membentuk negara Islam secara formal. Kekhawatiran itu sendiri, sekarang ini, tidak lagi berdasar paling tidak karena empat alasan: pertama, kerelaan umat Islam, di awal-awal kemerdekaan, menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta; kedua, keyakinan umat Islam bahwa upaya dan perjuangan

membentuk Negara Islam secara formal terbukti gagal; ketiga, bentuk negara dengan dasar Pancasila paling diterima mayoritas umat Islam sendiri; dan keempat, kedewasaan bangsa Indonesia dengan dukungan demokratisasi di berbagai sektor kehidupan.

Walaupun demikian, harus diakui bahwa selama ini interpretasi terhadap Pancasila didominasi oleh pihak penguasa. Keadaan ini menyebabkan Pancasila menjadi alat bagi penguasa untuk memuluskan kepentingan mereka. Dengan kata lain, Pancasila menjadi ideologi tertutup dengan interpretasi tunggal dari pemerintah. Keadaan ini berlangsung, baik di masa Orde Lama (Soekarno) maupun di masa Orde Baru (Soeharto). Akibatnya, elaborasi terhadap Pancasila dan bagaimana sebagai konsensus bangsa Indonesia dapat mewujudkan tidak terlaksana dengan baik. Bahkan, menimbulkan keraguan di benak sebagian rakyat bahwa Pancasila adalah pilihan dasar negara yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

Suasana yang demikian ini, menjadi tantangan bagi generasi sekarang untuk mereaktualisasikan Pancasila di tengah berbagai tuntutan rakyat, termasuk tuntutan pemberlakuan syari'at Islam. Dan, persoalan yang paling berat di sini, adalah bagaimana wujud pemberlakuan syari'at Islam itu?, apakah tuntutan itu akan berimplikasi pada perubahan bentuk negara?, dan apakah pemberlakuan syari'at Islam itu juga ditujukan bagi umat lainnya?. Masalah-masalah ini perlu dijernihkan sehingga tidak menimbulkan salah paham di kalangan bangsa Indonesia sendiri yang memang majemuk.

Bagi umat Islam pemberlakuan syari'at Islam merupakan wujud pelaksanaan kewajiban agama. Karena itu, mustahil bagi umat Islam menjadi penganut Islam yang baik manakala tidak melaksanakan syari'at Islam. Sejauh ini, pada dasarnya syari'at Islam itu telah dilaksanakan, baik bidang ibadah (hubungan vertikal manusia dengan Allah) maupun mu'amalah (hubungan horizontal dengan sesama

manusia). Meski, harus diakui di sana sini masih dijumpai adanya kekurangan. Sehingga, tuntutan pemberlakuan syari'at Islam seyogianya dipahami sebagai upaya untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut (menyem-purnakannya).

Sikap yang diharapkan dari umat lain adalah munculnya apresiasi dan dorongan bagi umat Islam untuk memperjuangkan terus tuntutan tersebut tanpa perlu merasa khawatir bahwa pemberlakuan syari'at Islam akan menjadi penghalang bagi umat lainnya untuk juga melaksanakan keyakinan agama mereka sendiri. Sebaliknya, umat Islam juga dituntut untuk menunjukkan sikap yang sama terhadap umat lainnya dalam melaksanakan keyakinan dan kewajiban agama mereka. Jika, sikap-sikap seperti ini tumbuh di kalangan bangsa Indonesia yang majemuk, maka terwujudlah apa yang kita sebut dengan "Bhinneka Tunggal Ika", berbeda tetapi tetap satu. Dengan demikian, aspirasi tuntutan pemberlakuan syari'at Islam bagi umat Islam maupun aspirasi keyakinan agama umat lainnya tidak akan berimplikasi pada disintegrasi bangsa.

Selain itu, diperlukan pula pemahaman bahwa tuntutan pemberlakuan syari'at Islam harus dibaca tidak hanya sejalan dengan upaya mengaktualkan Pancasila sebagai ideologi terbuka, tetapi juga sekaligus sebagai upaya untuk mengisinya. Ibarat rumah, Pancasila adalah kerangka bangunannya dan isinya adalah nilai-nilai yang digali dari kearifan keyakinan para warganya. Bagi umat Islam sendiri, tuntutan pemberlakuan syari'at Islam tidak lain untuk menunjukkan dan merealisasikan Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam. Hal mana, ada presedennya dalam sejarah, ketika Nabi Muhammad saw. membuat kesepakatan dengan para warganya di Madinah yang majemuk melalui suatu konsensus yang disebut Piagam Madinah.

2. Membangun Sistem Sosial Islami

Ada hal yang perlu dikritisi dari sikap keberagamaan (*religiosity*) umat Islam, yaitu sikap yang hanya cenderung mengamalkan dimensi vertikal (ibadah *kebassab*) ajaran Islam. Di sisi lain, dimensi horizontal (ibadah *'ammah*) kurang mendapatkan perhatian untuk diamalkan secara komprehensif dan berkesinambungan. Begitu kuatnya kecenderungan itu, sehingga tidak jarang ditemukan ada kalangan yang hanya fokus melaksanakan dimensi vertikal tertentu, tetapi kurang atau tidak peduli pada bagaimana mengejawantahkan nilai ajarannya dalam kehidupan nyata. Bahkan ada yang dengan bangga menceritakan telah berulang kali naik haji, nialnya, tanpaimbangan pada aspek ibadah sosialnya.

Dalam hal tersebut, bukankah kewajiban naik haji itu hanya satu kali seumur hidup bagi seorang Muslim? Dan, bukankah perjuangan untuk menciptakan kehidupan sosial itu adalah “jihad” yang tak kalah pentingnya dan wajib terus menerus diupayakan? Bukankah dengan berhaji berkali-kali secara tidak langsung telah membatasi kesempatan orang lain yang belum pernah melaksanakan? Apa kurangnya, misalnya, kalau dana untuk haji kita yang kesekian itu disumbangkan untuk kegiatan pemberdayaan umat? Akar masalah persoalan ini, oleh karena, kecenderungan kita mengedepankan kesalahan individu ketimbang kesalahan sosial.

Ironisnya, jumlah orang naik haji dan frekuensi pelaksanaannya tidak berkorelasi dengan peningkatan kualitas hidup. Tetap saja Indonesia menjadi negara terkorup. Keadaan ini, mau tidak mau, menimbulkan kegamangan orang pada agama. Apa yang salah pada agama? Kalau agama itu benar, dan memang demikian lah, bahwa agama itu baik dan benar. Maka, masalahnya tentu harus dilacak pada cara kita beragama, atau cara kita mengamalkan ajaran

agama. Dengan kata lain, kita perlu mengoreksi cara kita beragama. Ada indikasi kalau keberagamaan kita hanya berkuat pada hal-hal yang bersifat ritual-simbolistik. Lebih ironis lagi, keberagamaan kita tampak masih berputar di sekitar khitanan, syukuran, dan dalam penyelenggaraan jenazah.

Islam hadir dengan tujuan agar diamalkan bukan hanya untuk hal yang berkaitan dengan dimensi vertikal, tetapi agar juga terwujud dalam dimensi horizontal, yakni dalam kehidupan sosial manusia secara umum. Maka, pengamalan dimensi vertikal tanpa diimbangi dengan dimensi horizontal tidak menggambarkan Islam secara utuh. Ringkasnya, Islam mesti terwujud dalam dimensi kehidupan secara keseluruhan. Dan, hal ini juga berarti kurangnya aktivitas dalam membangun kehidupan sosial yang lebih baik mengindikasikan pula lemahnya keimanan dan ketaqwaan seorang Muslim.

Sistem sosial yang hendak dibangun Islam adalah sistem yang didasarkan pada ajaran tauhid. Tauhid berarti mengesakan “Tuhan”. Keesaan Tuhan melahirkan konsep kesatuan penciptaan, kesatuan tuntunan, kesatuan kemanusiaan, dan kesatuan tujuan hidup. Dengan ajaran tauhid, seorang Muslim memiliki visi yang benar dalam membangun diri dan hubungannya dengan lingkungan, sesama manusia, dan dengan Tuhannya. Dalam hal mana, bagi seorang Muslim tauhid adalah fundasi dan sekaligus orientasi hidup dan kehidupannya.

Konsep tauhid melahirkan ajaran persamaan. Islam mengajarkan semua manusia memiliki derajat dan kedudukan yang sama. Derajat dan kedudukan seseorang tidak ditentukan oleh suku bangsa, warna kulit, keturunan, dan jabatan maupun harta benda yang dimilikinya. Sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Quran, derajat dan kedudukan seseorang ditentukan berdasarkan ke”taqwa”an yang dimilikinya.

Sayangnya, taqwa seringkali dipahami hanya berkaitan dengan prestasi yang dicapai berkaitan dengan ibadah *kebassab*. Belum dipahami sebagai prestasi yang juga berkaitan dengan ibadah *'ammah*, termasuk prestasi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup dalam arti luas. Indikator ketaqwaan seringkali hanya dihubungkan dengan pelaksanaan shalat, misalnya, tanpa atau kurang dikaitkan dengan kualitas aktivitas yang dilakukan seorang Muslim dalam kehidupan dunia ini. Taqwa, misalnya, juga belum dikaitkan dengan perilaku anti korupsi dan pembangunan *clean governance*. Maka, sekali lagi, sikap keberagamaan seperti ini hanya melahirkan kesalehan individu, tetapi tidak menciptakan kesalehan sosial. Wajar kalau agama belum terasa atau bahkan tidak terlihat efeknya dalam kehidupan. Jangan heran, kalau pelaksanaan ibadah selalu semarak, kuota ibadah haji selalu tidak cukup, dan peringatan hari agama dirayakan, tetapi, Indonesia tetap saja menjadi negara paling korup di dunia.

Ajaran persamaan meniscayakan keadilan. Maka, ajaran keadilan termasuk ajaran yang mendasar dalam Islam. Bahkan al-Quran menegaskan keadilan amat dekat dengan ketaqwaan. Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa berlaku adil dan menegakkan keadilan adalah indikator ketaqwaan. Meski, harus dipahami bahwa keadilan yang dituntut itu bukan lah keadilan dalam arti formal, tetapi juga keadilan dalam arti materil. Berkaitan dengan konsep keadilan ini, Islam juga memperkenalkan konsep “keadilan distributif”. Maka, mustahil keadilan dapat terwujud manakala aspek kesejahteraan dan kehidupan ekonomi umat tetap terpuruk. Dengan kata lain, sulit berbicara penegakan hukum dan pemberlakuan syariat Islam, jika kesejahteraan masyarakat tetap dalam keadaan buruk. Dalam soal ini pula, Islam menekankan ditegakkannya keadilan itu walaupun berakibat merugikan diri dan kaum kerabat.

Aktualisasi konsep-konsep ajaran di atas, yaitu tauhid, persamaan, dan keadilan, memungkinkan setiap Muslim melakukan kerja (*'amal*), dalam arti seorang Muslim dengan segala potensi yang dimilikinya, berkontribusi bagi keadaannya di dunia ini-untuk jangka pendek-, dan dalam jangka panjang bagi kehidupannya kelak di kemudian hari. Konsep kerja ini diaktualisasikan setidaknya dalam lima prinsip, yaitu melakukan yang terbaik (*absanu 'amala*), berdaya saing (*fastabiq al-khairat*), visioner (*ma taqaddama lighbad*), persaudaraan (*ukhunnwab*), dan tolong-menolong (*ta'awun*).

3. Palopo sebagai Kota Religi

Palopo sebagai kota otonom masih tergolong baru. Meski demikian, keberadaannya diharapkan dapat merupakan peluang dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Bukan sekadar interest jangka pendek segelintir elit, tetapi disadari oleh banyak komponen masyarakat sebagai satu tahap dari rangkaian tahap perjuangan dalam jangka panjang bagi upaya pembangunan. Hal ini meniscayakan pula peletakan dasar-dasar pembangunan yang tepat dan dalam jangka panjang mampu mewujudkan Palopo sebagai kota yang dapat diperhitungkan pada skala global. Oleh karena itu,

Kalau tidak keliru, pemerintah kota telah mencanangkan Palopo sebagai kota multidimensi. Dimensi-dimensi tersebut adalah dimensi perdagangan, dimensi industri, dimensi jasa, dimensi adat budaya, dimensi pariwisata, dimensi pendidikan, dan dimensi religi. Ketujuh dimensi ini diharapkan dapat terwujud dan mewarnai sekaligus sebagai ciri Kota Palopo. Melihat dimensi yang ingin dibangun ini, jelas bukan pekerjaan mudah. Sejak dini diperlukan gagasan dan program relevan. Dengan kata lain, ada visi dan misi jelas

ke arah upaya tersebut, sehingga apa yang dicanangkan tersebut tidak hanya menjadi slogan atau sekadar daftar keinginan. Lebih jauh lagi, diperlukan adanya indikator sebagai tolok ukur untuk menilai ketercapaiannya.

Salah satu dimensi yang menjadi sorotan tulisan ini adalah dimensi religi. Religi dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” di antaranya berarti agama. Dengan begitu, Palopo sebagai kota religi secara harfiah berarti kota agama. Masalahnya kemudian, apa makna dan bagaimana wujud aktualisasinya? Hal ini sangat menarik perhatian, mengingat Indonesia adalah negara “bukan-bukan”. Bukan negara agama, bukan pula negara sekular. Lalu bagaimana mungkin ada kotanya “kota agama”? Belum lagi, dalam masyarakat terdapat beberapa macam agama. Dari sini, tampak perlunya ada pemahaman jelas mengenai dimensi religi Kota Palopo ini. Dengan pemahaman yang jelas akan lahir upaya-upaya bersama dan tidak menimbulkan kontroversi ataupun konflik yang merugikan. Sebaliknya, dengan pemahaman jelas akan terbangun kebersamaan dan usaha nyata untuk mewujudkannya.

Sejauh ini, pengalaman kita sebagai warga negara Indonesia, dalam pentas sejarah terjadi polemik bahkan ketegangan dan “pemberontakan” di sekitar persoalan hubungan politik (negara) dan agama. Terdapat beberapa pandangan mengenai hal ini: *Pertama*, paham teokrasi yang berpandangan agama dan negara sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam paham ini, negara menyatu dengan agama, karena pemerintahan dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara dilakukan atas titah Tuhan. *Kedua*, paham sekular yang berpandangan tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dan agama; negara adalah urusan manusia dengan manusia lain, sedangkan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. *Ketiga*, paham

komunisme yang memandang hakikat hubungan negara dan agama berdasarkan pada filosofi materialisme-dialektis dan materialisme-historis. Bagi pandangan ini, agama adalah candu bagi masyarakat.

Sementara itu, dalam teori politik Islam juga terdapat beberapa pandangan mengenai hubungan agama dan negara. *Pertama*, pandangan integralistik yang berpendapat negara dan agama harus tidak dipisahkan. Karena Islam, sebagai agama integral dan komprehensif, mencakup tidak hanya masalah-masalah ukhrawi, tetapi juga masalah-masalah duniawi. *Kedua*, pandangan sekularistik yang berpendapat agama dan negara harus dipisahkan, dan ruang gerak agama harus dibatasi hanya pada persoalan-persoalan yang bersifat kehidupan pribadi. Agama tidak dapat dihubungkan dengan politik, pemerintahan, dan negara. Bahkan konstitusi negara tidak boleh didasarkan pada agama, tetapi pada dasar yang sekular. *Ketiga*, pandangan simbiotik yang berpendapat agar agama dan negara tidak secara formal dipisahkan, dengan pengertian dasar negara tidak secara formal memakai Islam, akan tetapi negara tetap ikut terlibat dalam menangani masalah-masalah keagamaan yang ada dalam negara.

Dari berbagai teori di atas, Indonesia menerapkan pandangan “simbiotik”, meski bukan sebagai negara agama, tetapi agama dijunjung tinggi dan negara ikut terlibat dalam menangani, membenahi, mengurus, dan memajukan masalah-masalah keagamaan. Pandangan ini dalam era otonomi daerah mendapat peluang yang semakin longgar, yang dapat dilihat dari keinginan sejumlah daerah memberlakukan syari’at Islam. Dari pandangan ini pula, dimensi religi Kota Palopo dimungkinkan untuk dirumuskan dan diaktualisasikan. Masalahnya, lagi-lagi soal bagaimana wujud aktualisasi dimensi religi tersebut. Dalam hal ini, juga muncul pertanyaan dimensi mana dari ajaran agama yang ingin diwujudkan; apakah dimensi formal-simbolistik atau dimensi fungsional-substantifnya atau bahkan

keduanya? Belum lagi kita juga diperhadapkan pada pertanyaan interpretasi mana dari doktrin agama yang akan diambil mengingat beragamnya interpretasi dalam agama.

Islam, misalnya, dari banyak segi mengandung beragam interpretasi. Dan sejauh bernama interpretasi, tidak dapat diterima adanya “*truth claim*” (klaim kebenaran) dari pandangan atau aliran tertentu. Hal ini menuntut kejelasan dan kepastian mana ajaran yang bersifat dasar (mutlak) dan mana yang bersifat bukan dasar (relatif). Dengan begitu, dapat disusun prioritas ajaran yang akan diaktualisasikan dan sekaligus terdapat semacam “ruang” yang fleksibel dalam memilih dan menerapkan suatu ajaran (interpretasi) dari agama. Sehingga, akan lahir pula sikap toleransi atas pandangan yang berbeda.

Hemat saya, upaya untuk memberi makna pada dimensi religi Kota Palopo, pertama-tama harus berangkat dari kejelasan mengenai arti dimensi religi itu sendiri yang disepakati oleh umat beragama di Kota Palopo. Selanjutnya, setiap agama diberi peluang yang sama dan didorong untuk mengaktualkan ajaran agama yang dianutnya. Upaya lebih lanjut yang dapat dilakukan adalah bagaimana agar agama mewarnai kehidupan masyarakat dan pemerintahan dalam berbagai seginya. Dengan kata lain, mengupayakan agar agama menjadi etos dan spirit sekaligus fungsional dalam kehidupan.

Kesemarakkan peringatan hari agama, ritual agama, ataupun simbol-simbol agama lainnya, tidak akan banyak berarti jika kemudian berakhir begitu saja setelah usai diperingati atau dilaksanakan. Dan tentu saja, semoga bukan segi ini yang ingin dituju dari apa yang kita sebut sebagai dimensi religi itu. Segi substantif dari agama yang mendorong dilakukannya hal-hal yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama dalam arti luas adalah segi yang lebih mendesak, tak kurang pentingnya, dan harus mulai diidentifikasi untuk diprogramkan. Terjebak pada segi yang pertama di

atas, segi formal agama, tidak akan menyelesaikan secara tuntas persoalan kehidupan yang dihadapi masyarakat.

Maka, dimensi religi Kota Palopo tidak cukup hanya dengan kesemarakkan segi formal; tidak cukup dengan kesemarakkan dilakukannya ibadah di masjid-masjid ataupun kebaktian di gereja-gereja. Tidak pula, hanya dengan do'a-do'a yang dipanjatkan setiap waktu. Segi formal harus dibarengi dengan usaha nyata. Sebab, paduan ibadah (do'a), tekad, dan kerja keras lah yang bisa mengubah kehidupan masyarakat ke arah lebih baik. Demikian pula, tentunya dimensi religi harus tercermin dalam prilaku politik, ekonomi, hukum, budaya, dan segenap segi kehidupan. Dengan begitu, ada kesinambungan antara ibadah (do'a) yang dipanjatkan dan prilaku keseharian. Dimensi religi hanya akan menjadi slogan kosong manakala, misalnya, prilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tetap saja berlangsung.

Persoalan lain yang berkaitan dengan dimensi religi adalah bagaimana mengatasi masalah kemiskinan dan ketertinggalan; bagaimana menciptakan peluang ekonomi (kerja); bagaimana menciptakan supremasi hukum; bagaimana membangun etos kerja dan kedisiplinan; bagaimana menciptakan ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kenyamanan; dan sejumlah masalah lainnya. Mencari dan menemukan solusi dari masalah-masalah ini merupakan bagian dari wujud dimensi religi.

4. Ramadhan Membentuk Kepribadian Muslim dengan Meneladani Sifat Allah

Ramadhan adalah bulan istimewa bagi umat Islam. Ia seringkali diberi banyak gelaran, di antaranya sebagai bulan penuh berkah, ampunan, dan rahmat. Demikian juga, ia

disebut bulan puasa, bulan latihan, dan bulan pengendalian diri. Hal ini, setidaknya menunjukkan keistimewaan bulan Ramadhan dibanding bulan-bulan lainnya. Pantaslah Nabi Muhammad saw. bersabda:”*Seandainya manusia mengetahui apa yang terkandung di dalam bulan Ramadhan, niscaya mereka menghendaki agar seluruh bulan dalam satu tahun adalah Ramadhan seluruhnya*”. Karena itu, bulan Ramadhan adalah momen yang kondusif untuk melatih dan membentuk kepribadian seorang muslim.

Diri manusia tidak hanya terdiri dari fisik berupa jasmani, tetapi juga non fisik yang disebut dengan ruhani. Dengan kata lain, manusia memiliki sisi luar dan sisi dalam. Seorang muslim yang baik seyogianya tidak hanya berusaha memperindah sisi luarnya, tetapi juga, hendaknya memperindah sisi dalamnya. Sebab, apalah artinya tampang yang menarik jika tidak diimbangi dengan mental spiritual yang baik pula.

Dalam ajaran Islam, kemuliaan seseorang ditentukan oleh tingkat ketaqwaannya. Allah swt. dalam al-Qur’an menyatakan:”*Sesungguhnya yang termulia di antara kamu adalah yang paling bertaqwa*”. Taqwa adalah totalitas sejumlah kualitas positif yang dimiliki seorang muslim. Ibarat kain, taqwa adalah pakaian yang dirajut dari sejumlah benang kebaikan dan kebajikan yang dilakukan seseorang. Semakin banyak kebajikan yang dilakukan seseorang, apalagi jika kualitasnya baik, maka pakaian taqwanya akan semakin baik dan berkualitas pula. Dalam al-Qur’an disebutkan:”*dan pakaian taqwa itulah yang baik*”. Puasa yang dilakukan di bulan Ramadhan diharapkan mampu mengantar seseorang yang melaksanakannya pada tujuan puasa, yaitu taqwa.

Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling baik, “*absanu taqvim*” dalam arti sebaik-baik makhluk. Kelebihan manusia dibanding makhluk lainnya terletak pada akal pikiran yang hanya dianugerahkan

Allah swt. kepadanya dan tidak kepada makhluk lainnya, termasuk kepada malaikat sekalipun. Meski demikian, manusia juga dilengkapi dengan “*nafs*” yang dapat mendorong manusia untuk condong pada kebaikan atau keburukan. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Syams (91) ayat 7-8, “*Demi nafs (jiwa) dan penyempurnaannya. Tuhan mengilhami (memberi potensi) kepadanya untuk berbuat kejahatan dan untuk berbuat ketaqwaan*”.

Di dalam bulan Ramadhan, umat Islam dikondisikan untuk mengalami suasana yang cenderung pada kebaikan. Rasulullah saw. bersabda: “*Jika Ramadhan tiba, pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka tertutup, dan setan-setan terbelenggu*”. Dengan begitu, suasana yang tercipta oleh Ramadhan mampu mendorong seseorang kepada kebaikan. Hal ini mengajarkan pentingnya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk membentuk pribadi muslim yang baik. Oleh karena itu, keluarga muslim diharapkan mampu menciptakan lingkungan rumah tangga yang agamis di dalam bulan Ramadhan. Hal-hal yang bisa dilakukan rumah tangga di antaranya: berbuka dan bersahur bersama anggota keluarga, tadarus al-Qur’an, dan mendengarkan ceramah agama serta meningkatkan kepedulian pada pelaksanaan ajaran zakat, infaq, dan shadaqah.

Puasa di bulan Ramadhan pada dasarnya melatih seseorang untuk meneladani sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah (*asma al-husna*) ada sembilan puluh sembilan. Tidak mudah dilukiskan bagaimana luarbiasanya bagi mereka yang berusaha meneladani sifat-sifat Allah tersebut. Seseorang yang meneladani Allah sehingga ia dekat kepadaNya dilukiskan dalam satu hadis Qudsi: “*Kalau Aku telah mencintai seseorang, Aku menjadi pendengaran untuk telinganya, menjadi penglihatan untuk matanya, menjadi pegangan untuk tangannya, menjadi langkah untuk kakinya*”.

Dari sekian banyak sifat Allah swt, sifat Allah yang Maha Hidup, misalnya, jika diteladani mampu mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan. Karena kebaikan yang dilakukan seseorang akan mengekalkan namanya, meskipun ia sendiri telah wafat. Inilah yang biasa disebut umur kedua atau umur panjang. Orangny telah wafat, tetapi kebaikan-kebaikannya tetap diingat dan dikenang sepanjang masa. Demikian pula, meneladani sifat Allah yang Maha Pemurah mampu mendorong seseorang yang meneladaninya menjadi orang yang senang membantu dan menolong orang lain. Sehingga dengan meneladani sifat Maha Pemurah Allah akan meningkatkan kepedulian dan solidaritas seorang muslim terhadap umat.

Sifat Allah yang Maha Kaya mengandung arti Dia tidak butuh kepada apapun. Sifat ini perlu pula diteladani. Dalam ukuran agama, seseorang yang kaya adalah orang yang merasa puas setelah usaha maksimal. Kekayaan itu diibaratkan lingkaran 360 derajat. 360 derajat adalah kepuasan setelah usaha halal yang maksimal dilakukan. Jika seseorang telah memiliki walau banyak tapi tak puas, maka ia tidak dapat disebut sebagai orang kaya. Bagi mereka yang meneladani sifat ini, hendaknya berusaha untuk tidak membutuhkan sesuatu. Nabi Muhammad bersabda: *"Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa"*.

Allah juga memiliki sifat Maha Mengetahui. Sifat Allah ini mengandung arti pengetahuanNya amat jelas sehingga terungkap bagiNya hal-hal sekecil apapun. Dengan kata lain, Allah swt. disebut Maha Mengetahui sebab pengetahuanNya meliputi segala sesuatu. Meneladani sifat Allah ini, manusia hendaknya terus menerus berupaya menambah ilmunya. Dalam upaya tersebut, manusia dituntut agar dapat menggunakan secara maksimal seluruh potensi yang dianugerahkan Allah kepadanya untuk meraih sebanyak mungkin ilmu yang bermanfaat, bukan hanya menyangkut "seluruh benda-benda",

yakni seluruh alam raya, tetapi juga ilmu yang bersifat non empiris yang hanya dapat diraih dengan kesucian jiwa dan kejernihan kalbu.

Demikian antara lain sifat-sifat Allah yang harus diteladani oleh setiap muslim. Dengan meneladani sifat-sifat Allah tersebut, seorang muslim akan memiliki kepribadian yang baik. Oleh karena sifat-sifat Allah amat banyak, demikian luas dan tak bertepi, maka diperlukan upaya terus menerus, disertai kesabaran serta kesungguhan untuk meneladaninya. Ramadhan memungkinkan dan menciptakan kondisi bagi seorang muslim untuk meneladani sifat Allah swt sebanyak mungkin. Untuk itulah, melalui Ramadhan dan pelaksanaan ibadah di dalamnya diharapkan dapat dihasilkan pribadi-pribadi muslim yang baik.

Jika sifat-sifat Allah telah sedemikian rupa diteladani, maka manusia bisa bertindak lebih manusiawi bagaikan malaikat, bahkan prilakunya seolah menjadi cermin aura ketuhanan. Inilah yang dalam tradisi sufi disebut “*bulul*” ketika sifat-sifat kemanusiaan yang cenderung culas tereliminasi sehingga yang tersisa hanya sifat-sifat ketuhanan. Keadaan demikian dipahami sebagai saat Tuhan meminjam tubuh-tubuh manusia bagi kehadiranNya di alam kehidupan duniawi. Danah Zohar dan Ian Marshall, seperti diuraikan Munir Mul Khan, menyebut keadaan ini sebagai saat ketika seseorang memperoleh pencerahan batin sehingga berada pada posisi (*maqom*) “*god spot*” atau titik tuhan.

Selain itu, upaya menuju kepada kepribadian muslim ideal dapat ditempuh melalui lima macam hal, yaitu: *pertama*, pemahaman diri, yakni mengenali secara obyektif kekuatan dan kelemahan diri sendiri, baik yang masih merupakan potensi maupun yang sudah teraktualisasi. *Kedua*, bertindak positif, mencoba menerapkan dan melaksanakan dalam perilaku dan tindakan nyata sehari-hari hal-hal yang dianggap baik dan bermanfaat. *Ketiga*, pengakraban hubungan,

meningkatkan hubungan baik dengan pribadi-pribadi tertentu, sehingga timbul sikap saling mempercayai dan saling membantu. *Keempat*, pendalaman nilai-nilai kreatif; penghayatan akan kebenaran, keindahan, dan kasih sayang; dan nilai bersikap (menerima dan mengambil sikap tepat terhadap derita yang tidak dapat dielakkan). *Kelima*, ibadah, yakni berusaha melaksanakan perintah Allah dan menjauhi laranganNya.

Citra muslim dewasa ini, terkadang dilukiskan dengan amat jelek oleh mereka yang tidak mengerti dan membenci umat Islam. Ada yang menggambarkan muslim sebagai “orang-orang lemah, kalah, dan tak berharga”, sedangkan al Qur’an menggambarkan mereka sebagai “orang-orang kuat, unggul, dan terpuji”. Lebih memiriskan lagi, seringkali tuduhan teroris dialamatkan kepada umat Islam. Karenanya, dari dua kutub ekstrim citra muslim ini, diharapkan umat Islam senantiasa berupaya menuju kepada kutub yang menggambarkan umat Islam sebagai mereka yang kuat, unggul, dan terpuji. Citra positif tersebut dapat dicapai manakala umat Islam memiliki komitmen untuk meneladani sifat-sifat Allah swt dan berupaya melakukan langkah-langkah yang ditawarkan di atas. Ramadhan adalah momen amat tepat untuk membulatkan tekad dan memulai upaya tersebut.

5. Puasa dan *Emotional Quality Management* (Menyingkap Sisi-Sisi Puasa)

Puasa diajarkan banyak agama, untuk tidak mengatakan semua agama, bukan hanya Islam. Informasi dari al-Qur'an menyatakan kewajiban berpuasa yang diberikan kepada kaum muslim merupakan kewajiban yang pernah pula diberikan kepada umat sebelumnya. Tujuan puasa dalam Islam tersimpul pada kata "taqwa". Taqwa adalah akumulasi segenap kebajikan yang

dilakukan. Sehingga, indikator tinggi rendahnya ketaqwaan seseorang bisa juga dilihat dari prestasi-prestasi duniawinya, dan bukan hanya pada prestasi-prestasi keakhiratan.

Kalau pandangan di atas bisa diterima, maka puasa yang dilakukan seharusnya memberi dampak bukan hanya pada pribadi orang-perorang, tetapi juga kelompok bahkan manusia secara keseluruhan. Dan, puasa tidak hanya berpengaruh pada kedalaman spiritual, tetapi juga pada kinerja seseorang. Karena itu, tulisan ini ingin melihat sisi-sisi lain puasa, terutama yang berkaitan dengan *Emotional Quality Management* (EQM). Apa yang ingin dibuktikan di sini tidak lain bahwa agama dan ajarannya fungsional bagi kehidupan manusia.

Puasa sebuah gerbang menuju "God spot"

"God spot" atau titik Tuhan adalah istilah yang bisa dihubungkan dengan kata "*bulut*" dalam tradisi sufi, yaitu ketika sifat-sifat ketuhanan telah mengeliminasi sifat-sifat kemanusiaan yang cenderung culus dan korup. Dengan kata lain, Tuhan meminjam tubuh manusia bagi kehadiranNya di alam dunia ini sehingga terpancar dari diri manusia "aura" ketuhanan. Mereka yang berada pada "God spot" ini sama sekali jauh dari perilaku ketidakadilan, ketidakjujuran, kesewenangan, dan keserakahan.

Tidak makan dan minum dalam jangka waktu tertentu, ketika seseorang berpuasa, merupakan perilaku meneladani perbuatan Tuhan yang tidak makan dan tidak minum. Tuhan tidak makan, tetapi memberi makan. Meneladani Tuhan dalam hal ini, akan semakin bermakna ketika seseorang berupaya pula memberi "makan" orang lain. Ada konsep berbagi sesuatu dan memberdayakan orang lain.

Meneladani Tuhan dalam perbuatannya seperti di atas, menimbulkan dorongan untuk memberi sesuatu kepada orang lain, tidak *self oriented* (mementingkan diri sendiri atau tamak). Bahkan,

dikehendaki target utama kita tidak semata bagaimana memberi makan, tetapi bagaimana semakin banyak orang yang sanggup memberi makan, sehingga perilaku ini melahirkan konsep pemberdayaan. Hal ini sejalan dengan fungsi kepemimpinan (*leadership*), "*The function of leadership is to produce more leaders, not more followers*" artinya fungsi kepemimpinan adalah menghasilkan lebih banyak pemimpin dan bukan menghasilkan lebih banyak pengikut.

Soal "makan" menjadi problem manusia dewasa ini. Pada tataran global kita jumpai ada ketidakrelaan negara-negara maju untuk melepaskan hegemoninya. Dengan kata lain, tampak ada keinginan mereka untuk melanggengkan ketimpangan global, negara miskin makin miskin dan kaya makin kaya. Konglomerasi, seperti yang terjadi di Indonesia, menyebabkan penguasaan sejumlah besar sumber-sumber ekonomi oleh segelintir orang. Pada perilaku orang-perorang, tampak gejala buruk, yakni ketika seseorang berpikir dan bekerja hanya untuk kepentingan diri pribadi semata.

Puasa Gerbang Membangun *Emotional Quality Management*

Emotional Quality Management (EQM) is the ability to sense, understand, communicate, and effectively apply the power and acumen of emotions as a source of human energy, information, trust, communication, creativity, influence and conflict resolution (Khoiruddin Bashori: 2004). Seperti dikutip dari Bashori, EQM dapat diartikan sebagai kemampuan untuk merasakan, memahami, berkomunikasi, dan secara efektif menerapkan kuasa dan ketajaman emosi sebagai sumber energi manusia, informasi, kepercayaan, komunikasi, kreativitas, pengaruh dan resolusi konflik. Dari definisi ini tampak secara jelas EQM berfokus pada pengelolaan (pengendalian) mutu emosi seseorang dan bagaimana menjadikan emosi sebagai sumber energi untuk membangun hubungan dengan diri sendiri dan orang lain.

Ketika puasa diyakini sebagai wahana latihan pengendalian diri, baik dalam hubungannya dengan motif dan interest pribadi maupun dalam hubungannya dengan orang lain, maka tidak berlebihan jika dikatakan puasa mempunyai sisi yang bisa menjadi gerbang bagi upaya membangun *Emotional Quality Management*. Ketika puasa tidak hanya berarti berpantang makan, minum, dan seks, tetapi juga berpantang bohong, culas, dan menipu, maka pelajaran lain dari EQM ditemukan pula di sini. Demikian pula halnya, ketika orang berpuasa dilarang meladeni ajakan konflik.

"Tidur orang berpuasa adalah ibadah", demikian Nabi Muhammad saw. bersabda. Hadis ini menekankan semangat produktivitas yang tinggi, sebab dipahami tidur saja ibadah apalagi bekerja. Puasa tentu saja tidak harus menyebabkan menurunnya produktivitas seseorang. Termasuk dalam semangat hadis ini adalah semangat berkreaitivitas yang tidak lain juga merupakan bagian dari EQM.

Nabi Muhammad saw. juga bersabda "Berpuasalah agar kamu sehat". Wujud kesehatan yang diharapkan dari orang berpuasa adalah sehat fisik, sehat ruhani, dan sehat secara sosial. Kesehatan fisik bukan sesuatu yang mustahil diperoleh melalui puasa. Beberapa penyakit, menurut informasi kesehatan (dokter), menggunakan puasa sebagai bagian dari terapi. Berpantang makan, baik dari jenis makanan maupun untuk jangka waktu tertentu berguna bagi kesehatan fisik seseorang. Regulasi puasa tahunan (puasa ramadhan) bagi kaum muslim selama sebulan dipandang sebagai proses yang amat berguna dan diperlukan bagi tubuh manusia.

Kesehatan ruhani dapat diperoleh orang berpuasa, sebab dengan berpuasa, seperti dikemukakan di atas, ia berada pada gerbang menuju "*God spot*" (titik Tuhan). Dengan berpuasa, seseorang sedang berada pada kondisi berusaha membangun pemahaman diri, kedekatan

dengan Tuhan, dan kedekatan dengan sesama manusia. Pada capaian tujuannya, orang berpuasa akan mengalami pencerahan ruhani dan spiritual. Mereka yang berada pada titik ini, jelas akan jauh dari penyakit-penyakit ruhani dan spiritual.

Pada akhirnya, kesehatan ruhani dan spiritual (dan sehat fisik) adalah modal bagi terciptanya kesehatan sosial. Masyarakat yang sehat secara sosial terwujud ketika telah tercipta "equilibrium" (keseimbangan) antara diri manusia (mikro kosmos) dan alam lingkungannya (makro kosmos). "Equilibrium" itu sendiri tidak lain merupakan buah dari kesalehan individu dalam menata diri dan alam lingkungannya dan buah dari kesalehan sosial karena tegaknya nilai-nilai keadilan, kejujuran, solidaritas, dan kepedulian sosial.

Regulasi diri (*self*) dan orang lain (*other*) dihubungkan dengan kesadaran (*awareness*) dan tindak prilaku (*action*) merupakan elemen-elemen EQM. Hal ini terlihat pada *four quadrant model for EQM* dari Jorge Cherbosque, dikutip dari Khoiruddin (2004), seperti berikut ini:

	<i>Self</i>	<i>Other</i>
<i>Awareness</i>	<i>Quadrant 1 Emotional Self Awareness</i>	<i>Quadrant 3 Social Awareness</i>
<i>Actions</i>	<i>Quadrant 2 Emotional Self Control</i>	<i>Quadrant 4 Social Skills</i>

Elemen-elemen EQM di atas, pada dasarnya juga menjadi elemen-elemen ibadah puasa. Sehingga dengan berpuasa seseorang pada dasarnya sedang mengolah kemampuan EQMnya. Patut dicatat, penelitian atas 515 eksekutif senior menemukan EQM sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan kesuksesan dibanding apa

yang disebut sebagai pengalaman (*experience*) dan kecerdasan intelektual (*Intelligence Quotion-IQ*).

Maka, puasa bukan sekadar ritus (ibadah dalam pengertian sempit), tetapi ia adalah wahana yang memberi efek positif bagi kehidupan dan berguna bagi manusia bahkan terhadap upaya-upaya yang terkait dengan manajemen. Lebih lagi, EQM yang dibangun dari ibadah puasa adalah EQM yang beraura ketuhanan. Ke depan, potensi ini seyogianya mendapat perhatian yang cukup mengingat begitu banyak persoalan yang melilit bangsa kita. Kiranya, bukan harapan yang berlebihan jika potensi EQM dari pelaksanaan puasa menjadi satu solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia.

6. Puasa dan Hidup Sederhana

Al hamdulillah, sepekan lebih puasa yang telah kita lalui tidak mengurangi semangat kita untuk semakin memperbanyak amal kebajikan dan meningkatkan kualitasnya. Semoga hal ini dapat kita pertahankan hingga akhir ramadhan, dan mewarnai kehidupan kita pada bulan-bulan di luar Ramadhan.

Puasa sebagaimana yang kita pahami memiliki banyak manfaat bagi manusia. Manfaat puasa tidak hanya berkenaan dengan jasmani, tetapi juga, manfaat yang berkenaan dengan jiwa, sosial kemasyarakatan bahkan ruhani manusia. Kesemua manfaat puasa itu terangkum dalam istilah yang digunakan dalam rangkaian firman Allah swt. yang memerintahkan puasa, yaitu kalimat “*la'allakum tattaquun*”, yang berarti “agar kamu bertaqwa”.

Dari sini juga dapat dipahami bahwa hidup bertaqwa adalah hidup yang merajut dan merangkai sejumlah kebaikan atau kebajikan. Oleh karena, taqwa pada dasarnya adalah segenap kebaikan yang kita

lakukan. Ibarat kain, taqwa adalah pakaian yang dirajut dari sejumlah benang kebaikan. Benang-benang kebaikan tersebut di antaranya, benang shalat yang kita lakukan; benang zakat, infaq, shadaqah yang kita tunaikan; benang puasa dan seluruh kebaikan serta kebajikan yang diperintahkan agama yang kita kerjakan. Dengan demikian, semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, apalagi jika kualitasnya baik, maka insyaallah pakaian taqwa yang kita rajut itu akan semakin baik pula bentuk dan kualitasnya. Allah berfirman: *“libaasuttaqwa dzaalika khaair”* (pakaian taqwa itulah yang baik).

Salah satu nilai yang terkandung dalam ibadah puasa adalah rasa solidaritas sosial. Puasa yang berarti menahan diri untuk tidak makan dan minum serta berhubungan suami istri untuk masa waktu tertentu, dari terbit fajar hingga terbenam matahari, adalah salah satu bentuk latihan pengendalian diri. Selain itu, juga mampu menumbuhkan kepekaan sosial bagi jiwa seseorang. Kesulitan dan kesukaran yang dirasakan seseorang yang berpuasa memudahkan orang tersebut untuk merasakan penderitaan dan kesukaran yang dialami oleh orang lain.

Dari pelaksanaan ibadah puasa juga diharapkan terbangun satu sikap yang amat penting dalam kehidupan kemasyarakatan, yaitu sikap hidup sederhana. Terutama sekali, sikap hidup ini diharapkan lahir dari orang kaya yang memiliki sikap solider. Meskipun, sikap hidup sederhana juga dapat dilakukan oleh orang miskin. Sikap hidup sederhana dapat ditunjukkan oleh mereka yang kaya dengan cara tidak hidup bermewah-mewah. Sedang bagi mereka yang miskin, sikap hidup sederhana dapat ditunjukkan dengan cara hidup secara penuh harga diri, tidak tergoda meninggalkan keyakinan demi memenuhi tuntutan duniawi dengan cara yang batil.

Tantangan dalam upaya mewujudkan hidup sederhana, salah satu di antaranya adalah sikap serakah atau tamak. Ketamakan bisa

terjadi tidak hanya terhadap harta, tetapi juga terhadap jabatan, pangkat, kekuasaan dan lainnya. Bila sikap tamak ini mulai timbul pada diri seseorang, maka setan akan segera menghasutnya agar ia semakin serakah, menumpuk harta sebanyak-banyaknya. Ia tidak akan mempunyai rasa malu, jauh dari rasa santun kepada fakir miskin, anak yatim, bahkan hak orang-orang miskin terlantar pun diambilnya.

Dalam satu legenda diceritakan kisah tentang seorang raja yang bernama Midas. Raja Midas adalah tipologi penguasa yang tamak. Ia ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk diri dan keluarganya. Raja Midas merasa amat susah jika ada orang lain yang lebih kaya darinya, ia ingin menjadi orang satu-satunya yang paling kaya di jagat raya ini. Karena itu, ia mengharap bisa memiliki tangan ajaib yang bisa yang merubah setiap benda yang disentuhnya menjadi emas.

Keinginan raja Midas terkabul. Sekarang ia telah memiliki tangan ajaib. Mula-mula ia ke taman, disentuhnya satu persatu pohon yang ada di taman yang segera berubah menjadi emas begitu disentuh oleh tangan Raja Midas. Setelah itu, Midas menuju ke sebuah sungai di samping istananya. Disentuhnya sungai itu, air sungai itupun segera menjadi bongkahan-bongkahan emas. Raja Midas semakin bersemangat. Ia lalu menuju istananya, disentuhnya pula setiap benda mulai dari tiang, pintu, jendela, dan kuseng bahkan semua benda yang terdapat di istananya.

Puas menyaksikan istana dan isinya telah berubah menjadi emas, Raja Midas kemudian beristirahat. Rasa haus dan lapar mendorong raja Midas menuju ke meja makan. Diambilnya gelas dan air minum, apel, dan makanan yang tersedia, tetapi alangkah terkejutnya raja Midas ketika semua makanan dan minuman yang disentuhnya berubah menjadi emas. Raja Midas mulai panik, sambil berlarian ia mencari anak dan istrinya. Setelah menjumpai anak

istrinya, ia pun memeluk mereka, tetapi Raja Midas semakin terkejut tatkala anak dan istrinya juga berubah menjadi patung emas. Raja Midas akhirnya menjadi gila, mengundang cemohan, dan kasihan dari rakyatnya sendiri.

Kisah di atas meninggalkan pesan yang cukup mendasar, bahwa keserakahan yang melekat pada seseorang akan mendatangkan malapetaka baik bagi dirinya, masyarakat, maupun lingkungannya. Terlebih lagi jika ia seorang penguasa yang kebetulan mendapatkan fasilitas, ilmu, dan kekuasaan politik, maka hubungan sosialnya cenderung bersifat struktural dan menindas. Bagaikan sebuah taman, maka orang-orang di sekitarnya akan disulap menjadi patung emas. Semahal-mahal harga patung emas tetaplah patung yang tak bernyawa, yang nilai dan harkatnya tidak sanggup menandingi nilai kemanusiaan yang dianugerahi nikmat hidup dan kemerdekaan.

Melalui ibadah puasa, kita dikondisikan agar mampu mengendalikan diri bahkan terhadap apa yang menjadi milik kita sendiri. Sejalan dengan itu, diharapkan pula tumbuh sikap “*qanaa’ab*”, yaitu sikap merasa cukup dengan apa yang dianugerahkan Allah . Dengan sikap ini, seorang muslim tidak akan memaksakan diri untuk memiliki sesuatu yang bukan haknya dan apalagi menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya. Demikian pula, di tengah masyarakat perlu dikembangkan suatu nilai dan pemahaman bahwa hidup sederhana bukanlah suatu aib dan tidak mengurangi kemuliaan harkat martabat seseorang. Bukankah orang termulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa?

7. Revolusi Politis Wujud Nyata Berqurban

Pelaksanaan Idul Adha diikuti pula dengan penyembelihan hewan berupa sapi, kerbau, dan kambing atau hewan lain yang sesuai menurut ketentuan syariat agama Islam. Karena itu, Idul Adha disebut juga dengan hari raya Qurban. Penyembelihan hewan qurban adalah sebuah simbol yang sarat makna. Paling tidak, ia bermakna sebuah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mempersembahkan sesuatu kepada sesama manusia.

Tetapi tentu saja, berqurban dalam hal ini memiliki karakteristik yang jelas dan berbeda dari tradisi “pengorbanan” yang pernah dikenal umat manusia. Karakter yang jelas itu bahwa bukan daging atau darah qurban yang sampai kepada Tuhan, tetapi keikhlasan dan ketakwaan yang menjadi dasar dari pelaksanaan qurbanlah yang sampai kepada Tuhan. Ini berarti, bagi mereka yang berqurban ada dimensi lebih tinggi dan mendalam yang harus diraih. Bukan sekadar mengalirkan darah dan membagikan daging hewan yang disembelih.

Untuk itu, bagi mereka yang berqurban perlu lebih mawas diri agar tidak terjebak dan lalu puas pada sekadar memberikan hewan qurban kepada panitia masjid, lalu nama diumumkan, hewan disembelih dan dagingnya dibagi-bagikan. Apalagi setelah itu langsung berpikiran qurban telah diterima Tuhan. Hal ini berbahaya bagi upaya yang lebih sungguh-sungguh untuk meraih kedekatan dengan Tuhan, sebab kita bisa terjerumus ke dalam jebakan rutinitas ritual yang simbolistik dan tidak fungsional. Jika ini yang terjadi, maka lagi-lagi umat Islam gagal menampilkan “wajah” agama yang sesungguhnya.

Berqurban dan Nasib Rakyat

Wujud nyata kehidupan yang dicita-citakan rakyat hingga kini belum terlalu jelas. Pergantian rezim pemerintahan sejak dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati

hingga Susilo Bambang Yudhoyono dalam kurun waktu sekitar 60 tahun ternyata tidak terlalu banyak merubah keadaan masyarakat dibanding dengan negara-negara lain, bahkan yang baru merdeka belakangan sekalipun. Keadaan ini, mau tak mau menjadi masalah utama yang harus dipikirkan sebab-sebabnya dan bagaimana menemukan solusinya.

Nasib rakyat yang terus terpuruk dan didera dengan berbagai macam krisis maupun bencana demi bencana yang tak kunjung habis-habisnya, pada dasarnya pula menimbulkan pertanyaan apa yang salah dengan politik pemerintah dan negara; masihkah tetap relevan untuk menuntut pengorbanan rakyat terus menerus tanpa mempertanyakan secara sungguh-sungguh dan kritis kinerja pemerintah?. Apakah sekarang bukan saatnya untuk mengajukan pertanyaan, "Apa yang negara sudah berikan kepada kami rakyat?"

Siapa sesungguhnya yang sekarang harus lebih banyak memberikan pengorbanan. Apakah rakyat atau pemerintah dengan para pejabat dan segenap birokrasinya?. Jika jawabannya, keduanya atau semua komponen bangsa harus sama-sama berkorban, maka apakah jawaban ini sesuai dan sejalan dengan kebijakan politik yang diambil pemerintah dalam berbagai bidang pembangunan?. Bagaimana dengan kesan yang muncul dibenak rakyat, bahwa sebagian elit pemerintah masih saja terus mengambil kebijakan yang tidak pro rakyat?.

Pemerintah yang sungguh-sungguh memperhatikan dan peduli terhadap nasib rakyat, seyogianyalah harus terlebih dahulu dan lebih banyak memberikan pengorbanan bukan rakyat. Pengorbanan itu dapat berupa upaya meminimalisir kepentingan dan dengan tidak memanfaatkan kesempatan untuk memperkaya diri pribadi, keluarga, golongan dan partai. Pengorbanan itu dapat ditunjukkan melalui prioritas usulan program yang diajukan. Pengorbanan itu dapat berupa

fasilitas dan sarana yang sederhana dengan kinerja yang besar, bukan sebaliknya, gaji besar, rumah jabatan mewah, mobil dinas mewah, dan dana operasional yang luar biasa banyaknya, tetapi dengan hasil kinerja merah.

Trend Politik Kambing

Kambing adalah salah satu hewan yang termasuk boleh disembelih untuk diqurbankan dalam rangkaian pelaksanaan 'Idul Adha. Tetapi, dalam mengelola politik negara, pemerintah tidak boleh melakukannya (menjadikan kambing sebagai korban). Artinya, pemerintah tidak elok mengelola negara ini dengan mengedepankan politik kambing, baik putih maupun hitam. Trend politik kambing yang dikedepankan oleh pemerintah dalam mengelola negara tidak memberi kontribusi bagi pencapaian tujuan pembangunan.

Politik kambing putih merupakan sikap pemerintah ketika merespon kritik masyarakat dengan cara membela diri bahwa pemerintah sudah mengambil dan melakukan kebijakan yang benar. Politik seperti ini, juga muncul ketika banyak musibah dan bencana yang melanda tanah air. Dengan politik seperti ini, pemerintah ingin diakui sudah mengelola politik negara secara benar. Sebaliknya, ketika masyarakat atau siapapun komponen bangsa yang disalahkan, maka yang terjadi adalah politik kambing hitam.

Belajar dari peristiwa "pengorbanan yang melibatkan Ibrahim dan Ismail" yang menjadi asal ajaran berqurban, pemerintah seharusnya mau menerima kritik bahkan yang tidak konstruktif sekalipun dengan dada lapang. Bukankah ketika Ibrahim mendapat perintah untuk mengorbankan Ismail, Dia terlebih dahulu menyampaikan dan menanyakannya kepada Ismail?. Artinya, Ibrahim mau mendengarkan pendapat anaknya. Sejalan dengan peristiwa ini, pemerintah diharapkan tidak marah alias merah kuping dan juga matimatian membela diri ketika merespon kritik dari masyarakat. Tetapi,

justru menjadikan kritik itu sebagai faktor pemicu dan pemacu untuk mengelola politik negara bagi kemaslahatan rakyat.

Perlunya Revolusi Politis

Banyak hal yang bisa dilakukan bangsa ini untuk keluar dari berbagai keterpurukan dan kondisi yang mengesankan sebagai bangsa besar dengan kekayaan alam yang melimpah dan dengan jumlah penduduk dua ratusan juta orang. Kuncinya, salah satunya-untuk tidak menyebut sebagai yang paling utama, terletak pada kemauan yang didasari semangat berqurban. Berqurban dengan makna-maknanya yang berpihak pada kepentingan dan kemaslahatan rakyat, bukan sebaliknya, mengorbankan rakyat untuk memenuhi kepentingan diri sendiri.

Implementasi nyata yang diperlukan adalah kesediaan elit politik (para pemimpin bangsa) untuk menempuh cara-cara revolusioner-futuristik dalam mengelola politik negara, bukan dengan cara-cara konvensional dan kampungan. Cara-cara revolusioner-futuristik itu diperlukan karena kita memerlukan cara-cara yang super cepat agar bangsa dan negara ini tidak terlanjur lumpuh dan berkubang dalam keserbatidakmampuan. Selain itu, kita perlu cara-cara revolusioner-futuristik sebab sudah lama kita gagal memenuhi janji-janji kepada rakyat. Sudah lama rakyat kita bukan tuan di negerinya sendiri. Sehingga tuntutan yang paling jelas sekarang ini kepada pemerintah adalah kapan rakyat Indonesia menjadi tuan di negerinya?

8. Perspektif Agama sebagai Landasan Birokrasi dalam Mewujudkan *Good Governance*

Topik ini, hemat penulis, relevan dengan masalah sekaligus harapan kita, bangsa Indonesia, termasuk masyarakat di wilayah Luwu. Sebab, masalah-masalah yang kita hadapi tidak

cukup hanya dipandang dari perspektif ilmu pengetahuan dan teknologi semata-mata, tak kalah pentingnya, adalah tinjauan dari perspektif agama (keimanan dan ketakwaan/imtak). Penggunaan kedua perspektif ini dalam menyorot masalah-masalah bangsa dan kenegaraan yang kita hadapi akan melahirkan pandangan yang komprehensif dalam upaya mengatasinya.

Alasan mendasar, yang bisa dikemukakan, karena sejak awal bangsa Indonesia telah berkomitmen untuk membangun bangsa dan negara ini secara utuh, tidak hanya membangun dimensi ipteknya, tetapi juga, dimensi imtaknya, demikian sebaliknya. Jadi, yang hendak dibangun adalah otak dan watak sekaligus. Karena itu pula, dalam pembangunan di bidang pendidikan, tidak bisa tidak harus terkait dengan pendidikan agama, moral dan budi pekerti.

Islam, misalnya, sebagai salah satu agama di Indonesia, menyatakan pentingnya ketakwaan menjadi landasan dalam upaya membangun kehidupan. Hal ini dapat dibaca dalam al-Qur'an Surah al-Taubah (9) ayat 109:

Terjemahnya:

Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjid (bangunan)-nya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaan (Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahannam? Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Pesta panjang reformasi di Indonesia, hingga sekarang, masih saja menyisakan tanda tanya, terutama mengenai perbaikan nasib dan kehidupan bangsa dan negara ke masa depan. Penyebabnya, salah satu bisa disebutkan, yang paling penting menyangkut kejelasan arah perjalanan bangsa yang akan dituju. Tampak, berbagai komponen bangsa masih lebih sering berkonflik satu sama lain, ketimbang

berusaha mencari solusi. Keadaan ini, diperparah oleh sikap hedonisme dan sikap mementingkan kelompok sendiri. Lebih mudah dan sering terjadi, gampang menyalahkan pihak lain, tetapi tidak mampu menghadirkan solusi.

Salah satu dimensi yang bisa diupayakan untuk menciptakan keadaan yang lebih baik adalah upaya mewujudkan *good governance* dalam seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, melalui tulisan singkat ini, akan dicoba mendeskripsikan kaitan antara birokrasi dan *good governance* dari perspektif agama.

Birokrasi dan *Good Governance*

Istilah birokrasi seringkali dikaitkan dengan aparatur pemerintah di hampir seluruh negara di dunia ini. Istilah ini, urai Miftah (2003), hampir seumur dan setua umur pemerintahan. Secara praktis, dalam aktivitas keseharian masyarakat istilah “birokrasi” digunakan dengan makna atau maksud yang sama dengan istilah “pemerintahan”. Dalam pengelolaan suatu negara, birokrasi atau pemerintahan merupakan salah satu komponen penting yang berpengaruh pada kebijakan yang ditetapkan atau diambil oleh negara. Komponen lainnya, selain birokrasi, adalah masyarakat atau rakyat dari suatu negara.

Dewasa ini, terjadi perubahan paradigma dalam pengelolaan birokrasi pemerintahan. Menurut Miftah, sekarang paradigma manajemen pemerintahan telah banyak berubah dari sarwa negara ke sarwa masyarakat. Perubahan ini menandakan adanya perubahan gerak titik sentral “pelayanan” dalam pengelolaan suatu negara. Dalam sebuah negara yang demokrasinya masih berkembang, titik sentral perubahan “pelayanan” tersebut masih pada posisi yang labil, dalam pengertian masih terjadi proses tarik menarik antara birokrasi di satu sisi dan sisi lainnya, adalah rakyat. Idealnya, tujuan eksistensi birokrasi

pemerintahan untuk melayani kepentingan masyarakat. Dengan pemahaman seperti ini, maka kekuasaan yang selama ini berada pada penguasa telah beralih lokusnya berdomisili pada masyarakat. Segala sesuatu yang menjadi dan dibuat kebijakannya oleh pemerintah bersumber dari aspirasi, kebutuhan dan kepentingan rakyat.

Lebih lanjut urai Miftah, dahulu ketika pengelolaan pemerintahan di Indonesia masih kental dengan segala upaya yang sarwa negara, hampir semua kegiatan dalam masyarakat saat itu dimulai dari negara, dan yang amat berperan adalah penguasa negara. *Stake holder* dalam mengelola negara ini hanyalah aktor negara atau pemerintah (*governmental actors*). Publik dalam arti masyarakat dan rakyat (*non governmental actors*) tidak mempunyai peran kecuali sebagai obyek dan sasaran dari kebijakan negara atau pemerintah.

Perubahan paradigma pengelolaan birokrasi, dari serba negara ke serba rakyat, membawa pengaruh yang besar dalam tata kehidupan pemerintahan. Salah satu pengaruhnya antara lain, adalah ditematkannya rakyat pada posisi yang utama dalam mengukur keberhasilan pelayanan birokrasi pemerintahan. Manajemen pemerintahan tidak lagi berorientasi pada aspek pemerintahan (*government*), akan tetapi, beralih kepada aspek tata pemerintahan (*governance*). Tahun 1998, atas prakarsa EROPA (*Eastern Regional Organization for Public Administration*) bersama UNDP (*United Nations Development Program*) ketika menyelenggarakan General Assembly Meeting di Manila, menslogankan adanya perubahan paradigma “*from government to governance*”. Perubahan ini menandakan bahwa orientasi kekuasaan seperti yang disinggung di atas, tidak lagi berpusat pada penguasa yang mengemudikan pemerintahan, melainkan pada proses di mana rakyat memegang peran utamanya dalam menata pemerintahan. Pelayanan terbaik kepada rakyat menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi dihindari.

Istilah “good governance”, pertama kali dipopulerkan oleh lembaga dana internasional: World Bank, UNDP, dan IMF dalam rangka menjaga dan menjamin kelangsungan dana bantuan yang diberikan kepada negara-negara sasaran bantuan. Wacana ini mendapatkan relevansinya di Indonesia paling tidak dengan tiga sebab utama, yaitu: *pertama*, krisis ekonomi dan politik yang masih terus menerus berlangsung dan belum ada tanda-tanda akan segera berakhir; *kedua*, masih banyaknya korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan dalam penyelenggaraan negara; *ketiga*, kebijakan otonomi daerah. Alasan lain, masih belum optimalnya pelayanan birokrasi pemerintahan dan juga sektor swasta dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Good governance dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian. Dengan demikian ranah *good governance* tidak terbatas pada negara atau birokrasi pemerintahan, tetapi juga, pada ranah masyarakat sipil yang direpresentasikan oleh organisasi non pemerintah, seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan juga sektor swasta. Singkatnya, tuntutan terhadap *good governance* tidak selayaknya ditujukan hanya kepada penyelenggara negara atau pemerintahan, melainkan juga, pada masyarakat di luar struktur birokrasi pemerintahan yang secara getol dan bersemangat menuntut penyelenggara-raannya.

Konsep *good governance* memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan yang menekankan kesetaraan antara lembaga-lembaga negara baik pada tingkat pusat maupun daerah, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*). Berdasar pandangan ini, *good governance* berarti suatu kesepakatan menyangkut pengaturan pemerintahan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, sektor swasta, dan

masyarakat madani (*civil society*). Kesepakatan tersebut mencakup keseluruhan bentuk mekanisme, proses dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan di antara mereka. Santosa mengungkapkan, bahwa *governance* adalah pelaksanaan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa. Pelaksanaan kewenangan tersebut bisa dikatakan baik (*good*), jika dilakukan dengan efektif dan efisien, akuntabel serta transparan.

Andi Faisal Bakti (2000) memandang *good governance* merupakan tuntutan seluruh rakyat Indonesia terkait dengan pembagian kesempatan yang adil untuk menikmati hasil dan keuntungan pembangunan. Dia juga mengemukakan, *good governance* merupakan bagian tak terpisahkan dari proses demokrasi. Dan, *good governance* bermakna sebuah kekuatan atau kekuasaan yang dilaksanakan oleh masyarakat pada semua level manajemen sosial, budaya, politik dan sumber-sumber ekonomi. Bakti, juga menjelaskan, *good governance* direfleksikan dalam performans pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, adil, transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan pengertian di atas, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang baik dalam ukuran proses maupun hasil-hasilnya. Semua unsur bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat dan lepas dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat proses pembangunan. Pemerintahan juga bisa dikatakan baik, jika pembangunan dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal menuju cita kesejahteraan dan kemakmuran sebagai basis model dari pemerintahan. Pemerintahan juga dapat dikatakan baik, jika produktif dan memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi rakyat meningkat baik dalam aspek produktivitas maupun dalam daya

belinya, kesejahteraan spiritualnya terus meningkat dengan indikator rasa aman, tenang, dan bahagia serta *sense of nationality* yang baik.

Menuju Terwujudnya *Good Governance*: Perspektif Agama

Kini, cita *good governance* sudah menjadi bagian dari wacana pengembangan birokrasi pemerintahan dan pembangunan ke depan. Dari berbagai hasil kajian, sebagaimana ditulis Ubaidillah (2006), ada sembilan (9) aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*, yaitu:

1. Partisipasi
2. Penegakan Hukum
3. Transparansi
4. Responsif
5. Orientasi Kesepakatan
6. Keadilan
7. Efektivitas
8. Akuntabilitas
9. Visi Strategis.

Untuk mewujudkan cita *good governance* dengan asas-asas fundamental, sebagaimana tersebut, setidaknya harus dilakukan lima (5) aspek prioritas, yaitu:

1. Penguatan Fungsi dan Peran Lembaga Perwakilan
2. Kemandirian Lembaga Peradilan
3. Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Penuh Integritas
4. Masyarakat Madani yang Kuat dan Partisipatif
5. Penguatan Upaya Otonomi Daerah.

Dalam rangka membangun *good governance* di daerah, prinsip-prinsip fundamental yang menopang tegaknya *good governance* harus diperhatikan dan diwujudkan tanpa terkecuali.

Tidak kalah pentingnya, *good governance* sebagai sebuah paradigma dapat terwujud bila ketiga pilar pendukungnya dapat

berfungsi secara baik, yaitu: negara, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*). Negara dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk merubah pola pelayanan dari birokrasi elitis ke birokrasi populis. Sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintahan pun harus memberikan kontribusi dalam upaya pengelolaan sumber daya tersebut. Perwujudan cita good governance, pada akhirnya, mensyaratkan keterlibatan organisasi kemasyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang negara. Terakhir, yang tidak bisa diabaikan adalah aspek moralitas yang seyogianya mewarnai eksistensi, aktivitas, dan interaksi ketiga pilar pendukung good governance. Pada aspek yang terakhir inilah, terlihat peluang agama untuk memberikan kontribusinya, terutama pada upaya penguatan moralitas dan interpretasi ajaran yang sejalan dengan nilai-nilai fundamental *good governance*.

Selama ini, moral selalu dikesampingkan, tidak menjadi perhatian yang saksama dalam birokrasi pemerintah, hanya digunakan sebagai pelengkap permainan sumpah jabatan saja. Akan tetapi, setelah sumpah diucapkan dan pejabat birokrasi pemerintah mulai memangku jabatannya, sumpah tersebut mudah untuk dilupakan.

Moral seyogianya menghubungkan dan bertaut erat dengan ketiga komponen *good governance*: pemerintah, swasta dan rakyat yang saling berinteraksi menciptakan tata pemerintahan yang baik. Komponen moral harus mampu menyinari ketiga komponen tersebut. Moral juga harus menjadi landasan rakyat untuk berperan menciptakan tata pemerintahan yang baik. Demikian juga, komponen pemerintah dan swasta. Moral merupakan operasionalisasi dari sikap dan pribadi seseorang yang beragama. Ajaran agama melekat pada pribadi-pribadi yang berada di ketiga komponen tersebut.

Dari uraian tersebut di atas, tampak adanya keterkaitan yang sangat erat antara birokrasi pemerintahan dan upaya perwujudan *good*

governance. Keterkaitan antara keduanya terlihat terutama pada upaya memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat atau rakyat. Selain itu, juga tampak pada upaya memberikan respon positif terhadap tuntutan reformasi dan demokrasi yang merupakan fenomena global.

Perspektif agama terhadap masalah ini, selain menunjukkan komitmen dan konsistensi bangsa dan negara terhadap nilai-nilai religius dan landasan filosofis negara, juga, menunjukkan ada aspek lain yang secara organik memang bukan menjadi unsur utama *good governance*, tetapi tetap memiliki eksistensi yang tidak kalah pentingnya. Aspek tersebut adalah aspek moralitas yang mengacu kepada nilai-nilai universal agama, yakni: keimanan dan ketakwaan. Dalam khazanah peradaban Islam, terdapat ungkapan “Sayyidul Qaumi Khadimuhum” berarti “pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi kaum itu”. Mungkin ini yang menginspirasi sebagian elit politik mengungus slogan “melayani bukan dilayani”. Tetapi, bisakah diwujudkan?

9. Merawat Keinsafan Hidup dalam Semangat Berqurban

Umat Islam telah mengetahui perayaan ‘Idul Qurban atau ‘Idul Adha merupakan momentum untuk kembali mengingat dan merenungi kisah hidup dan pengorbanan serta keteladanan Nabiullah Ibrahim as. bersama keluarganya, Ismail as. dan Hajar. Kisah hidup Nabiullah Ibrahim as. dapat disebut sebagai sebuah kisah teladan pengorbanan agung.

Suasana di hari ‘Idul Adha ini, suasana dengan nuansa kebahagiaan dan kebajikan serta kekhusyu’an beribadah merupakan wujud nyata dari hasil pola kehidupan masyarakat yang selaras dengan suasana kepemimpinan. Suasana ini dapat berlangsung terus manakala

interaksi masyarakat dan pemimpinnya senantiasa dalam nuansa positif. Interaksi masyarakat dilandasi oleh rasa saling percaya (*siattepperi, sikata'pai*), saling menghormati (*sipakatau*), saling sayang-menyayangi (*sikamasei*), dan saling mengingatkan (*sipakainge'*) dalam kebaikan.

Alangkah nikmat dan bahagianya suasana kehidupan di Tana Luwu ini, *wanua mappatuwo naewai alena* (negeri prospektif dan mandiri) manakala nilai-nilai budaya yang sejalan dengan nilai ajaran Islam, seperti nilai-nilai *siatepperi-sikata'pai, sipakatau, sikamasei, dan sipakainge'*, menghiasi tingkah laku setiap Wija to Luwu dan segenap warga masyarakatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai itu pula, kita bisa menunjukkan jati diri sesungguhnya sebagai Wija to Luwu, yang senantiasa baik prilakunya dan baik juga anak-keturunannya (*madeceng ampena na madecetto abbatirenna*).

Melalui pelaksanaan Idul Adha kali ini, umat Islam menapaktifikasi kisah hidup dan pengorbanan Nabiullah Ibrahim as. yang penuh dengan nilai ajaran, hikmah, dan keteladanan. Nabiullah Ibrahim as. dan keluarganya, Ismail as. dan Hajar, menunjukkan banyak hal untuk diteladani baik bagi individu, keluarga, maupun bagi masyarakat. Juga, keteladanan bagi pemimpin dan yang dipimpin. Bahkan, keteladanan bagi umat Islam dan umat manusia seluruhnya.

Nabiullah Ibrahim as. memperkenalkan kepada umat manusia ajaran ketauhidan. Tuhan yang diperkenalkannya bukan sekadar tuhan bagi suku, bangsa atau golongan tertentu, tetapi Tuhan seru sekalian alam. Tuhan yang imanen sekaligus transenden, yang dekat kepada manusia, menyertai mereka semua secara keseluruhan dan orang-perorang, baik sendirian atau ketika dalam kelompok, pada saat diam atau bergerak, tidur atau jaga. Bahkan, sebelum dan sesudah kehidupan dan kematiannya Tuhan menyertai manusia.

Prinsip-prinsip keyakinan yang dianut Nabiullah Ibrahim as. pada intinya meliputi: *pertama*, pengakuan akan keesaan Tuhan serta penolakan terhadap segala macam bentuk kemusyrikan, baik berupa patung-patung, binatang, bulan dan matahari, bahkan juga segala sesuatu selain Allah swt. *Kedua*, keyakinan tentang adanya neraca keadilan Tuhan dalam kehidupan ini dan yang puncaknya akan diperoleh setiap makhluk pada hari kebangkitan kelak. *Ketiga*, keyakinan tentang kemanusiaan yang bersifat universal, tiada perbedaan dalam kemanusiaan seseorang dengan lainnya, betapapun terdapat perbedaan di antara mereka dalam hal-hal lainnya.

Keyakinan akan keesaan Tuhan mengantar manusia menyadari bahwa semua manusia berada dalam kedudukan yang sama dari segi nilai kemanusiaan. Karena, semua mereka diciptakan dan berada di bawah kekuasaan Allah swt. Surah al-Hujurat [49] ayat 13 menunjukkan eratnya kaitan antara keyakinan akan keesaan Tuhan dengan persamaan nilai kemanusiaan. Allah swt. berfirman:

Terjemahnya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Neraca keadilan ilahi yang dikumandangkan Nabiullah Ibrahim as. mempersamakan semua manusia di hadapan Allah swt. Sehingga, betapapun kuatnya seseorang, dia tetap sama di hadapan Tuhan dengan orang yang lemah-lemahnya. Karena, kekuatan si kuat diperoleh dari Allah swt., sedangkan kelemahan si lemah adalah atas hikmah kebijaksanaanNya. Dia, Allah swt. dapat mencabut atau

menganugerahkan kekuatan itu kepada siapa saja sesuai sunnah-sunnah yang ditetapkanNya.

Prinsip-prinsip keyakinan yang dibawa Nabiullah Ibrahim as. tersebut perlu diaktualkan dalam kehidupan umat Islam dewasa ini. Aktualisasi perlu dilakukan mengingat tantangan kehidupan modern dengan segala dampak globalisasi di semua sektor kehidupan manusia. Sehingga, keharmonisan tatanan kehidupan manusia di alam ini dapat terwujud. Bukankah keyakinan akan keesaan Tuhan membawa penghambaan hanya kepada Allah swt. dan menolak segala macam penghambaan kepada siapapun dan apapun selainnya? Menolak penghambaan kepada makhluk seberapa pun berkuasanya dia? Menolak penghambaan kepada jabatan dan kekayaan seberapa pun inginnya seseorang untuk mendapatkannya?

Bukankah keyakinan akan neraca keadilan Tuhan mengantar seseorang kepada keyakinan akan tanggung jawab dari semua tindakannya? Dengan keyakinan ini, seseorang akan memiliki keinsafan bahwa setiap perbuatan betapapun kecilnya pasti diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah swt.

Bukankah keyakinan akan persamaan manusia membawa seseorang pada penghormatan nilai kemanusiaan? Sehingga, seseorang karena nilai kemanusiaannya itu, dia dihormati, dilindungi, dan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia sama dengan manusia lainnya tanpa melihat perbedaan status, derajat, suku, bangsa, dan bahkan agamanya.

Berkaitan dengan prinsip keesaan Allah, neraca keadilan dan ajaran persamaan ini, di antara para pemimpin kita ada yang enggan dicium tangannya. Keengganan itu adalah satu bentuk kehati-hatian agar tidak terjerumus ke dalam kultus individu, yakni suatu sikap berlebih-lebihan dalam memuja seseorang. Namun, cium tangan tulus seseorang demi penghormatan kepada mereka yang memang pantas,

termasuk kepada orangtua dan guru bukan pula sesuatu yang tidak boleh diterima.

Selain membawa nilai-nilai ajaran seperti tersebut di atas, Nabiullah Ibrahim as. juga memberikan keteladanan. Hal ini dapat kita telusuri pada kisah pengorbanan Nabiullah Ibrahim as. dan putranya, Ismail as. Sesuai dengan perintah Allah swt. yang diperolehnya melalui mimpi, agar menyembelih Ismail as., Nabiullah Ibrahim as. dan Ismail as. pun melaksanakan perintah Allah swt. Namun, Ismail yang sudah siap menjalani perintah kurban, dengan kekuasaanNya, Allah swt. menggantinya dengan domba. Pengalaman ayah dan anak terekam jelas dalam al-Quran surah al-Shaffaat [37] ayat 102.

Dua manusia mulia ini, yaitu Ibrahim dan Ismail, telah menunjukkan sebuah konsep penghambaan yang paling agung. Bagi siapapun juga, hal paling berharga yang dimiliki oleh manusia adalah nyawanya. Bagi seorang ayah, nyawa anak kandung adalah benda paling bernilai kedua. Bahkan, dalam banyak kasus, seorang ayah seringkali lebih menghargai nyawa anaknya daripada nyawa dirinya sendiri. Karena itu, kepatuhan Nabiullah Ibrahim as. untuk mengorbankan nyawa anaknya, dan kepatuhan Ismail untuk mengorbankan nyawanya sendiri, demi menaati perintah Allah, jelas hanya bisa terjadi karena keduanya sudah sampai kepada tingkat penghambaan tertinggi.

Nabiullah Ibrahim as. dan Ismail as., dua manusia terbaik yang ada di bumi telah berhasil mengangkat nilai martabat manusia pada kedudukan yang sesungguhnya, penghambaan secara total kepada Sang Khalik. Nabiullah Ibrahim as. menyerahkan putranya untuk disembelih dihadapan Allah swt., sebuah penggambaran totalitas ketertundukan seorang manusia kepada Tuhannya.

Melalui Nabiullah Ibrahim as., manusia melihat sebuah nilai pengorbanan yang bersih dari nilai-nilai kesombongan, keangkuhan,

dan kesemuanya hanya tertunduk patuh padanya. Kerelaan Ismail untuk disembelih merupakan perwujudan cinta kasih yang sangat luar biasa kepada sang ayah atas nama Tuhan. Ketika pengorbanan diminta, tak ada perdebatan, tak ada keberatan, dan tak ada penolakan sedikitpun. Inilah manusia yang mulia yang mampu membebaskan dirinya dari belenggu nafsu yang selalu mengajak untuk cinta dunia secara mutlak.

Nabiullah Ibrahim as. dan Ismail as. telah mendidik umat manusia untuk menundukkan segala nafsu kedengkiannya, amarah, dan berhasil mendudukkan manusia pada porsi yang sesungguhnya: sebagai khalifah (pemimpin) tentu juga sebagai abdullah (hamba Allah). Semangat berkorban untuk sesama, memberikan yang terbaik yang mereka miliki dengan landasan cinta kasih kepada Allah dan sesama manusia, dan akhirnya mampu membangun kembali benang-benang persaudaraan yang telah putus. Inilah nilai-nilai pengorbanan hakiki yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim as. kepada kita sebagai umat manusia.

Karena kesabaran dan ketaatan keduanya, Allah swt. berkenan mengganti Ismail dengan seekor domba. Tradisi ini terus berlanjut hingga sekarang. Setiap tahun umat Islam berkorban domba, sapi, atau unta, dan mengabadikannya menjadi hari raya 'Idul Adha ('Idul Qurban).

Digantinya Ismail dengan seekor domba menandai lahirnya revolusi besar dalam sejarah peradaban manusia, yakni dihapuskannya pengorbanan manusia. Manusia itu terlalu mahal untuk dikorbankan. Hikmahnya, kita harus menghormati manusia, jangan mengorbankan manusia, bahagiakan manusia, dan bantu mereka yang membutuhkan bantuan.

'Idul Adha adalah momentum menumbuhkan rasa kasih sayang di antara sesama. 'Idul Adha harus kita manfaatkan sebagai

momentum menyambung tali silaturahmi, melatih kepekaan, empati, dan mengikis kebencian di hati. Inilah pesan indah yang dicanangkan dua manusia agung; Ibrahim Khalilullah as. dan juga, Nabi Muhammad saw.

Kata “qurban” artinya pendekatan, yaitu pendekatan kepada Allah swt. atau suatu usaha untuk mendekati Allah. Secara tegas al-Qur’an mengatakan bahwa yang sampai kepada Tuhan bukanlah daging dan darah qurban, melainkan takwa yang ada dalam diri kita.

Melakukan qurban adalah melakukan sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Yakni, mendekatkan diri kita kepada “tujuan hidup”. Sebab, memang kita berasal dari Tuhan dan kembali kepadaNya. Oleh karena itu, tindakan berqurban adalah tindakan yang disertai pandangan jauh ke depan, yang menunjukkan bahwa kita tidak mudah tertipu oleh kesenangan sementara, kemudian melupakan kebahagiaan abadi, kebahagiaan selama-lamanya.

Nabiullah Ibrahim as. bersedia mengurbankan anaknya, lambang kesenangan dan kebahagiaan sesaat dan sementara, yakni kesenangan duniawi, karena dia tahu dan yakin akan adanya kebahagiaan abadi dalam ridha dan perkenan Allah swt. Ismail as. pun tidak mau terkecoh oleh bayangan hendak hidup senang di dunia, tapi kemudian melupakan hidup yang lebih abadi di akhirat kelak. Maka, dia pun bersedia mengakhiri hidupnya yang toh tidak terlalu panjang itu, dan pasrah kepada Allah, diqurbankan oleh ayahnya.

Kesediaan Nabiullah Ibrahim as. dan Ismail as. memenuhi perintah Allah saw. untuk berqurban, tidak lain karena mereka menginsafi bahwa hidup ini tidak mempunyai apa-apa kecuali jika mempunyai makna dan tujuan. Karena mereka percaya bahwa di dalam semangat berqurban itulah makna dan tujuan hidup ini mereka temukan. Serta menginsafi bahwa makna dan tujuan hidup yang benar ada dalam ridha Allah swt.

Ridha Allah swt. itulah juga yang menjadi tujuan hidup kita. Sebab, dalam ridha atau perkenan Tuhan itulah kita akan merasakan kebahagiaan sejati yang kekal abadi. Maka, seperti dikatakan kaum Sufi, “Ya Tuhan, Engkaulah tujuanku, dan ridhaMu lah yang kukari.”

Nabiullah Ibrahim as. dan Ismail as. menuju Tuhan, dan mereka temukan Tuhan dalam perintahNya untuk berqurban. Mereka mencari ridha dan perkenan itu dalam semangat berqurban. Sebab, sekalipun tidak terjadi Ibrahim menqurbankan Ismail, karena telah diganti dengan sembelihan yang besar, namun mereka telah memperlihatkan dengan sebaik-baiknya bahwa mereka memiliki semangat berqurban yang tinggi.

Sebagai analogi dari keinsafan Nabiullah Ibrahim as. dan Ismail as., kita bisa mengatakan “seseorang boleh berhasil meraih kesuksesan, memenangkan kompetisi, dan mewujudkan cita-citanya dalam hidup, namun hakikat kemenangan ada pada semangat berqurban, yakni suatu semangat yang mendekatkan manusia pada keinsafan makna dan tujuan hidupnya.” Bahwa kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadaNya.

Semoga dengan landasan semangat berqurban yang mengantar pada keinsafan hidup di bawah pimpinan dan bimbingan kepemimpinan baru yang bercermin pada keteladanan Nabiullah Ibrahim as. dan keluarganya, Ismail as dan Hajar mampu mewujudkan kehidupan yang damai, adil, dan sejahtera di Tana Luwu ini. Suatu wujud kehidupan yang sudah sejak lama diperjuangkan oleh para orangtua kita dan kini tongkatnya berada di tangan pelanjutnya. Semoga pula, para pemimpin mampu membangun kebanggaan warga sebagai bagian Wija to Luwu, mampu mewujudkan kesejahteraan, dan mampu meningkatkan kualitas peradaban demi umat manusia. Amin.



BAGIAN KELIMA:
DAKWAH, JIHAD DAN GLOBALISASI

IAIN PALOPO

1. Amien Rais tentang Dakwah dan Politik

Sekitar dua belas tahun lampau, ketika penulis menyusun skripsi dengan judul "Dakwah dan Relevansinya dengan Politik", salah satu buku yang penulis rujuk adalah buku M. Amien Rais (MAR) berjudul "Cakrawala Islam antara Cita dan Fakta" (1989). Boleh dikata, pandangan MAR tentang dakwah dan hubungannya dengan politik dalam buku tersebut amat penting untuk dikaji oleh para muballigh dan para politisi muslim. Terutama, karena dalam masyarakat terdapat anggapan dan pemahaman yang tidak terlalu jelas bahkan cenderung keliru mengenai hubungan dakwah dan politik. Selain itu, menjadi penting pula melihat fenomena perilaku para politikus yang tidak lagi mengindahkan etika dan moral dalam berpolitik.

Tidak jarang dakwah dan politik dipandang sebagai kegiatan terpisah dan tidak berhubungan sama sekali. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa politik adalah sesuatu yang kotor, sedang dakwah adalah kegiatan yang mengajak kepada kebaikan. Sepintas, tampak pemikiran ini dapat dibenarkan, tetapi jika ditelusuri lebih jauh ternyata pemikiran tersebut bukan saja keliru, namun juga telah mereduksi ajaran Islam sebagai agama sempurna. Kekeliruan ini juga berakibat para muballigh tidak berani dan tidak mau berbicara politik. Di sisi lain, para politisi muslim pun berpandangan politik sebagai kegiatan duniawi semata, tak berhubungan dengan agama, dakwah dan jihad.

Dapat dimengerti kemudian, mengapa masyarakat memandangi aneh jika ada ulama, muballigh, dan kiyai atau tokoh agama yang terjun ke masalah politik. Seolah-olah setelah mereka terlibat dengan persoalan-persoalan politik, keulamaan dan ketokohan mereka berkurang bahkan ternodai. Kasus seperti ini bisa kita lihat ketika K.H.

Zainuddin MZ, "sang da'i sejuta umat" masuk ke partai politik bahkan kemudian mendirikan partai bintang reformasi (PBR). Karena ketidaktahuan sebagian masyarakat kasus ini dicitrakan negatif dan kemudian dibesar-besarkan oleh kalangan tertentu untuk kepentingan mereka.

Tetapi, sikap anti ulama dan muballigh berpolitik ini tampak tidak konsisten. Hal ini terlihat dari berbagai manuver politik menjelang dan selama pemilu berlangsung. Masyarakat menyaksikan berbagai cara dan pendekatan ditempuh untuk merebut simpati dan dukungan dari para ulama dan para pengikutnya. Menerima dan melibatkan para ulama dalam kegiatan dukung mendukung saja, tetapi, menolak keterlibatan mereka secara langsung dalam kegiatan politik dan melarang mereka bicara politik, bagi saya bukan hanya aneh tetapi juga lucu. Terkesan para ulama hanya ingin diperas tenaganya, seperti kata pepatah "habis manis sepeh dibuang".

Dakwah dan politik bagi MAR adalah dua hal yang tidak terpisah. Dakwah dan politik memiliki hubungan fungsional yang sering tidak dimengerti dengan baik, sehingga banyak yang menganggap kegiatan politik berdiri sendiri, terpisah sama sekali dari kegiatan dakwah. Bahkan menurut MAR, dalam masyarakat seolah-olah ada kesan kurang positif terhadap kegiatan politik, seolah-olah politik selalu mengandung kecurangan, hipokrisi, ambisi buta, pengkhianatan, dan pelbagai konotasi buruk lainnya. Lebih jelasnya, ada pendapat mengatakan politik tidak perlu sama sekali dikaitkan dengan moralitas agama. Alasannya, politik itu hanya merupakan urusan dunia semata-mata, sedang dunia menurutnya hanya main-main dan permainan belaka.

MAR menambahkan, kegiatan dakwah dalam Islam meliputi semua dimensi kehidupan manusia, karena *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar* juga meliputi segala bidang kehidupan. Tetapi, jangan

dilupakan para pendukung *amar mungkar* dan *nabi ma'ruf* juga menggunakan segenap jalur kegiatan kehidupan. Secara demikian, kegiatan budaya, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain, dapat dijadikan kegiatan dakwah islamiah, yakni dakwah yang menjadikan Allah sebagai tujuan, maupun dakwah jahiliah, yakni dakwah yang menjadikan neraka sebagai muara akhir.

Pendapat MAR di atas menunjukkan kegiatan politik merupakan bagian dari dakwah. Kalau kegiatan politik dianggap bukan merupakan bagian dari dakwah, maka dakwah Islam akan mengalami ketimpangan bahkan kemunduran. Sehingga, mungkin saja terjadi, di dalam berpolitik seseorang melakukannya untuk politik *an sich*, padahal setiap muslim adalah da'i menurut kemampuan dan keahliannya masing-masing. Fenomena seperti ini sudah terlihat dalam beberapa kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif yang nota bene seorang muslim bahkan berasal dari partai berbasis muslim.

Politik dapat diibaratkan pisau bermata dua, dapat digunakan untuk tujuan positif atau negatif. Baik tidaknya suatu politik ditentukan oleh nilai-nilai yang mendasari politik itu sendiri dan menjadi keyakinan dari pelaku politik. Dalam kaitan ini, MAR membagi politik antara politik kualitas tinggi (*high politic*) dan politik kualitas rendah. Politik kualitas tinggi minimal memiliki tiga ciri, yaitu: jabatan politik disadari sebagai amanah masyarakat, jabatan politik mengandung pertanggungjawaban dan setiap kegiatan politik harus dikaitkan dengan prinsip persamaan. Sedang, jenis politik yang kedua minimal memiliki ciri-ciri: kekerasan, brutalitas, dan kekejaman merupakan cara-cara yang perlu diambil penguasa, penaklukan total terhadap musuh dianggap sebagai kebajikan tertinggi, dan dalam menjalankan kehidupan politik seorang penguasa harus dapat bermain seperti binatang buas.

Kearifan MAR dalam memahami politik seperti di atas, hemat saya bertumpu pada keyakinan dan pemahamannya terhadap ajaran Islam. Tampaknya, ia percaya bahwa Islam bisa dan seharusnya dihubungkan dengan berbagai segi dari kehidupan umat Islam. Paling tidak, etika dan moralitas yang terkandung dalam ajaran Islam harus menjadi bagian dari perilaku muslim termasuk dalam kegiatan berpolitik. Karena itu, mudah dipahami mengapa bagi MAR politik dan dakwah memiliki kaitan fungsional dan sebab itu, tidak dapat dipisahkan. Hal mana, sepanjang yang dapat diamati telah coba diaktualisasikannya selama ini.

Komitmen dan konsistensi MAR dengan pandangannya ini, tampak dengan nyata dari upaya reformasi yang digagasnya ketika sebagian dari kita justru menikmati kondisi *status quo* (keterpurukan) bangsa. Ketika sebagian dari kita: berusaha bermain untuk kepentingan sendiri, membantu kekuatan *status quo*, dan bahkan menentang reformasi seraya mengeluelukan masa lampau yang tidak gemilang, ia tampil sebagai lokomotif reformasi. Sayangnya, usaha MAR belum mendapat respon yang layak, malah ada usaha-usaha mendiskreditkannya bahwa kondisi bangsa yang tetap terpuruk hingga saat ini, semata-mata menjadi tanggung jawab MAR. Apa tidak keliru? Kalau anggapan ini berlaku, maka bagi saya, kita bisa terjebak "memposisikan penjahat sebagai pahlawan dan pahlawan sebagai penjahat". Padahal "bangsa besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya!".

2. Kritik Sosial melalui Dakwah

Aktivitas dakwah tidak dapat dipisahkan dari keseharian dan kehidupan manusia, terutama bagi umat Islam. Melalui dakwah kehidupan umat manusia dikembangkan dalam

berbagai segi. Demikian pula, Islam dan dakwah adalah dua sisi dari mata uang yang sama yang tidak dapat dipisahkan antara satu dari yang lainnya. Persoalannya bagaimana aktivitas dakwah bisa menjadi ujung tombak perubahan dan sekaligus ujung tombak pembangunan kehidupan. Ide pokok yang ingin ditekankan di sini, dakwah adalah aktivitas yang dilakukan dengan maksud agar terjadi suatu perubahan pada kehidupan manusia di segala segi. Tentu saja, perubahan ke arah lebih baik.

Sayangnya, dakwah belum dipahami secara komprehensif. Ia seringkali hanya dipandang sebagai aktivitas verbal keagamaan, yang dilakukan dalam bentuk ceramah atau khutbah. Isi atau kandungan pesannya pun seringkali dimuati dengan pesan-pesan yang kecenderungannya hanya berfokus pada aspek kesalahan pribadi minus kesalahan sosial. Dengan lain kata, pesan dakwah dibatasi pada aspek-aspek tertentu dan terbatas dari kehidupan manusia yang bersifat pribadi. Sehingga ketika pesan dakwah telah memasuki ranah politik, misalnya, akan dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim, aneh, dan bertentangan dengan dakwah itu sendiri. Pandangan ini tentu saja keliru dan tidak ada dasarnya dalam rujukan agama.

Ironisnya, pandangan di atas tidak hanya dianut oleh mereka yang awam soal dakwah (agama). Pandangan serupa juga tidak jarang ditemukan pada mereka yang terlibat langsung aktivitas dakwah. Kesan ini setidaknya penulis tangkap melalui berbagai aktivitas dakwah yang penulis sempat ikuti, di antaranya melalui pernyataan-pernyataan pejabat birokrasi, pengurus organisasi muballigh, dan melalui ceramah atau khutbah yang disampaikan oleh para muballigh. Tesis sementara penulis, hal ini merupakan salah satu sebab mengapa wujud ajaran agama sedikit dapat ditemukan dalam keseharian hidup. Dan, mengapa ajaran agama tetap mengawang-awang di langit tanpa pernah menyentuh bumi dan tumbuh subur memberi manfaat bagi manusia.

Pernyataan-pernyataan yang biasa dilontarkan sementara kalangan agar “dakwah jangan menghakimi, dakwah jangan dicampur dengan politik, jangan berpolitik di masjid, jangan menjadi jaksa dan hakim di mimbar, jangan mencederai mimbar dengan pernyataan keras, kalau berdakwah pilih pesan yang menyejukkan hati saja”, misalnya, memiliki indikasi adanya pemahaman yang belum utuh tentang dakwah. Pandangan seperti ini tidak saja mengurangi otoritas dakwah, tetapi juga, bisa melemahkan dakwah. Pada tingkat perubahan yang diharapkan dakwah tidak akan menuai banyak hasil.

Kasus lain yang serupa penulis alami tatkala beberapa tulisan untuk bulletin Hikmah Jumat STAIN Palopo ditolak oleh pengelolanya dengan alasan yang sama kelirunya, tulisan penulis dinilai terlalu “tinggi” sehingga sulit untuk dicerna masyarakat. Menanggapi alasan yang dikemukakan pengelola Hikmah Jumat tersebut, penulis kemukakan teori, “Gigi manusia ada hubungannya dengan jenis makanan yang dimakan. Bentuk gigi manusia yang memakan makanan keras akan berbeda dari gigi manusia yang memakan makanan lembek”. Teori ini menginspirasi penulis untuk juga menyatakan corak keberagaman masyarakat sangat bergantung pada jenis dan bentuk pesan dakwah yang disampaikan kepadanya. Selain itu, “hikmah” yang ingin disampaikan kepada masyarakat tidak hanya berkenaan dengan pendayagunaan hati, melainkan juga pendayagunaan akal pikiran!

Agama dan Kritik Sosial

Selain memberikan pencerahan hati untuk lebih mengenal Tuhan dan membina kesalehan pribadi, secara sosiologis setiap agama besar, menurut Komaruddin Hidayat (1998), pada masa awal kelahirannya selalu tampil sebagai gerakan kritik terhadap berbagai bentuk pelecehan hak asasi manusia yang terjadi dalam masyarakat. Figur nabi seperti Musa, Isa, dan Muhammad tidak saja dikenal oleh

sejarah sebagai peletak agama besar dunia, tetapi juga sebagai pejuang hak asasi manusia yang amat gigih dan tidak kenal kompromi. Itulah sebabnya ketika memulai berdakwah, tantangan yang pertama muncul selalu datang dari penguasa yang tengah menikmati kemewahan hidup di atas derita rakyat miskin papa dan tertindas.

Kehadiran agama oleh penguasa selalu dicurigai, dibenci, dan ingin dimusnahkan karena suara para nabi sarat dengan pesan dan semangat keadilan yang membuat para tiran gelisah karena mereka hanya memihak pada kepentingan dirinya. Makna dan semangat keadilan biasanya lebih dihayati oleh orang-orang miskin yang teraniaya, yang berada pada strata sosial terbawah dari masyarakat piramidal yang menjadi obyek eksploitasi oleh segelintir penguasa yang berada di puncak piramid. Karena itu, sejak awal kehadirannya agama selain mengajarkan aspek keimanan, juga tak pernah luput menyoroiti realitas sosial.

Pada permulaan misinya di kota komersil Makkah, Nabi Muhammad saw. menghadapi tiga persolaan besar yang saling terkait, yaitu (1) doktrin keesaan Allah (tauhid) berhadapan dengan lingkungan syirik; (2) prinsip keadilan sosial-ekonomi-politik berhadapan dengan sistem kezaliman dan penindasan sosial-ekonomi-politik aristokrasi Quraisy yang amat dominan; (3) doktrin eskatologis berupa iman pada Hari Akhir berhadapan dengan kepercayaan umum penduduk Makkah yang menyangkalnya, terutama kelompok elitnya (Syafi'i Ma'arif: 2004). Saat itu, kebanyakan penduduk Makkah, apalagi kelompok elitnya, terlalu sibuk mengurus dunia tanpa terikat oleh tujuan tertinggi berupa *al-akbarah*. Mereka sangat meterialistis dan hedonistis.

Lebih lanjut Syafi'i menguraikan, di antara ayat-ayat makkiyah yang ibarat ledakan gunung berapi menggambarkan situasi pincang dan situasi kegalauan sistem nilai itu seperti kutipan ayat QS. al-Takatsur (102): 1-2: "*Berlebib-lebihan (dalam menumpuk harta, kemuliaan,*

dan kekuasaan) telah melengahkan kamu. Hingga kamu masuk kubur”; QS. al-Rum (30): 7: “*Mereka mengetahui sisi luar dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap al-akhirah mereka tidak hirau”*; dan ayat QS. al-Fajr (89):17-20: “*Tidak! Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mendorong untuk memberi makan orang-orang miskin. Dan kamu labap harta warisan (orang) dengan cara rakus. (sedangkan) terhadap harta, cintamu sudah melampaui batas”*. Ayat-ayat ini, tampak membidik jantung keangkuhan aristokrasi Quraisy yang menjadi pusat kezaliman dan kemusyrikan yang menyatu dengan ketidakadilan.

Bidikan-bidikan oleh beberapa kutipan ayat al-Qur’an di atas terhadap realitas sosial-ekonomi-politik yang berlangsung di lingkungan masyarakat Makkah menunjukkan sejak awal agama Islam telah melakukan kritik sosial. Hal ini sekaligus menunjukkan Islam bukanlah agama “hati” semata, tetapi juga adalah agama yang menaruh perhatian terhadap realitas sosial-ekonomi-politik masyarakat. Karena itu, sangat naif ketika sebagian orang merasa aneh dan apalagi menolak jika agama dibenturkan dengan realitas yang terjadi.

Keharusan Kritik Sosial Lewat Dakwah

Ketika menyaksikan umat manusia berada di lorong sejarah yang amat kritis, di tengah tragedi peradaban yang memilukan dan ketika menyaksikan sebuah bangsa tercabik-cabik dan porak-poranda akibat prilaku KKN segelintir orang, apakah anda hanya akan meminta rakyat yang menjadi korban untuk bersabar dan menerima nasibnya? Lalu, dengan sangat meyakinkan anda meminta mereka untuk berdoa saja semoga bisa keluar dari derita? Kalau ini yang dilakukan sebenarnya kita sedang membenarkan tesis Karl Marx “agama adalah candu bagi kehidupan”. Jelas, di sini agama telah secara keliru diajarkan. Agama bukanlah bengkel ketok magic dan bukan pula sekadar tempat menyalurkan keluh kesah!

Untuk merespon perkembangan realitas kehidupan dalam segala dimensinya diperlukan orang-orang yang oleh al-Qur'an disebut sebagai kelompok *ulu al-bab*. Kelompok ini selain memiliki hati yang cerah juga memiliki kemerdekaan dan kebebasan berpikir dalam bingkai iman yang teramat tangguh. Wacana kosmologis menjadi sasaran bidik renungan dan pikirannya yang luas dan mendalam. Oleh sebab itu, dalam QS. Ali 'Imran (3): 190-191, di samping menekankan zikir yang berdimensi spiritual, pengembangan pikiran yang berpusat di otak harus mendapat prioritas yang sama agar sebuah keseimbangan dapat tercipta dalam hubungan kemanusiaan.

Menarik untuk dikemukakan, salah satu kegagalan mencolok gerakan agama adalah ketidakmampuannya untuk memelihara prestasinya dalam menegakkan etika dan etos transformasi sosial ketika agama memasuki kehidupan modern. Agama yang semula hadir membawa ruh peradaban serta tiang penyanggah bagi tegaknya etika sosial sekarang cenderung menjadi lembaga himpunan dogma teologis dan lembaga layanan ritual semata (Komaruddin: 1998). Padahal salah satu peran profetis agama adalah sebagai kekuatan kritik terhadap realitas sosial yang menyimpang.

Peran agama sebagai kekuatan kritik inilah yang sekarang ini perlu diupayakan melalui dakwah. Alasan utamanya mengingat mekanisme kritik sosial dan politik tidak berjalan efektif. Karena itu, muatan materi dakwah yang selama ini lebih menonjolkan bimbingan ritual dan siraman hati yang serba menyejukkan, perlu diubah orientasinya atau paling tidak ditambah dimensinya, yaitu melakukan kritik sosial. Etos dan tema kritik sosial perlu dihidupkan kembali, sebagaimana awal kebangkitan Islam, agar dakwah tidak terjebak sekadar sebagai aktivitas penyejuk hati.

Upaya menumbuhkan etos dan mengembalikan peran agama sebagai kekuatan kritik sosial melalui dakwah memerlukan beberapa

hal, di antaranya membangun pengertian yang sama tentang dakwah dan tugasnya, membangun kemampuan kritis aktivis dakwah, dan membangun kemampuan mengenali kecenderungan perkembangan realitas sosial. Namun perlu dicatat, keberhasilan upaya ini amat tergantung pada kerja-kerja kolektif aktivis dakwah bukan kerja orang-perorang. Karena itu, upaya ini harus didukung oleh sebuah institusi dakwah.

Saatnya melakukan kritik habis-habisan atau istilah Syafi'i Ma'arif (2004) "*to speak out*", kalau kita menginginkan negara dan bangsa ini tetap eksis dan tidak terjerembab pada kehancuran serta tragedi berkepanjangan.

3. Islam, Jihad, dan Terorisme

Akhir-akhir ini, di Indonesia dan dunia pada umumnya, muncul istilah "teror dan terorisme" yang seringkali dikaitkan dengan Islam sebagai agama. Paling tidak, istilah itu dikaitkan dengan orang yang menggunakan nama Islam. Dalam hal ini, publik sudah tidak asing dengan nama-nama; untuk tingkat lokal-regional, misalnya, ada nama Abu Bakar Ba'asyir, Umar al-Farouk, Imam Samudera, dan Amrozy; pada level internasional, ada nama Osama bin Laden dengan jaringan al-Qaedahnya. Walaupun, mereka yang disebut-sebut namanya ini, sampai sekarang-hingga tulisan ini dibuat-belum dapat dibuktikan keterlibatannya dalam berbagai tindakan teror dan terorisme. Keadaan ini memunculkan citra negatif bagi Islam dan umat Islam. Anggapan yang segera bisa muncul di benak orang-orang yang tidak memahami Islam, Islam mengajarkan terorisme.

Salah satu ajaran Islam yang seringkali dipandang sebagai biang tumbuh dan suburnya terorisme adalah jihad. Istilah jihad itu sendiri, bagi Barat, mengandung stigma dan citra yang negatif. Jihad dalam

pandangan mereka identik dengan perang suci (*holy war*). Bahkan, ajaran jihad inilah, menurut mereka, yang telah melahirkan fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme di mana-mana. Bagi Barat, istilah “jihad” seolah-olah telah menjadi semacam “hantu” yang menakutkan. Betapa tidak, tindakan-tindakan bom bunuh diri (*suicide bomb*) dengan sasaran kepentingan-kepentingan Barat terjadi dan dipandang lahir dari semangat jihad. Semangat jihad seperti ini, membuat Islam ditakuti karena mengajarkan penganutnya berani bersahabat dengan ketidakpastian tertinggi, kematian.

Pandangan Barat mengenai ajaran jihad ini, boleh jadi, tidak dapat sepenuhnya disalahkan. Apalagi jika, sejarah Islam yang diwarnai dengan perang dan semangat ekspansi wilayah ditengok kembali. Kekeliruan Barat, kiranya, terlalu mereduksi ajaran jihad sebagai perang suci dalam konteks Kristen Eropa, sebagai perang melawan orang kafir. Karena, secara historis, perang yang terjadi umumnya dilakukan atas dasar politik dan sebagai tindakan defensif terhadap serangan dari luar. Selain itu, perang hanya salah satu implementasi jihad. Jihad dalam bentuk ini dilakukan berkenaan dengan pertempuran melawan orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam, sebagaimana juga dalam tradisi Romawi Kuno dan konsep perang salib (*crusade*), dipandang sebagai perang keadilan (*bellum justum*) dan perang kesalehan (*bellum pium*).

Tragedi “911”; serangan terhadap *World Trade Center*, Pentagon, dan tragedi bom Bali, semakin meneguhkan pandangan Amerika akan adanya jaringan terorisme internasional. Peristiwa-peristiwa ini memetakan dunia dalam dua kelompok: pendukung atau lawan terorisme. Presiden Bush malah menyampaikan ancamannya, “*if you’re not with us, you’re against us*”. Ironisnya, tindakan-tindakan terorisme ini dikaitkan dengan Islam dan umat Islam. Umat Islam seolah menjadi “terdakwa”. Taruhlah, pelakunya orang-orang yang

beragama Islam, tetapi jelas, tindakan teroris semacam itu tidak dapat dipandang sejalan dengan ajaran Islam. Tatkala tindakan semacam itu dilakukan, maka sebenarnya orang Islam yang melakukannya sedang tidak menjalankan agamanya.

Apa sebenarnya yang dimaksud teror dan terorisme itu, dan apa hubungannya dengan jihad? Teror dan terorisme sangat sulit didefinisikan. Salah satu alasan pokok terjadinya kesulitan dalam mendefinisikannya, karena, ia merupakan masalah moral yang sulit. Pengertian teror dan terorisme, umumnya, terletak pada justifikasi moral pihak yang mendefinisikannya, sifat subyektif teror itu sendiri, dan penggunaannya yang hampir sepenuhnya pejoratif. Terorisme itu sendiri bisa dilakukan dengan berbagai motivasi: karena alasan agama, ideologi, memperjuangkan kemerdekaan, membebaskan diri dari ketidakadilan, dan karena, adanya kepentingan tertentu.

Teror mengandung hubungan antara empat unsur yang strategis, antara pelaku kejahatan, korban, penonton, dan sasaran. Teror adalah digunakannya “kekerasan” sebagai alat komunikasi antara pelaku kejahatan dan sasaran target di muka umum. Menurut Biro Investigasi Federal (FBI) Amerika, terorisme adalah tindakan kekerasan melawan hukum atau kejahatan melawan orang-orang atau perbuatan dengan mengintimidasi atau memaksa satu pemerintah, warga sipil dan unsur masyarakat lainnya; dengan tujuan mencapai target sosial dan politik tertentu. Dalam PERPU No. 1 tahun 2002 tentang anti terorisme, tindak pidana terorisme itu disebutkan unsur-unsurnya; adanya pelaku kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan (intimidasi), korban kecelakaan, termasuk kerusakan dan kehancuran obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Dalam PERPU tersebut, yang dimaksud dengan pelaku kejahatan tindak pidana terorisme ialah

perorangan atau korporasi, padahal, terorisme dapat juga dilakukan oleh negara (*state terrorism*)

Pendapat lain, terorisme adalah penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstranormal, khususnya penggunaan atau ancaman kekerasan. Dalam pengertian seperti ini, ada dua kategori penggunaan teror. *Pertama*, adalah teror yang dijalankan penguasa untuk menindas tantangan terhadap kekuasaan mereka; *kedua*, teror yang dilakukan mereka yang ingin mengganggu tatanan yang mapan untuk kemudian mengganggu tatanan yang mapan itu.

Kategori lain mengenai terorisme menyebutkan adanya empat jenis terorisme: kriminal, psikis, perang, dan politik. *Terorisme kriminal* didefinisikan sebagai penggunaan teror secara sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan material; *terorisme psikis* mempunyai tujuan-tujuan mistik, keagamaan atau magis; *terorisme perang* bertujuan melumpuhkan lawan, menghancurkan pertahanan, dan melumpuhkan kekuatan bertarung sehingga dapat menghancurkannya; sedangkan *terorisme politik*, secara umum didefinisikan sebagai penggunaan atau ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuan politik.

Walaupun, masih tetap sulit untuk disepakati definisi teror dan terorisme, setidaknya dapat dikemukakan teror dan terorisme melibatkan: cara-cara penggunaan kekerasan, intimidasi atau ancaman; bisa dilakukan oleh orang-perorangan, kelompok atau negara; menimbulkan suasana tidak aman dan ketakutan ; dan mempunyai target tertentu, yang dapat dimotivasi oleh kepentingan atas nama “agama”, ideologi, dan perjuangan bagi sebuah tatanan kehidupan. Selain itu, hampir bisa dipastikan, tindakan teror dan terorisme, mesti meminta korban, baik fisik maupun non fisik.

Persoalannya kemudian, apakah tindakan teror dan terorisme itu sah (*justifiable*) menurut agama? Dan apakah terorisme bisa diidentikkan dengan jihad? Mengidentikkan terorisme sebagai jihad, jelas merupakan pandangan yang keliru. Sebab, sebagai agama, pada dasarnya Islam tidak menganjurkan cara-cara kekerasan, ancaman atau intimidasi untuk menyebarkan Islam. Bahkan, setiap muslim yang baik pasti hapal ayat al-Quran yang menyatakan: “*Tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam*”. Islam, dinyatakan sebagai “*Rahmat bagi seluruh alam*”. Dan juga, ayat al-Quran yang artinya: “*Barangsiapa yang membunuh satu jiwa tanpa alasan yang baik, maka dosanya sama dengan membunuh umat manusia seluruhnya*”.

Jihad adalah salah satu ajaran Islam yang fundamental. Kajian atas sumber-sumber utama Islam: al-Quran dan Hadis, menunjukkan jihad tidak dapat diidentikkan dengan perang apalagi terorisme. Secara etimologis, kata “jihad” berasal dari akar kata yang berarti “berjuang keras” dan “melukiskan usaha maksimal yang dilakukan seseorang untuk melawan sesuatu yang keliru”. Dalam al-Quran, kata jihad sering diikuti frasa *fi sabilillah* (di jalan Allah). Orang-orang beriman diperintahkan berjuang dengan harta dan segenap potensi yang dimiliki oleh mereka. Dalam Hadis, disebutkan manusia yang paling utama adalah “*Seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan potensi diri dan hartanya*”. Salah satu bentuknya, menurut Hadis juga, “*Menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim*”.

Ajaran jihad mencakup semua aspek kehidupan Muslim. Sejak yang paling batin hingga yang paling lahir: perang spiritual melawan dorongan hawa nafsu (*mujahadah*); perjuangan untuk kesempurnaan jiwa atau tindakan (*jahada*); kebijakan pikir sebagai pedang bagi etika Islam (*amar ma'ruf nahi mungkar*); dan berjuang atau berperang di jalan Allah (*qital fi sabilillah*). Dengan begitu, jihad yang diperintahkan oleh Allah bukanlah dengan perang semata, apalagi melalui tindakan

terorisme. Perang hanya salah satu bentuk jihad, itupun dilakukan dalam kondisi tertentu dan bersyarat. Karenanya, Jihad dapat dilakukan dengan hati, lidah, tangan, dan atau dengan pedang.

Setiap Muslim dianugerahi Allah kemampuan untuk melakukan jihad sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Muslim yang berilmu berjihad dengan kemampuan akademik yang dimilikinya; Muslim yang politikus berjihad dengan kemampuan seni berpolitik yang dikuasainya; Muslim yang wartawan berjihad dengan tulisannya; Muslim yang pengusaha berjihad dengan keterampilan berusaha; Muslim yang tentara berjihad dengan keterampilan menggunakan senjata; demikian seterusnya. Masing-masing potensi ini sama mulianya dan tidak kurang resikonya antara satu dari yang lainnya. Kematian sebagai resiko tertinggi yang mungkin dialami seorang tentara yang berjihad, juga dapat dialami oleh seorang ilmuwan, politikus, pengusaha, dan wartawan.

Dari segi cara, jihad dapat dilakukan baik dengan cara kekerasan maupun non-kekerasan. Hanya saja, Islam selalu menekankan, kekerasan perang digunakan sebagai cara terakhir melawan pelaku kezaliman atas hak asasi manusia. Penetapan perang sebagai ekspresi jihad, hanya ditoleransi dalam beberapa kondisi: *pertama*, dalam rangka pembelaan diri dan mempertahankan negara dari agresi negara lain; *kedua*, adanya aksi penghambatan terhadap kebebasan berdakwah; dan *ketiga*, dalam rangka menolong pihak yang dizalimi. Dengan begitu, perang yang disyariatkan oleh Islam masuk dalam kategori perang untuk memperjuangkan keadilan (*bellum justum*), didasarkan pada alasan yang sah, terpaksa dilakukan, dan pelaksanaannya dilakukan menurut hukum.

Munculnya tindakan terorisme tidak dapat secara serta merta dinyatakan berasal dari ajaran Islam tentang jihad. Tindakan terorisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu itu lahir, lebih

disebabkan oleh tatanan dunia yang tidak adil; “buah” dari “terorisme politik resmi” yang dilancarkan Barat maupun rezim-rezim refresif Muslim, yang merupakan perpanjangan tangan Barat belaka. Timbulnya tindakan terorisme merupakan produk dari konspirasi *neo-kolonialisme* adikuasa dan Zionisme, yang langsung atau tidak, didukung oleh rezim-rezim tidak islami. Karena itu, selama pola hubungan Barat dan Timur masih tidak seimbang, dengan dominasi serta superioritas Barat, maka selama itu tindakan-tindakan terorisme akan tetap ada dan bermunculan. Kini saatnya bagi Barat, terutama Amerika, menyadari hal ini dan berusaha membangun komunikasi melalui cara yang lebih santun, tidak dengan cara-cara penggunaan kekerasan, yang dibungkus dengan nama perjuangan hak asasi manusia dan demokrasi. Walaupun, hak asasi manusia dan demokrasi yang mereka maksudkan sangat bias, beraroma minyak, mesiu, dan darah.

4. Globalisasi: antara Glokalisasi dan Grobalisasi

Sejumlah pakar menilai globalisasi hanyalah mitos. Intinya, mereka tidak hanya meragukan globalisasi, tetapi juga, bahkan berpandangan globalisasi tidak pernah bisa benar-benar terwujud. Kalau pun bisa terwujud, pertanyaan penting, siapa yang diuntungkan? Globalisasi, berkah bagi siapa? Berbagai penelitian dan laporan menyimpulkan, hanya negara-negara kaya sajalah yang diuntungkan oleh globalisasi. Kalau pun ada negara-negara miskin dan terkebelakang yang diuntungkan, itu hanya menyangkut sedikit penduduknya. Hal ini belum mempertimbangkan sejumlah dampak buruk yang ditimbulkannya. Karena itu pula, di berbagai belahan dunia, juga dapat disaksikan munculnya sejumlah gerakan anti globalisasi.

Globalisasi dari kata 'global' bermakna menyeluruh atau mencakup seluruh dunia, dengan tambahan sufiks 'isasi' yang bermakna proses. Singkatnya, globalisasi adalah proses pengglobalan atau proses mengglobalnya sesuatu. Dengan ungkapan lain, globalisasi juga bermakna proses kesejagatan, *single place*. Di sinilah muncul pertanyaan "Apakah yang mengglobal atau apakah yang mendunia?". Apakah yang mengglobal itu kekayaan, atau sebaliknya, yang mengglobal adalah kemiskinan? Dan, apakah yang mengglobal itu **Kapitalisme, Amerikanisasi, atau McDonaldisasi?**

Fenomena globalisasi ditandai dengan ekspansi pasar dan eskalasi perilaku konsumtif di berbagai bidang kehidupan. Fenomena konsumtif seperti ini menunjukkan berbagai varian penindasan kemanusiaan dalam bungkus masyarakat industrial yang mengejar pertumbuhan, meskipun memunculkan kesadaran semu masyarakat, sehingga terasa "penindasan itu memuaskan", tegas Heru Nugroho (2006). Ironisnya, kata Heru, konsumsi berlebih yang dilakukan oleh masyarakat dalam berbagai aspek dengan segala dampak negatifnya merupakan lokomotif penggerak ekonomi industrial tersebut. Keadaan ini didukung pula oleh berbagai lembaga finansial dan penggunaan media massa sebagai ujung tombak arena bujuk rayu untuk komoditas-komoditas tertentu.

Mencermati keadaan di atas, relevan memuat pandangan Amin Abdullah (2005) yang meragukan penggunaan produk-produk global (termasuk teknologi modern) tidak akan membawa pengaruh pada diri (sikap dan mentalitas) seseorang. Bagi Amin, alat-alat teknologi modern membawa serta konsep, pola pikir, mentalitas, cara analisis, metodologi, cara pandang, cara hidup, life style, serta nilai-nilai dasar yang bercampur menyatu dengan para penggunanya. Sekadar contoh, penggunaan hand phone yang sekarang semakin canggih tidak hanya

berpengaruh pada aspek lahiriah, tetapi juga pada aspek mentalitas seseorang.

Sejauh ini, ada dua tipe globalisasi menurut George Ritzer (2006), yaitu glocalisasi dan grobalisasi. Tipe pertama, glocalisasi, istilah ini dikemukakan Robertson untuk menentang ide globalisasi yang menurutnya tidak lain merupakan imperialisme kultural. Robertson menentang globalisasi kultural melalui konsepnya yang terkenal "glocalization", di mana dunia global dilihat berinteraksi dengan dunia lokal untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda (heterogenitas), glocal. Glocalization, 'global' plus 'localization', kira-kira begitu.

Tipe kedua, grobalisasi, istilah baru yang diciptakan Ritzer secara paralel dengan glocalisasi, yang digunakan untuk menggambarkan proses dalam mana pemerintah-pemerintah pertumbuhan mendorong berbagai organisasi untuk melakukan ekspansi secara global dan membebaskan diri mereka sendiri dari hal-hal lokal. Di sini, jika gagasan glocalisasi adalah heterogenitas, maka gagasan grobalisasi adalah homogenitas. Grobalization, gabungan kata '*grow*' (tumbuh) plus '*globalization*'.

Dari kedua tipe di atas, terlihat adanya pelibatan dua sub-proses utama dari globalisasi, dua-duanya dapat dilihat sebagai global, yang terlibat kompetisi antara satu dengan lainnya. Baik glocalisasi maupun grobalisasi menawarkan kesan-kesan yang sangat berbeda tentang dampak proses-proses transnasional. Perspektif komparatif dua tipe globalisasi dapat dilihat menurut Ritzer (2006) di bawah ini:

Mengutip Robertson, Ritzer mengemukakan elemen-elemen esensial glocalisasi sebagai berikut:

1. Dunia sedang tumbuh menjadi lebih pluralistik. Teori glocalisasi sangat sensitif terhadap perbedaan-perbedaan di dalam dan di antara wilayah-wilayah di dunia.

2. Individu-individu dan kelompok-kelompok lokal memiliki kekuasaan besar untuk menyesuaikan diri, membarui, dan melakukan manuver dalam sebuah dunia global. Teori glokalisasi melihat individu-individu dan kelompok-kelompok sebagai agen-agen yang penting dan kreatif.

3. Proses-proses sosial adalah berhubungan dan saling tergantung. Globalisasi memancing berbagai reaksi, dari kubu nasionalis sampai penerimaan kosmopolitan, yang hidup dari dan merubah globalisasi, yang menghasilkan glokalisasi.

4. Komoditas-komoditas dan media, arena dan kekuatan-kekuatan kunci dalam perubahan budaya akhir abad XX dan awal abad XXI, tidak dilihat sebagai koersif (secara total), namun lebih sebagai penyedia materi untuk dimanfaatkan dalam kreasi individual dan kelompok di seluruh wilayah dunia yang terglokalisasi.

Sedangkan, secara alamiah globalisasi mengarah kepada keragaman ide-ide yang sebagian besar antitesis (glokalisasi [sic.]):

1. Dunia sedang tumbuh menjadi semakin serupa. Teori globalisasi cenderung meminimalkan perbedaan-perbedaan di dalam dan di antara wilayah-wilayah di dunia.

2. Individu-individu dan kelompok-kelompok secara relatif memiliki kemampuan untuk beradaptasi, membarui, dan melakukan manuver dalam sebuah dunia yang terglobalisasi. Teori globalisasi melihat struktur-struktur dan kekuatan-kekuatan yang lebih besar cenderung untuk mencakup kemampuan individu-individu dan kelompok-kelompok untuk menciptakan dunia mereka sendiri.

3. Proses-proses sosial sebagian besar merupakan satu arah dan deterministik. Globalisasi cenderung menyergap yang lokal dan membatasi kemampuannya untuk bertindak dan memberikan reaksi, apalagi bertindak kembali kepada yang global.

4. Komoditas-komoditas dan media merupakan kekuatan-kekuatan kunci dan perubahan budaya dan mereka dipandang sebagian besar menentukan diri sendiri dan kelompok-kelompok di seluruh wilayah dunia yang terglobalisasi.

Dua tipe globalisasi tersebut bagi penulis semakin memperkuat keraguan bahwa globalisasi dapat benar-benar terwujud sebagaimana ide dasar yang melahirkannya. Meski, dari perspektif kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, globalisasi merupakan keniscayaan, sesuatu yang tak terhindarkan atau lebih realistis mengatakan, memungkinkan terjadinya "multiinteraction dan multiinterconnective sekaligus multiinterdependence" di antara umat manusia sejagad. Persoalannya, apakah kita menerima globalisasi dalam arti glocalisasi (heterogenitas) atau globalisasi dalam pengertian homogenitas?

Maka, menyikapi ini semua tentu masih diperlukan pemikiran yang lebih serius dan mendalam. Namun, di luar kedua tipe globalisasi di atas dengan segala karakteristiknya, tetap menjadi harapan bahwa di masa depan perkembangan dunia bisa menuju ke arah yang lebih damai dan manusiawi di antara pluralitas bangsa-bangsa dan berbagai kepentingan. Solusinya, mungkin bisa melalui upaya membangun dialog dan membuang segala kepentingan hegemonik.

5. Amerika, Israel dan Perdamaian Dunia

Kawasan Timur Tengah, hingga sekarang, terus bergolak. Saban hari, umat manusia menyaksikan konflik dan bahkan tragedi kemanusiaan. Konflik terjadi baik antara internal kawasan maupun sebab-sebab eksternal. Situasi dan keadaan di Timur Tengah bukan hanya menjadi ujian bagi keberadaan PBB, tetapi juga, bagi umat manusia secara keseluruhan. Serangan Israel di wilayah

Lebanon, beberapa hari terakhir, yang memakan korban penduduk sipil tak berdosa merupakan bukti nyata. Diperkirakan korban mencapai ribuan orang.

Israel, negara bentukan Inggris yang berpenduduk sekitar 7 (tujuh) juta jiwa, tak pelak, merupakan salah satu sumber utama penyebab konflik. Tak kurang, pemerintah Indonesia pun menilai tindakan penyerangan Israel terhadap Lebanon telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum internasional termasuk hukum perang yang melarang menjadikan penduduk sipil sebagai sasaran. Akan tetapi, dengan dukungan Amerika dan sekutunya, Israel dengan leluasa melaksanakan tindakan dan keinginannya. Jatuhnya korban di pihak sipil memang membuat pemerintah Israel menyatakan kesedihannya. Tetapi, itu tentu saja hanya air mata buaya.

Lagi-lagi, sinyalemen Amerika menjalankan politik standar ganda terlihat. Amerika menolak resolusi PBB mengenai gencatan senjata dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Penolakan Amerika Serikat dan Israel terhadap upaya melakukan gencatan senjata membuat dunia frustrasi dan hanya bisa gigit jari. Dunia tak bisa berbuat apa-apa kecuali mengecam dan marah. Persepsi semakin terbentuk bahwa Amerika Serikat bersikap partisan dalam konflik Timur Tengah dan menjalankan standar ganda dalam mendorong demokratisasi dan perlindungan HAM di dunia, seperti dalam kasus Irak dan penyiksaan tawanan di penjara Guantanamo (Kompas, 2/8/06).

Dukungan all-out Amerika Serikat kepada Israel, menurut Luthfi Assyaukani (Kompas, 2/8/06), dilatarbelakangi oleh beberapa hal: pertama, karena alasan strategis; dan kedua, karena alasan moral. Kedua alasan ini sejak beberapa tahun terakhir mulai dipertanyakan, termasuk dari kalangan pengamat dan akademisi di Amerika sendiri.

Bagi Amerika, alasan strategis dikaitkan dengan peran Israel untuk membendung pengaruh Soviet ke dunia Arab, sebagai basis militer, dan untuk mengurangi terorisme. Dan, alasan moral bahwa Israel adalah negara lemah, negara demokratis, bangsa Yahudi adalah bangsa yang pernah mengalami penderitaan, dan warga Israel adalah warga pencinta damai dan lebih baik secara moral ketimbang orang-orang Arab, karenanya Israel lebih wajar dibantu dan didukung ketimbang bangsa Arab. Kedua alasan ini, baik alasan strategis dan alasan moral, ulas Luthfi (Kompas, 2/8/06), tidak bisa lagi dipertahankan.

Gugatan terhadap berbagai alasan yang dijadikan dasar politik Amerika di Timur Tengah, seyogianya mendorong dan membuka mata Amerika untuk mau mengubah kebijakan politik luar negeri yang selama ini dijalankan. Amerika sebagai satu-satunya negara adidaya dunia dengan segala power yang dimilikinya merupakan salah satu faktor kunci bagi penyelesaian konflik. Ironisnya, alih-alih sebagai mediator, Amerika lebih terpengaruh oleh lobi-lobi Yahudi. Lobi-lobi Yahudi menjadi tembok penghalang bagi keinginan mewujudkan kedamaian di Timur Tengah.

Akan tetapi, melihat politik luar negeri Amerika, tampak bahwa situasi konflik di Timur Tengah memang sengaja dipelihara untuk menjamin kelangsungan kepentingan Amerika dan sekutunya. Kepentingan Amerika dan sekutunya itu seringkali dapat dikaitkan dengan kepentingan ekonomi, berupa sumber-sumber kekayaan minyak; dan industri persenjataan. Dari segi politik, situasi konflik di Timur Tengah akan melanggengkan hegemoni Amerika dan sekutunya di Dunia. Sebab dunia Arab, akan terus disibukkan dengan situasi konflik berkepanjangan.

Hal tersebut terakhir, terutama menemukan relevansinya dan seolah-olah untuk membenarkan tesis Samuel P. Huntington tentang

benturan peradaban, yang termuat dalam bukunya "The Clash of Civilization and the Remaking of World Order" (1996). Oleh Huntington, peradaban dunia terbagi ke dalam sembilan peradaban, yaitu Barat (Western), Amerika Latin (Latin American), Afrikan, Islam (Islamic), Sinic, Hindu, Orthodox, Budha (Buddist), dan Jepang (Japanese). Dalam hal ini, Huntington ingin memperlihatkan bahwa kepentingan yang paling mendesak untuk dilakukan adalah bagaimana menarik negara-negara Non-Barat untuk membuat "sejarah baru". Sejarah ini bermaksud ingin menempatkan bahwa Baratlah yang dibutuhkan, bukan sebaliknya. Sejumlah pengamat menilai, kebijakan politik luar negeri Amerika sangat dipengaruhi oleh tesis Huntington ini.

Konflik berkelanjutan di kawasan Timur Tengah, menurut Nourouzzaman Shiddieqy (1996), terkait dengan peta wilayah negara-negara Arab sekarang ini, yang dibuat oleh kaum penjajah Barat, khususnya Inggris dan Perancis menjelang dan sesudah Perang Dunia I. Kaum penjajah, dalam hal ini Inggris, menurut Nourouzzaman, memang pintar dalam membagi-bagi wilayah. Ia selalu mempersiapkan "bom waktu" yang berwujud wilayah yang akan menjadi biang sengketa antara negara-negara yang dibentuknya. Lihat misalnya: Kashmir (sengketa India dan Pakistan), sengketa tanah antara Palestina dan Israel, dan antara Irak dan Kuwait.

Dengan demikian, masalah-masalah yang terjadi di berbagai wilayah Arab pada dasarnya, sejak awal, memang terkait dengan kepentingan yang lebih luas dari kawasan itu sendiri. Ini artinya, dunia harus bertanggung jawab bukan hanya karena alasan moral, tetapi juga, karena alasan politik dan sejarah serta kemanusiaan universal. Terlebih lagi, jika memang terdapat keinginan untuk membangun tata dunia baru yang lebih damai, manusiawi dan setara.

Azyumardi Azra (2002), berpendapat bahwa keterlibatan pihak-pihak eksternal (kekuatan internasional) dalam mewujudkan perdamaian menjadi faktor yang sangat krusial. Kekuatan internasional, khususnya Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya, harus bersikap lebih adil terhadap bangsa Palestina (dan dunia Arab pada umumnya [sic.]; tidak menerapkan standar dan perlakuan ganda yang berbeda terhadap kedua belah pihak. Selain itu, kekuatan internasional juga harus melakukan tekanan-tekanan kepada kedua belah pihak untuk saling mengakui eksistensi masing-masing untuk pada gilirannya hidup berdampingan secara damai.

Sejalan dengan itu, Dewan Keamanan PBB harus pula melakukan reformasi, yang paling penting menyangkut keanggotaan dan masalah hak veto; peningkatan peran lembaga internasional, khususnya OKI; dan tak kurang pentingnya, komunikasi dan kerjasama internal kawasan Arab sendiri. Mengapa kawasan lingkup internal ini penting? Saya teringat ketika menulis tesis tentang pemikiran Munawir Sjadzali. Di salah satu bukunya, beliau mengungkapkan pernah disindir oleh wartawan Arab, mengapa orang Islam Indonesia yang mayoritas tidak bisa mendirikan negara Islam. Oleh pak Munawir, dijawab secara diplomatis, "saya juga heran mengapa Timur Tengah yang masih sedarah sama-sama bangsa Arab, tetapi konflik terus menerus!

6. Jakarta *on Cover*

Tulisan ini tentu lah tidak berpretensi untuk melukiskan Jakarta, ibu kota negara RI secara menyeluruh, seperti yang dapat disaksikan langsung kasat mata oleh mereka yang tinggal menetap atau yang tinggal sementara (musafir) karena berlibur, sekadar berkunjung, urusan dinas, atau yang sedang belajar seperti

penulis. Lagi pula, melalui layar kaca dan media massa lainnya, toh setiap saat masyarakat dapat menyaksikan dan mengikuti berbagai hal yang terjadi.

Namun berbeda dari "Jakarta under Cover", sebuah judul buku best seller yang mengulas sisi-sisi tersembunyi yang tidak kasat mata (termasuk yang disebut kehidupan malam). Tulisan ini hanya mengemukakan sebagian kecil dari kehidupan dan aktivitas sehari-hari masyarakat Kota Jakarta yang unik dan masih belum lazim dijumpai di masyarakat daerah luar Jakarta. Sesuai dengan judulnya, "Jakarta under Cover", buku tersebut melukiskan suatu kehidupan yang sebenarnya bukan hanya terjadi di malam hari, tetapi bisa berlangsung selama 24 jam. Kehidupan yang barangkali oleh sebagian orang tidak terbayangkan pernah ada dan sedemikian berbeda dari nilai-nilai yang dianut mayoritas masyarakat. "Jakarta on Cover", tulisan ini, hanya memuat sebagian kecil bagaimana warga Jakarta menjalani aktivitas kesehariannya.

Sesuai fungsinya sebagai ibu kota negara, Jakarta tampak memang menjadi pusat berbagai aktivitas, untuk tidak mengatakan seluruh aktivitas kehidupan. Berbagai hal (dapat) terjadi dan berbagai hal juga (dapat) ditemukan. Mulai dari aktivitas ekonomi, sosial-budaya, politik, dan hingga agama. Dari segi ekonomi, berbagai macam aktivitas bisnis dari hulu hingga hilir berlokasi atau paling tidak memiliki kantor pusat di Jakarta.

Dari aspek sosial-budaya, selain sebagai pusat sarana dan fasilitas pendidikan, misalnya, Jakarta juga menjadi tempat pengembangan budaya dan interaksi budaya yang beragam, dari budaya lokal, regional hingga budaya hidup global. Termasuk perseteruan antara Inul sang Ratu Ngebor vs H. Rhoma Irama sang Raja Dangdut. Dari aspek politik lebih jelas lagi. Jakarta merupakan wilayah yang paling tinggi tingkat tensi politiknya, sebab menjadi

tempat kegiatan dan domisili para elit politik dan pemerintahan, termasuk DPD yang konon mestinya berkedudukan di daerah. Kalau sudah menyangkut aspek yang satu ini, skenarionya bisa sangat canggih dan nyelimet.

Dari aspek keagamaan, khususnya Islam, Kota Jakarta juga tempat (pusat)nya berbagai kegiatan keagamaan, domisili ulama, muballigh dan pakar-cendekiawan Islam. Di sini dapat dijumpai majelis zikir asuhan H. Arifin Ilham, dan majelis taklim binaan Hj Luthfiah Sungkar, kelompok ahlu sunnah, kelompok moderat hingga kelompok liberal dalam pemikiran dan kelompok yang disebut fundamental atau garis keras. Bahkan juga terdapat sejumlah kelompok "di bawah pengawasan", seperti Komunitas Eden pimpinan Lia Aminuddin.

Geliat Kehidupan

Sejak dari bangun tidur di pagi hari hingga tidur kembali di malam hari dan bangun lagi keesokan harinya, kehidupan Kota Jakarta terus berjalan. Jakarta sendiri terus bergeliat, tak pernah tidur. Malam boleh hening dan larut, warga sebagian mungkin tidur, tetapi tidak demikian bagi mereka yang menawarkan jasa dan bekerja di malam hari. Bagi mereka ini, malam adalah siang dan siang adalah malam. Mereka itu, bisa kita jumpai di hotel, restaurant, mall, warung kaki lima, airport, pelabuhan, stasiun dan lainnya. Pendek kata, Jakarta menyediakan layanan 1 x 24 jam. Syaratnya cukup satu, punya duit!

Di siang hari, geliat ibu kota memang lebih tampak jelas. Jalan-jalan padat penuh kendaraan segala jenis dan umur; dari yang murah-meriah hingga mahal-mewah dan dari keluaran jaman baheula hingga keluaran terbaru. Bahkan kawasan tempat saya belajar, Ciputat, saking padatnya mendapat gelar sebagai kawasan termacet di dunia. Kendaraan di jalan bisa mencapai sekian kilometer. Selain itu, jika berjalan-jalan di jalan, kita akan menjumpai kendaraan yang melaju kencang seolah akan menabrak saja dan tak memberi kesempatan

untuk menyeberang. Semua orang tampak bergegas dan sibuk serta peduli hanya dengan urusannya sendiri, urusan orang lain EGP (emangnye gue pikirin)!

Ragam aktivitas

Geliat kehidupan mulai lebih terasa tatkala kita naik ke bus (angkutan kota). Menggunakan jasa angkutan kota di Jakarta memerlukan sikap antisipatif. Pertama, kita harus waspada dari tindakan copet. Kedua, menyiapkan uang receh melayani para "peminta-minta", dari yang meminta setengah memaksa sampai yang meminta dengan cara elegan dan sopan. Dan ketiga, menyiapkan uang kalau-kalau kita tertarik untuk membeli berbagai macam "jualan", baik berupa surat kabar, majalah, buku, alat rumah tangga hingga yang sekadar berupa jajanan ringan. Naik ke bus juga jangan harap busnya berhenti lebih dahulu, kita harus berlari-lari, loncat dan kemudian naik. Sebelum naik, supaya tidak menyesal dan pegal karena berdiri, perhatikan ucapan kondektur, bedakan: "kosong-duduk" dan "kosong-kosong". Kalau "kosong-duduk" berarti masih tersedia kursi, tetapi kalau "kosong-kosong" berarti anda harus siap-siap untuk bergantung.

Tidak banyak yang berubah dari Jakarta, selama beberapa tahun belakangan ini. Perubahan dari segi fisik memang tampak di mana-mana, soalnya inilah yang paling senang dan mudah dianggarkan oleh pejabat pemerintah, entah mengapa. Tapi kehidupan dan aktivitas masyarakat tetap saja seperti dulu, terutama aktivitas yang bersentuhan dengan masyarakat lapisan kelas menengah ke bawah. Bagi masyarakat tanpa skill memadai, pekerjaan yang tersedia adalah pekerjaan serabutan. Apa saja jadi, yang penting kerja dapat duit buat makan. Kalau sudah berkeluarga, sekalian dengan anak istri. Sampai di sini, kehidupan Jakarta tetap keras, penuh persaingan, dan intrik. Ungkapan

"kejamnya ibu tiri (bagi ibu tiri yang kejam) lebih kejam ibu kota masih tetap berlangsung terus.

Menyaksikan ragam pekerjaan yang dijalani masyarakat kelas bawah, kadang-kadang membuat kita bisa mengeryitkan dahi memikirkan rasionalitasnya. Dapat berapa dengan jualan seperti itu sehari? Jangan tanya lagi soal jaminan hari tua, masa depan anak dan keluarga! Demikian juga, dengan soal jaminan kesehatan dan pendidikan yang layak. Bandingkan dengan sebagian elit pemimpin, duduk mendengkur tetapi penghasilan tidak terukur. Lihatlah, misalnya mereka yang jualan keliling sambil berjalan membawa dagangan berupa: sapu tangan, handuk kecil, baju dalam, rim, sandal-sepatu, roti, es, kue, sayur, bakso, mie ayam, remote TV, dan lainnya. Atau mereka yang menawarkan jasa: sol sepatu, jahit pakaian di tempat, pewantex, dan lainnya. Atau yang menawarkan rekreasi dan hiburan di tempat: pengamen, atraksi seni plus (menggunakan monyet), dan lainnya. Masalahnya mereka banyak. Tidak berapa lama, lewat lagi yang lainnya menawarkan hal yang sama. Kadang saya iseng bertanya, udah dapat berapa bang? Belum nih bang, jawabnya sambil menyeka peluh di wajah. Lalu, gimana dong abang dan keluarga menjalani hidup hari ini? Tanyaku dalam hati.

Begitulah, sekelumit potret kehidupan dan aktivitas sebagian anak bangsa Indonesia, yang kekayaan alamnya melimpah ruah. Potret kehidupan yang kurang menjanjikan masa depan, meski mungkin sebagian dari mereka menjalaninya dengan penuh rasa syukur dan tabah. Atau, seperti kata mereka yang penting halal. Maaf, saya harus jeda sebentar, karena di depan kamar saya menulis artikel ini ada pengamen yang segera menyelesaikan lagu Ebit G. Ade yang dinyanyikannya (vokal tunggal) diiringi gitar. Ia sudah sampai pada lirik lagu "... mungkin Tuhan mulai bosan - mendengar pinta kita – yang selalu bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat

dengan kita- coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang, du du du du du du ...". Lagunya cukup nikmat, saya harus memberinya sesuatu.

Menarik Pelajaran

Hiruk pikuk Kota Jakarta, membuat orang udik seperti saya tidak kerasan. Jika bukan karena sudah melangkahakan kaki, rasanya ingin segera kembali ke kampung. "Home sweet home", kampung halaman tetap lebih nyaman. Herannya, seperti sebagian lirik lagu yang cukup populer "ke Jakarta aku kan kembaliiii..., walaupun apa yang kan terjadi". Tetap saja Jakarta menjadi tujuan, sekaligus tumpuan harapan bagi banyak orang dari berbagai penjuru negeri ini. Terbukti dari tahun ke tahun Jakarta semakin bertambah padat, bukan hanya karena kelahiran (mortalitas) penduduk, tetapi juga, karena urbanisanisasi. Saya sendiri memilih lagu Ebiyet G. Ade, "Aku ingin pulaang". Lalu? Sebuah pelajaran berharga, bagi yang memikirkan.

7. Tragedi Peradaban dan Kemanusiaan: Mencari Jalan Keluar

Beberapa tahun belakangan ini, umat manusia di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia banyak menyaksikan dan mengalami kejadian-kejadian yang mengejutkan, tidak hanya karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dalam berbagai bidang kehidupan: ekonomi, politik, budaya, gaya hidup sampai hal-hal yang berkaitan dengan agama dan kemanusiaan.

Begitu pula, kita diperhadapkan dengan perusakan dan kerusakan lingkungan hidup, bagaimana mengatasi patologi sosial, tindak kejahatan yang semakin canggih, lalu soal-soal yang menjadi agenda utama reformasi: penegakan hukum dan hak asasi manusia,

pemberantasan KKN dan bagaimana mengatasi krisis multi-dimensional.

Suasana dan situasi yang demikian semakin diperparah munculnya tindakan terorisme yang notabene “atas nama agama”. Padahal, suatu tindakan terorisme apapun yang menjadi alasannya pada dasarnya bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam ajaran agama itu sendiri. Masih segar di ingatan banyak orang, tragedi WTC, bom Bali, dan bom Marriot yang menelan banyak korban jiwa dan korban luka-luka. Sebuah ironi di tengah kemodernan umat manusia. Sayangnya, respons atas berbagai kejadian ini kadang tidak pas. Reaksi yang muncul cenderung hanya mencari “kambing hitam” tanpa berusaha menemukan akar penyebab timbulnya. Ironisnya pula, umat Islam dan ajaran Islam seringkali menjadi sasaran yang dianggap sebagai sumber pelaku teroris.

Reaksi berlebihan yang ditunjukkan sementara negara di dunia, seperti Amerika dan yang bersekutu dengannya, tampak tidak menyelesaikan masalah. Upaya yang mereka lakukan justru semakin memicu dan memacu lahir dan bertambahnya tindakan terorisme. Apalagi cara penanganan terorisme yang mereka lakukan tidak tunduk pada aturan hukum internasional dan pada kebijakan PBB. Tentu saja, sikap seperti ini selain menunjukkan kesombongan sebagai negara adidaya, contoh buruk, dan juga melahirkan teroris yang dilakukan oleh mereka sendiri. Betapa tidak, contoh mutakhir adalah invasi Amerika ke Irak yang tidak mendapat restu PBB. Dengan dalih untuk mengatasi terorisme mereka mengobok-obok negara lain, tanpa peduli akibat buruk yang harus diderita oleh rakyatnya. Maka, Amerika yang bermaksud memerangi terorisme, tanpa sadar telah menjadi pelaku terorisme atau paling tidak menjadi picu bagi lahirnya tindakan terorisme baru.

Muncul pertanyaan di benak kita, inikah wajah peradaban dan kemanusiaan kita? Mari kita jawab bersama, tetapi yang jelas bahwa peradaban dan kemanusiaan dewasa ini telah menjadi tragedi. Wajar jika ada yang menyatakan bahwa semua pengetahuan yang kita miliki membawa kita lebih dekat kepada ketidaktahuan, ketidaktahuan membawa kita kepada kematian, dan kedekatan dengan kematian tidak mendekatkan kita kepada Tuhan, tetapi justru semakin mendekatkan kita pada debu-debu kehancuran.

Mencari Akar Masalah: Belajar dari Kasus Kecil

Banyak kasus di sekitar kita, meski kecil, tetapi penanganannya amat patut menjadi contoh bagi penanganan kasus besar. Kasus tindak pencurian di masyarakat yang dilakukan oleh anggota masyarakat “kelas bawah” alias miskin, misalnya, memang tetap perlu mendapatkan hukuman. Hanya saja, penanganan apalagi upaya untuk meminimalisir tindak serupa, tidak cukup dengan mengadili dan menjatuhkan hukuman atas pelakunya. Tindakan seperti ini, tidak menjamin akan menuntaskan persoalan dan tidak terulangnya kasus serupa. Mengapa? Oleh karena penanganan kasus tidak menyentuh akar penyebab timbulnya permasalahan. Kasus seperti ini, meniscayakan kita untuk mempelajari sebab mendasar yang menjadi latar belakangnya. Sebab, apakah patut misalnya, menjatuhkan hukuman bagi orang yang mencuri karena dorongan untuk memenuhi rasa lapar?

Di masa Khalifah Umar ra. pernah seorang pencuri tidak dipotong tangannya. Dengan kata lain, tidak dijatuhi hukuman, sebab ia mencuri dalam suasana paceklik (krisis) dan apa yang dicuri sekadar memenuhi rasa laparnya. Karenanya, alangkah tidak adilnya, jika seorang pencuri kecil ditembak di tempat, mati. Sementara mereka yang mencuri harta negara dan rakyat trilyunan rupiah tidak tersentuh hukum dan bahkan mendapat perlakuan istimewa. Inilah contoh

penanganan kasus yang mengusik rasa keadilan di tengah masyarakat. Jangan heran, jika masyarakat kurang respek dengan lembaga penegakan hukum kita.

Belajar dari kasus ini, jelas bahwa penanganan sebuah kasus tidak cukup hanya dengan melihat akibat tanpa mempelajari dan mempertimbangkan sebab yang melatarbelakanginya. Bila hal ini dihubungkan dengan krisis peradaban dan kemanusiaan manusia modern, maka seyogianya kita mencoba menelusuri dan merenungkan secara lebih mendalam apa yang menjadi faktor mendasar penyebab timbulnya. Bisa jadi umat manusia dewasa ini telah dilanda krisis orientasi hidup ataupun telah terjadi pergeseran dalam memaknai hidup dan kehidupan ini. Hal mana pada tingkat lebih jauh menimbulkan sikap hidup yang keliru, demoralisasi, dan hilangnya pegangan spiritual.

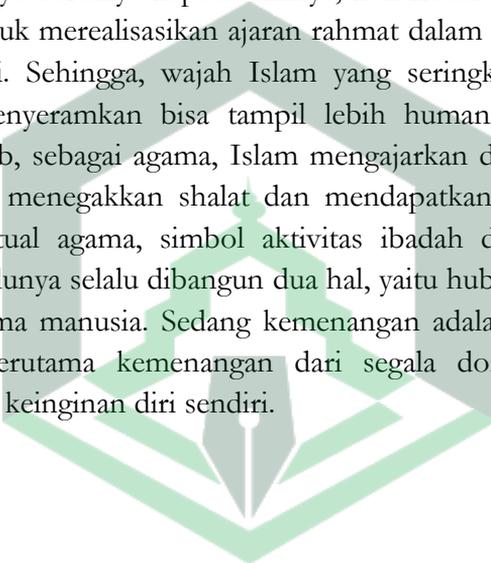
Kemajuan Material dan Moral: Membangun Keseimbangan

Saat ini, kita juga menyaksikan sebuah dunia yang terpecah belah. Betapa tidak, telah terjadi fenomena yang kuat memangsa yang lemah, manusia saling menjarah, saling menghancurkan, dan saling angkuh dengan peradaban masing-masing. Iklim kehidupan di muka bumi semakin terasa panas dan ganas. Sementara itu, kemajuan dan capaian peradaban hanya diukur dari aspek material. Tetapi, pertanyaan untuk apa semua itu, sedikit yang mau memikirkannya. Peradaban yang kehilangan orientasi spiritual merapuhkan sendi-sendi kehidupan di permukaan bumi. Keadaan ini menimbulkan frustrasi bagi manusia modern.

Salah satu akar masalah timbulnya krisis ini adalah kurang atau tidak adanya kesadaran akan makna dan tujuan hidup manusia yang sesungguhnya. Seolah-olah kehidupan hanya kini dan di sini, sehingga tidak terpikirkan adanya dampak dalam jangka panjang atas segala apa yang diperbuat di kehidupan dunia. Prilaku yang menguat adalah

bagaimana memuaskan ambisi untuk menikmati segala dorongan dari dalam diri. Yang untuk semua itu, manusia kadang tidak segan untuk mengorbankan dan memangsa sesamanya.

Islam adalah agama rahmat. Agama yang mengajarkan kasih sayang bagi semua makhluk Tuhan. Mereka yang menyatakan diri Muslim seyogianya bertanya kepada dirinya, kontribusi apa yang telah diberikannya untuk merealisasikan ajaran rahmat dalam kehidupan ini, kini, dan di sini. Sehingga, wajah Islam yang seringkali dipandang momok dan menyeramkan bisa tampil lebih humanis dan penuh kedamaian. Sebab, sebagai agama, Islam mengajarkan dua hal pokok, yaitu bagaimana menegakkan shalat dan mendapatkan kemenangan. Shalat adalah ritual agama, simbol aktivitas ibadah dan nilai yang menekankan perlunya selalu dibangun dua hal, yaitu hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Sedang kemenangan adalah tujuan yang ingin dicapai, terutama kemenangan dari segala dorongan untuk memperturutkan keinginan diri sendiri.



IAIN PALOPO

Daftar Bacaan

I. Kitab Suci: Al-Quran dan Terjemahnya

II. Buku-Buku:

Abdullah, M. Amin. *Falsafah Kalam di Era Post Modernisme*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

----- . *Studi Agama Normativitas atau Historisitas*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Abdurrahman, Moeslim. *Islam Transformatif*. Cet. III; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

Azra Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam*. Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996.

----- . *Islam Reformis Dinamika Intelektual dan Gerakan*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bakti, Andi Faisal. *Good Governance dan Conflict Resolution in Indonesia: From Authoritarian Government to Civil Society*. Jakarta: logos, 2000.

Effendy, Bachtiar. *Repolitisasi Islam: Bolehkah Islam Berhenti Berpolitik*. Cet. I; Bandung: Mizan, 2000.

----- . *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1998.

Fachruddin, Fuad Moh. *Pemikiran Politik Islam*, (Cet. I; Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1988.

- Ismail, Faisal. *Islam Idealitas Ilahiyah dan Realitas Insaniyah*. Cet. I; Yogyakarta: Adi Wacana, 1990.
- . *Islam in Indonesian Politics: A Study of Muslim Response to and Acceptance of the Pancasila*. Disertasi Doktor, Montreal: McGill University Press, 1985.
- Hidayat, Komaruddin. *Tragedi Raja Midas*. Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1998.
- Madjid, Nurcholish. *Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: PARAMADINA, 1998.
- . *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- . *Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1998.
- . *Ensiklopedi Nurcholish Madjid, Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*. Cet. I; Jakarta: Mizan, 2006.
- . *Indonesia Kita*. Ed. II Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- . *Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*. Cet.I; Jakarta: Paramadina, 1995.
- . *Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam sejarah*. Cet. II; Jakarta: Paramadina, 2000.
- . *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Cet. I; Bandung: Mizan, 1997.

- . *Islam, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*. Cet. III; Jakarta: Paramadina, 1995.
- . *Kaki Langit Peradaban Islam*. Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1997.
- . *Masyarakat Religius*. Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1997.
- . *Pintu-Pintu Menuju Tuban*. Cet. V; Jakarta: Paramadina, 1999.
- . *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1997.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Cet. II; Jakarta: LP3ES, 1985.
- . *Mencari Autentisitas*. Cet. I; Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2004.
- Muhtadi, Asep Saeful. *Komunikasi Politik Indonesia*. Cet. I; Bandung: PT Remadja Rosdakarya, 2008.
- Mulyasa, E. *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*. Cet. II; Bandung: PT Remadja Rosdakarya, 2003.
- . *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Cet. III; Bandung: PT Remadja Rosdakarya, 2003.
- Nasution, Harun. *Islam Rasional*. Cet. II; Bandung: Mizan, 1995.
- Noer, Deliar. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Cet. I; Jakarta: CV Rajawali, 1983.
- Pranowo, M. Bambang. *Islam Faktual: antara Tradisi dan Relasi Kuasa*. Cet. II; Yogyakarta: Adi Cita, 1999.

- Rais, M. Amin. *Cakrawala Islam antara Cita dan Fakta*. Cet. II; Bandung: Mizan, 1989.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Cet. III; Jakarta: UI Press, 1991.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Shihab, Alwi. *Membendung Arus Modernitas*. Cet. I; Bandung: Mizan 1998.
- . *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1994.
- . *Menabur Pesan Ilahi, al-Quran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*. Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Thoha, Miftah. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Tilaar, H.A.R., *Membenahi Pendidikan Nasional*. Cet. II; PT Rineka Cipta, Jakarta: 2002.
- Ubaidillah, A., et.al. *Pendidikan Kewargaan Demokrasi dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.

III. Surat Kabar:

1. KOMPAS
2. FAJAR
3. PALOPO POS

IV. Aturan Perundang-undangan:

1. UUD 1945
2. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional



IAIN PALOPO

Riwayat Hidup Penulis



Abdul Pirol, lahir di Ujungpandang (Makassar), 4 Nopember 1969. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana (Doktorandus) di IAIN Alauddin Palopo (1993), S2 (Magister) di IAIN Alauddin Ujungpandang -sekarang UIN Alauddin Makassar- (2001), dan S3 (Doktor) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2008) konsentrasi Dakwah dan Komunikasi. Penulis sempat pula mengikuti pendidikan Pra Pascasarjana di UNHAS selama satu semester (1998).

Pada 1994, penulis diangkat sebagai dosen di IAIN Alauddin (sekarang STAIN) Palopo. Menjabat Kepala Unit Peningkatan Mutu Akademik STAIN Palopo dari 2004-2006. Selanjutnya 2006-2008 menjabat sebagai Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan. Jabatan Pembantu Ketua diakhiri sebelum habis masa bakti dengan persetujuan Senat STAIN Palopo, karena ingin konsen menyelesaikan studi S3 tanpa beban perasaan melalaikan tugas jabatan yang harus diemban sebaik-sebaiknya. Di luar institusi, penulis juga menjadi pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Palopo dan salah seorang penasehat Persatuan Muballigh Islam Luwu (PERSAMIL).

Penulis adalah Lektor Kepala dalam mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam. Selain itu, penulis juga mengajarkan mata kuliah *Civic Education*, Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Selain mengajar di lingkungan STAIN Palopo, penulis juga mengajar di beberapa perguruan tinggi lain, di antaranya di Universitas Andi Djemma (UNANDA) Palopo dan di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Aktivitas penulis yang lain, yaitu sebagai narasumber mengisi ceramah, seminar, pelatihan, dan forum diskusi; menulis untuk jurnal dan surat kabar; dan menulis buku. Buku dengan judul *Merespons*

Tantangan Zaman: dari Lokalitas hingga Globalitas ini (2008) adalah salah satu karyanya. Buku karyanya yang lain, di antaranya; *Sisi-Sisi Modernitas: Refleksi Berbagai Aspek Ajaran Islam* (2009); *Reaktualisasi Ajaran Islam: Studi atas Gagasan dan Pemikiran Munawir Sjadzali* (2008); dan *Esai-Esai Kbazanah Pemikiran Islam* (2008). Penulis telah mempublikasikan tulisan di sejumlah jurnal dan menulis sekitar 40-an artikel di *Harian Palopo Pos* (Media Fajar Grup).

Kini, penulis yang pernah mendapat penghargaan *Graffiti Award* sebagai dosen terbaik di almamaternya (STAIN Palopo) dan memperoleh penghargaan Satyalancana Karya Satya X tahun dari Presiden RI (2007) serta sejumlah piagam penghargaan lainnya, sedang mempersiapkan dua buku berikutnya: *Antologi Kajian Dakwah dan Komunikasi*; dan *Gerakan dan Pemikiran Dakwah Nurcholish Madjid*.



IAIN PALOPO

Merespons Tantangan Zaman: dari Lokalitas hingga Globalitas, sebagaimana judul buku ini, merupakan refleksi sekaligus respons mengenai beragam isu dan peristiwa yang terjadi pada tingkat lokal dan global. Selain itu, buku ini juga merespons perjalanan masa dengan berbagai perubahan yang dibawahnya serta tawaran-tawaran solusi yang mungkin dilakukan.

Menurut buku ini, kejatuhan secara moral terjadi ketika nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan persamaan dilanggar dengan mudah tanpa rasa risih. Kebangkrutan intelektual terjadi ketika para pendukungnya terlibat pada kepentingan segelintir orang dan sesaat dengan mengorbankan kepentingan orang banyak dan untuk jangka panjang. Kehampaan emosional-spiritual menerpa ketika pertimbangan dan kebijakan yang diambil meminggirkan dimensi psikoreligius-transendental. Nah, ketika sebuah bangsa secara moral, intelektual, dan emosional-spiritual terpuruk, maka “Hijrah” (perpindahan dalam arti luas) ditampilkan untuk menjawab dan menemukan solusinya.

Akhirnya, buku ini penting untuk dibaca bagi para mahasiswa di lingkungan PTAI dan mahasiswa umum, pejabat dan penggiat publik serta peminat masalah-masalah keislaman dan perkembangan peradaban dari berbagai aspeknya dari sudut pandang keindonesiaan yang plural (beragam) dan multikultur (majemuk).

ISBN 978-979-1187-16-9



9 789791 187169